

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HIBAH YANG DIPERJUALBELIKAN**  
(Studi Kasus Putusan Nomor 166/Pdt.G/2015/PA Skg di Pengadilan Agama Sengkang  
Kelas I B)



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan  
pada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar

Oleh  
**MUNIRA**  
NIM. 10100113122

**PEMBIMBING :**

- 1. PROF. DR. H. LOMBA SULTAN, M.A.**
- 2. DR. H. SUPARDIN, M.HI.**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**  
**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

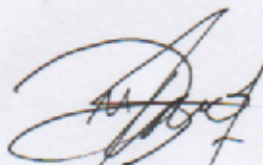
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Munira  
NIM : 10100113122  
Tempat/Tgl. Lahir : Takkalasi, 9 Februari 1996  
Jurusan : Peradilan Agama  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Griya Patri Abdullah Permai, Blok C7 N0.5, Samata  
Judul :PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HIBAH YANG  
DIPERJUALBELIKAN (Studi Kasus Putusan Nomor  
166/Pdt.G/2015/Pa Skg di Pengadilan Agama Sengkang Kelas  
I B)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 30 Maret 2017

Penyusun,



MUNIRA

NIM: 10100113122

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HIBAH YANG DIPERJUALBEIKAN (Studi kasus putusan nomor 166/Pdt.G/2015/Pa.Skg di Pengadilan Agama Sengkang kelas I B", yang disusun oleh Munira, NIM: 10100113122, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2017 M, bertepatan dengan 28 Rabiul Akhir 1438H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Peradilan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 27 Maret 2017 M.  
28 Rabiul Akhir 1438 H.

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Abd. Halim Talli M.Ag	(.....)
Munaqisy I	: Andi Intan Cahyani, S.Ag., M.Ag.	(.....)
Munaqisy II	: Drs. H. M. Jamal Jamil, M. Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M. Ag.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. H. Supardin, M.H.I.	(.....)

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.  
NIP. 19621016199031003



## KATA PENGANTAR

الحمد لله الذى انعم علينا بنعمة الايمان والاسلام, الصلوة والسلام على اشرف الانبياء  
والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين

Puji syukur kehadiran Allah swt. yang telah memberikan segala nikmat sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah yang Diperjualbelikan (Studi kasus Putusan Nomor : 166/Pdt.G/2015/Pa Skg di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B)”. Shalawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad Saw yang telah membawa ummat Islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, baik secara moril maupun secara materi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun merasa perlu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr.H. Musafir Pababbari, M.Si., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Dr. Supardin, M.H.I., Selaku Ketua Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Dr. Hj. Fatimah, M.Ag., Selaku Sekertaris Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

5. Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A. Selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan masukan dan saran sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
6. Dr. H. Supardin, M.HI. Selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan kritik yang membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Peradilan Agama yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat memperoleh gelar sarjana.
8. Staf jurusan Peradilan Agama, Kak Sri yang telah banyak membantu penyusun selama penyusun menyelesaikan kuliah di UIN Alauddin Makassar.
9. Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Sengkang yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sengkang.
10. Drs. Idris, S.HI., M.HI. Selaku Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan penjelasan mengenai penelitian yang kami laksanakan.
11. Dra. Hj. Jusmah, S.HI., Selaku Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan penjelasan mengenai penelitian yang kami laksanakan.
12. Kepada Bapak tercinta Alm. Drs. Hamzah yang semasa hidupnya selalu mendoakan dan mendukung pendidikan penyusun hingga akhirnya sampai di titik ini dan Ibu tercinta Hj. Hasnawiah, S.Pd yang selalu

mendoakan, memberikan semangat dan masukan kepada penyusun, serta saudara sedarah ku, Mukhlis, Mukhsin, Mukmin dan Mutakhir yang memberikan semangat kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

13. Seluruh teman-teman di jurusan Peradilan Agama terkhusus kepada angkatan 2013 kelas C yang telah memberikan banyak kesan selama penyusun menempuh proses perkuliahan di UIN Alauddin Makassar.
14. Kepada seluruh rekan-rekan Ikatan Penggiat Peradialn Semu (IPPS) UIN Fakultas Syariah dan Hukum khususnya MCS IV, Delegasi TRD Udayana Bali, Delegasi AKM UII dan Delegasi Laica Marzuki UNHAS yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan pengalaman yang tak terlupakan.
15. Kepada Muh.Nasharuddin, S.HI, serta teman seperjuangan Kasmanita, Musyarrafah, Mustainah, dan Ummu Kalsum yang selalu memberikan masukan serta motivasi sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Samata, 21 Desember 2016

Penyusun

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRASNSLITERASI.....	ix
ABSTRAK .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka .....	9
E. Tujuan dan Kegunaan.....	12
BAB II TINJAUAN TEORETIS .....	
A. Kewenangan Mengadili Badan Peradilan.....	13
B. Tinjauan Umum Hibah.....	17
C. Tinjauan Umum Jual Beli.....	27
D. Tinjauan Umum Kewarisan.....	37
E. Kumulasi Perkara .....	44
F. Pihak-pihak dalam Perkara.....	51
G. Putusan Hakim .....	52

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN .....	
	A. Jenis Penelitian .....	62
	B. Lokasi Penelitian .....	62
	C. Pendekatan penelitian .....	62
	D. Sumber data .....	62
	E. Metode Pengumpulan Data .....	64
	F. Instrumen Penelitian .....	65
	G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	65
	H. Pengujian Keabsahan Data .....	66
BAB IV	PENYELESAIAN HIBAH YANG DIPERJUALBELIKAN	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	67
	B. Kedudukan Hukum Tanah Hibah Sebagai Harta Warisan Setelah diperjual belikan.....	77
	C. Pertimbangan Hukum, Hakim Pengadilan Agama Sengkang terhadap putusan Nomor: 166/Pdt.G./2015/Pa.Skg.....	85
BAB V	PENUTUP .....	
	A. Kesimpulan.....	117
	B. Implikasi Penelitian .....	118
	KEPUSTAKAAN .....	120
	LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	124
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	śad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrop terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostop
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ‘ ).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	A
اِ	<i>Kasrah</i>	i	I
اُ	<i>Dammah</i>	u	U

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ... و	<i>fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	a	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah dan ya</i>	i	i dan garis di atas
و	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

--	--	--	--

#### 4. Ta Marbutah

*Transliterasi* untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan [h].

#### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf ي ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah*(i).

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah

dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

#### 7. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz a-ljalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

#### **B. Daftar Singkatan.**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	= subhanahu wa ta ala
saw.	= sallallahu alaihi wa sallam
M	= Masehi
H	= Hijriah
QS	= Qur'an Surah
HR	= Hadits Riwayat
SEMA	= Surat Edaran Mahkamah Agung



## ABSTRAK

**Nama : Munira**

**NIM : 10100113122**

**Judul : PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HIBAH YANG  
DIPERJUALBELIKAN (Studi Kasus Putusan Nomor 166/ Pdt.G/ 2015/  
PA SKg. di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B)**

---

Pokok permasalahan yang akan diteliti pada skripsi ini yaitu bagaimana penyelesaian sengketa tanah hibah yang diperjualbelikan. Kemudian dijabarkan kedalam submasalah yaitu bagaimana kedudukan hukum, tanah hibah sebagai harta warisan setelah diperjualbelikan dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus sengketa tanah hibah yang diperjualbelikan dalam putusan nomor 166/ Pdt.G/ 2015/ PA Skg.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan menguasai permasalahan pembatalan hibah, pembatalan jual beli dan penetapan ahli waris yang diajukan secara bersamaan di Pengadilan Agama Sengkang serta penelusuran literatur ilmiah yang berhubungan dengan masalah hibah, jual beli dan kewarisan serta menganalisis putusan tentang penarikan akta hibah dengan terlebih dahulu menghubungkannya dengan teori-teori tentang hibah. Metode yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus yang digunakan yaitu putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 166/ Pdt.G/ 2015/ PA Skg.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut terjawab bahwa objek tanah yang dihibahkan oleh si penghibah lalu dialihkan lagi dengan cara jual beli oleh si penghibah sendiri tidak dapat digugat kembali menjadi budel waris oleh ahli warisnya sedangkan objek tanah yang dihibahkan lalu dijual lagi oleh penerima hibah yang juga ahli warisnya dapat digugat kembali menjadi budel waris karena melebihi dari 1/3 harta pemberi hibah sehingga berdampak pula pada jual beli nya. Adapun Pertimbangan hakim dalam memutus sengketa tanah hibah yang diperjualbelikan dalam putusan Nomor 166/ Pdt.G/ 2015/ PA Skg di Pengadilan Agama Sengkang tidak mempertimbangkan pasal 50 ayat (2) dan penjelasan angka 38 pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menjelaskan bahwa sengketa hak milik yang berkaitan dengan kewenangan absolute Pengadilan Agama dalam pasal 49 diselesaikan di Pengadilan Agama selama subjek nya antara orang beragama Islam.

Peneliti berharap skripsi ini dapat menjadi referensi bagi penegak hukum maupun masyarakat dalam memahami dan memutuskan permasalahan hak milik yang berkaitan dengan kewenangan absolute Pengadilan Agama.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah swt. kemudian Allah telah menyerahkannya kepada manusia untuk menguasai harta tersebut melalui izin-Nya sehingga orang tersebut sah memiliki harta tersebut. Adanya pemilikan seseorang atas harta kepemilikan individu tertentu mencakup juga kegiatan memanfaatkan dan mengembangkan kepemilikan harta yang telah dimilikinya tersebut. Setiap muslim yang telah secara sah memiliki harta tertentu maka ia berhak memanfaatkan dan mengembangkan hartanya. Hanya saja dalam memanfaatkan dan mengembangkan harta yang telah dimilikinya tersebut ia tetap wajib terikat dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengembangan harta.<sup>1</sup>

Harta yang dimiliki setiap individu selain didapatkan dan digunakan juga harus dijaga. Menjaga harta berhubungan dengan menjaga jiwa, karena harta akan menjaga jiwa agar jauh dari bencana dan mengupayakan kesempurnaan kehormatan jiwa tersebut.

Hidup dan matinya seseorang merupakan takdir yang ditetapkan oleh Allah, maka apalah guna harta yang melimpah, tanah dimana-mana, berlian mewah dan rumah yang besar ketika Allah memang sudah memanggil untuk menghadap padanya-Nya maka semua apa yang kita miliki di dunia ini akan tinggal begitu saja

---

<sup>1</sup>Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami* (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), h.25.

termasuk harta. Islam mengatur harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dengan cara, warisan, wakaf, dan hibah.

Sebagai salah satu makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah swt. kematian merupakan peristiwa yang lazim namun justru menimbulkan akibat hukum tertentu, karena suatu kematian menurut hukum merupakan peristiwa hukum. Artinya, apabila ada seseorang yang meninggal dunia, maka segala sesuatu hak dan kewajiban hukum yang dimiliki selama hidup akan ditinggalkan.

Hak dan kewajiban itu pada umumnya, sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud dalam bentuk benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, tetapi nasab kekayaan yang berbentuk benda sebagai peninggalan seseorang saat meninggal dunia akan jadi harta peninggalan dan pada akhirnya harta peninggalan tersebut harus dialihkan kepada orang-orang yang berhak.

Berbagai problem dalam masyarakat tentang peralihan harta dengan cara pembagian harta peninggalan atau harta warisan muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari perebutan harta yang berujung pada pengadilan, penggalan kuburan pewaris, percobaan pembunuhan hingga pembunuhan ahli waris.

Di samping itu, masyarakat Indonesia misalnya cenderung tidak ingin membedakan hak waris laki-laki dan hak waris perempuan, padahal dalam hukum Islam hak laki-laki dan perempuan dua banding satu (2:1) dianggap final karena landasan hukumnya pasti.<sup>2</sup> Di dalam QS.Al-Nisa'/4:11 dinyatakan:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

---

<sup>2</sup>Abdul Gaffar, *Hibah Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Samata: Alauddin University Press, 2013), h.2.

الْشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ  
 فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ  
 وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
 حَكِيمًا ﴿١١﴾

Terjemahnya :

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua; Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separuh harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>3</sup>

Salah satu alternatif yang dapat digunakan dalam pembagian harta, khususnya yang terkait dengan warisan adalah hibah. Secara harfiah, hibah bermakna anugerah, derma, hadiah, bantuan atau pemberian. Sedangkan secara terminology, hibah adalah proses pemilikan benda atau sesuatu kepada orang lain tanpa balasan atau dalam hadis Nabi saw., hibah memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, baik yang diberikan perseorangan maupun lembaga, karena dalam prakteknya, Nabi Muhammad saw, dan para sahabatnya memberi dan menerima

<sup>3</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2014), h.102.

hadiah, tidak saja diantara sesama muslim tetapi juga dari atau kepada orang lain yang berbeda agama, bahkan dengan orang musyrik sekalipun.<sup>4</sup>

Nabi Muhammad saw. pernah menerima hadiah dari orang Kisra, dan beliau pernah mengizinkan Umar bin Khattab untuk memberikan sebuah baju kepada saudaranya yang masih musyrik di Mekah. Dari kenyataan di atas hibah dapat dikatakan sebagai sarana untuk memupuk tali/ ikatan pergaulan antar sesama umat manusia.<sup>5</sup>

Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali atau dipalsukan, kecuali dalam hal-hal sebagaimana termuat dalam pasal 1688 KUH Perdata<sup>6</sup>, yaitu (1) karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana hibah telah dilakukan; (2) jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan dengan maksud membunuh si pemberi hibah; (3) jika si penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si pemberi hibah, padahal si pemberi hibah itu telah jatuh miskin.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 212 KHI yang mengatakan “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga diatur mengenai penarikan hibah yaitu pada pasal 716 sampai dengan pasal 730 yang secara keseluruhan menjelaskan bahwa dibenarkan dapat dilakukan penarikan hibah oleh penghibah

---

<sup>4</sup>Abdul Gaffar, *Hibah Dalam Perspektif Hadis Nabi*, h.6.

<sup>5</sup>Dede Ibin, “*Hibah, Fungsi dan Korelasinya dengan Kewarisan*”, <http://www.google.co.id/search?sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=dede+ibin> (31 Maret 2016).

<sup>6</sup>R.Soebekti, R.Tgitrosoedibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h.466.



dengan syarat si penerima hibah menyetujuinya dan dengan adanya putusan pengadilan.<sup>7</sup>

Ketika terjadi perselisihan atau sengketa yang berkaitan dengan hibah maupun harta peninggalan maka, Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syari'ah<sup>8</sup>

Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, buku III, Bagian III*.

<sup>8</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Undang-Undang Peradilan Agama, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2009), h.82.

<sup>9</sup>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Undang-Undang Peradilan Agama, h.82.

Berdasarkan undang-undang tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkara mengenai hibah yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam di selesaikan di Pengadilan Agama. Perkara hibah yang sering muncul dan dimintakan untuk diselesaikan di Pengadilan Agama yaitu mengenai pembatalan hibah.

Di Pengadilan Agama Sengkang menerima perkara hibah pada tahun 2013 sampai tahun 2016 sebanyak 3 perkara diantaranya, 2 perkara mengenai pembatalan hibah dan 1 perkara yang mengakumulasi dengan malwaris.<sup>10</sup> Namun dari 3 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sengkang ditemukan 1 perkara yang mengakumulasi perkara pembatalan hibah dengan perkara lainnya yaitu penetapan ahli waris dan pembatalan jual beli yang dikategorikan sebagai perkara malwaris pada tahun 2015 terdaftar dengan perkara Nomor: 166/Pdt.G./2015/PA Skg.<sup>11</sup>

Terhadap permasalahan yang dihadapi dalam perkara pembatalan hibah yang diajukan di Pengadilan Agama Sengkang dengan nomor perkara : 166/Pdt.G./2015/PA Skg, dalam perkara ini yang mengajukan untuk melakukan pembatalan hibah bukan berasal dari pihak penerima hibah maupun pemberi hibah melainkan pihak lain yang merupakan ahli waris pemberi hibah. Penggugat yang mengajukan gugatan sebanyak 15 orang dan tergugat sebanyak 36 serta turut tergugat 1 orang.

Gugatan yang diajukan oleh ahli waris pemberi hibah berupa gugatan kumulasi antara pembatalan hibah, pembatalan jual beli, dan penetapan ahli waris.

---

<sup>10</sup>“Info Perkara Pengadilan Agama Sengkang”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Sengkang*. [http://www.pasengkang.net/index.php?option=com\\_content&view=article&id=34&Itemid=78](http://www.pasengkang.net/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=78) (23 April 2016).

<sup>11</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor perkara : 166/Pdt.G./2015/PA. Skg”, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, <http://www.putusan.mahkamahagung.go.id> (20 Februari 2016).

Gugatan tersebut ditujukan kepada penerima hibah dan pembeli tanah hibah yang dijual oleh pemberi hibah semasa hidupnya dan yang telah dijual oleh ahli waris penerima hibah semasa hidupnya pemberi hibah. Ahli waris pemberi hibah mengajukan gugatan pembatalan hibah dikarenakan hibah yang diberikan oleh pemberi hibah melebihi dari 1/3 seluruh harta pemberi hibah dan tidak mendapat persetujuan dari semua ahli waris.

Sebelumnya pemberi hibah menghibahkan harta berupa tanah kepada ahli waris yaitu keponakannya, namun pemberi hibah semasa hidupnya menjual sebagian tanah yang sudah dihibahkan tersebut dengan alasan tertentu dan hal tersebut sepengetahuan penerima hibah dan penerima hibah tidak keberatan. Dan sebagian tanah hibah tersebut juga dijual oleh ahli waris si penerima hibah. Sehingga dengan terjadinya peristiwa jual beli tanah hibah tersebut mengakibatkan akta berganda di objek yang sama atau *error administrative* yang dibuat oleh PPAT sebagai turut tergugat dalam perkara ini.

Meskipun sebenarnya pihak penerima hibah tidak keberatan atas penjualan tanah hibah tersebut namun permasalahan mulai bermunculan setelah pemberi hibah meninggal dunia, yaitu ahli waris lainnya dari pemberi hibah menggugat tanah hibah yang melebihi 1/3 harta tersebut sebagai budel waris, meskipun tanah tersebut telah diperjualbelikan.

Melihat permasalahan ini, Pengadilan Agama pun mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut sesuai dengan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan diakumulasikan dengan pembatalan jual beli dan penetapan ahli waris. Namun Pengadilan Agama Sengkang menyatakan Gugatan tersebut tidak dapat diterima dengan alasan bahwa Pengadilan

Agama Sengkang tidak berwenang mengadili perkara tersebut sehingga menimbulkan perkara ini berlarut-larut dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit.

## **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

### **1. Fokus Penelitian.**

Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum tanah hibah sebagai harta warisan setelah diperjual belikan dan bagaimana pertimbangan hukum yang diterapkan dalam memutuskan masalah tanah hibah yang diperjualbelikan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak sesuai dalam putusan nomor 166/Pdt.G/2015/Pa.Skg.

### **2. Deskripsi Fokus**

Penyelesaian Sengketa adalah proses menyelesaikan sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat.

Tanah Hibah adalah pemberian berupa Tanah secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Jual Beli adalah perjanjian untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dengan menerima harga yang telah disetujui, harga mana berupa uang.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut pengertian fikih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual.

---

<sup>12</sup>Prof. R. Subekti, S.H., R. Tjutorsodibio, *Kamus Hukum* (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2008), h.64.

Harta Warisan adalah harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya perawatan jenazah (tahjiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.<sup>13</sup>

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan pokok masalah yang menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini yaitu, bagaimana penyelesaian sengketa tanah hibah yang diperjualbelikan yang diuraikan ke dalam beberapa sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum tanah hibah sebagai harta warisan setelah diperjual belikan ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus sengketa tanah hibah yang diperjualbelikan dalam putusan Nomor 166/ Pdt.G/ 2015/ PA Skg di Pengadilan Agama Sengkang ?

### **D. Kajian Pustaka**

Sebelum melakukan penelitian mengenai penyelesaian sengketa tanah hibah yang diperjualbelikan di Pengadilan Agama Sengkang peneliti menemukan referensi yang berkaitan dan menjadi bahan perbandingan sekaligus pedoman dalam penelitian ini, di antaranya :

Pertama, Buku yang berjudul “*Fiqh Muamalah*” oleh Dr. Helmi Karim, M.A. yang membahas permasalahan Muamalah secara umum, termasuk Hibah. Dalam

---

<sup>13</sup>Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171 huruf (b), (c), dan (e).



buku ini pembahasan hibah menjelaskan mengenai pengertian hibah, rukun hibah, syarat dan unsur-unsur hibah.<sup>14</sup>

Kedua, Buku yang berjudul “Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia” oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Dalam buku ini membahas beberapa masalah hukum tentang hibah seperti tentang penghibahan semua harta, penarikan kembali hibah yang telah diberikan dan tentang hibah semasa hidup, dalam buku ini juga dibahas mengenai kemungkinan pelaksanaannya di Pengadilan Agama.<sup>15</sup>

Ketiga, Jurnal Hukum Online yang berjudul “*Hibah, Fungsi dan Korelasinya dengan Kewarisan*” oleh Drs. Dede Ibin, SH. Dalam Jurnal ini penulis mengamati hibah sebagai fungsi sosial dan hibah sebagai solusi hukum waris Islam.<sup>16</sup>

Keempat, Jurnal Hukum Online yang berjudul “*Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*” oleh Faizah Bafadhal. Dalam jurnal ini membahas mengenai hubungan hibah dan kewarisan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan menjadi warisan. Meskipun hibah pada dasarnya tidak dapat ditarik kembali, namun hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya sewaktu-waktu dapat ditarik.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,1993)

<sup>15</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008)

<sup>16</sup>Dede Ibin, “*Hibah, Fungsi dan Korelasinya dengan Kewarisan*”, <http://www.google.co.id/search?sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=dede+ibin> (31 Maret 2016).

<sup>17</sup>Faizah Bafadhal, “*Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan kewarisan dan Pembatalan Hibah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia*”, (31 Maret 2016).

Kelima, Tesis yang berjudul “*Pelaksanaan Pembatalan Hibah Tanah oleh Pemberi Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No.95 /Pdt.G /2004 /PN SMG)*” oleh Endang Sri Wahyuni pada program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang diselesaikan pada tahun 2009. Dalam tesis ini yang dibahas ialah mengenai pembatalan hibah di Pengadilan Negeri dan kendala serta hambatan dalam pelaksanaan pembatalan hibah, yang mengajukan pembatalan hibah ialah pemberi hibah itu sendiri.<sup>18</sup>

Keenam, Skripsi yang berjudul “*Penyelesaian Sengketa Hibah di Pengadilan Agama Makassar (Studi Kasus Putusan No.1497 /Pdt.G/ 2012/ PA.Mks)*” yang diselesaikan pada tahun 2014 oleh Maulana Yusuf Seknun dan merupakan mahasiswa dari Universitas Hasanuddin bagian hukum acara. Dalam skripsi nya dibahas mengenai kedudukan harta berupa rumah setelah dihibahkan, bahwa kepemilikan rumah segera beralih kepada penerima hibah dan tidak dapat dicabut atau dibatalkan kecuali hibah untuk anak. Dalam skripsi tersebut lebih ditekankan pada pembahasan sejauh mana syarat hibah menurut Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana pertimbangan hukum yang diberikan dalam putusan Nomor : 1497/Pdt.G/ 2012/ PA.Mks.<sup>19</sup>

Berdasarkan beberapa buku dan karya ilmiah di atas, peneliti menyimpulkan bahwa penelitian dengan judul “*Penyelesaian sengketa tanah hibah yang diperjualbelikan (Studi Kasus Putusan Nomor : 166/Pdt.G/2015/PA Skg di*

---

<sup>18</sup>Endang Sri, “*Pelaksanaan pembatalan hibah tanah oleh pemberi hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No.95 /Pdt.G /2004 /PN SMG)*”, *Tesis* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2009)

<sup>19</sup>Maulana Yusuf Seknun, “*Penyelesaian Sengketa Hibah di Pengadilan Agama Makassar (Studi Kasus Putusan No.1497 /Pdt.G/ 2012/ PA.Mks)*”, *skripsi* (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014)

Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B)” belum pernah dibahas sebelumnya karena pada umumnya buku dan karya ilmiah di atas baru membahas hibah secara umum, adapun mengenai sengketa tanah hibah yang diperjualbelikan dan diajukan di Pengadilan Agama belum ada yang membahasnya, maka dari itu mengenai masalah hibah tersebut perlu dilakukan penelitian

### ***E. Tujuan dan Kegunaan***

#### **1. Tujuan**

Dengan melihat rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai pada penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Kedudukan Hukum Tanah Hibah Sebagai Harta Warisan Setelah diperjualbelikan.
- b. Untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam memutus sengketa tanah hibah yang diperjual belikan dalam putusan Nomor 166/Pdt.G/2015/PA Skg di Pengadilan Agama Sengkang sudah sesuai atau belum.

#### **2. Kegunaan**

- a. Penelitian ini bertujuan sebagai salah satu syarat menjadi sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperluas wawasan pembaca dibidang ilmu pengetahuan khususnya dalam permasalahan hibah dan kewarisan di lingkungan Peradilan Agama.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran dalam bidang kewarisan di lingkungan Peradilan Agama.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### **A. Kewenangan Mengadili Badan Peradilan**

Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara masing-masing memiliki kewenangan mengadili secara absolut.

Kewenangan mengadili secara absolute dari masing-masing badan peradilan dapat disimak dari peraturan perundang-undangan mengenai kekuasaan kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus pada setiap badan peradilan tersebut. Pasal 25 UU Kekuasaan Kehakiman pada garis besarnya mengatur kewenangan dari setiap badan peradilan tersebut sebagai berikut :<sup>1</sup>

1. Peradilan Umum : Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peradilan Agama : Berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peradilan Militer : Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>1</sup>Sukarno Aburaera, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia* (Makasar:Arus Timur Makassar,2012), h. 23-24

4. Peradilan Tata Usaha Negara : Berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Peradilan Agama dapat disimak dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>2</sup>

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh :<sup>3</sup>

- a. Pengadilan Agama

- b. Pengadilan Tinggi Agama

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negera Tertinggi. Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam merupakan Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Agama, sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan

---

<sup>2</sup>Sukarno Aburaera, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, h. 26

<sup>3</sup>Sukarno Aburaera, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, h. 26-247



Agama dan merupakan Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Umum.

Perkara tertentu yang dimaksud dan menjadi kewenangan Peradilan Agama adalah Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah.

Pengadilan Negeri sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dalam lingkup badan peradilan umum mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam perkara pidana mencakup segala bentuk tindak pidana, kecuali tindak pidana militer yang merupakan kewenangan Peradilan Militer. Sedangkan dalam perkara perdata, Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara perdata secara umum, kecuali perkara perdata tertentu yang merupakan kewenangan Pengadilan agama.<sup>4</sup>

Kewenangan Pengadilan Negeri mengadili perkara perdata mencakup perkara perdata dalam bentuk gugatan dan perkara permohonan. Perkara perdata gugatan adalah perkara yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang disebut penggugat dan tergugat. Sedangkan perkara permohonan adalah perkara yang tidak mengandung sengketa dan hanya ada satu pihak yang disebut pemohon. Perkara yang

---

<sup>4</sup>Kewenangan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Stbl. 1937 Nomor 116. Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tersebut menentukan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

tidak mengandung sengketa disebut juga dengan perkara volunter, sedangkan perkara yang mengandung sengketa disebut perkara contensius.

Terkait kewenangan Pengadilan Negeri, dalam hukum acara perdata dikenal 2 macam kewenangan, ialah:<sup>5</sup>

- 1) Wewenang mutlak atau *absolute competentie*.
- 2) Wewenang relative atau *relative competentie*.

Wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan. Dilihat dari macam-macam pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dan dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmacht*. Misalnya persoalan mengenai perceraian, bagi mereka yang beragama Islam berdasarkan ketentuan Pasal 63 (1) a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah wewenang Pengadilan Agama. Demikian juga persoalan warisan bagi yang beragama Islam adalah wewenang Pengadilan Agama yang didasarkan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Sedangkan perkara perceraian dan kewarisan selain orang-orang yang beragama Islam adalah wewenang Pengadilan Negeri.

Lawan dari wewenang mutlak adalah wewenang relatif, wewenang relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa, tergantung tempat tinggal tergugat. Pasal 118 HIR menyangkut kekuasaan relatif yang dalam bahasa Belanda disebut *distributie van rechtsmacht*. Asasnya adalah “yang

---

<sup>5</sup>Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2009), h.11.

berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat”. Asas ini dalam Bahasa Latin dikenal dengan sebutan “*Actor Sequitur Forum Rei*”.<sup>6</sup>

## **B. Tinjauan Umum Hibah**

### **1. Pengertian Hibah**

Hibah menurut terminology syara’ adalah “pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap satu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi.” Atau kita katakan : “Pemberian hak milik secara sukarela ketika masih hidup dan yang ini lebih utama dan singkat.”<sup>7</sup>

Suatu catatan lain yang perlu diketahui ialah bahwa hibah itu mestilah dilakukan oleh pemilik harta (pemberi hibah) kepada pihak penerima di kala ia masih hidup. Jadi, transaksi hibah bersifat tunai dan langsung serta tidak boleh dilakukan atau disaratkan bahwa perpindahan itu berlaku setelah pemberi hibah meninggal dunia.<sup>8</sup>

Karena hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah. Dengan membuat perumpamaan, Rasulullah saw. mengatakan bahwa kalau pihak pemberi hibah menuntut kembali sesuatu yang telah dihibahkannya maka

---

<sup>6</sup>Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori Dan Praktek*, h. 12.

<sup>7</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)* (Jakarta : Amzah, 2010), h.435.

<sup>8</sup>Hemi Harim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.74.

perbuatannya itu sama seperti anjing yang menelan kembali sesuatu yang sudah ia muntahkan. Riwayat yang berasal dari Ibnu Abbas Tersebut berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِدُ فِي هَبَّةٍ كَأَنَّ لُكْلُبَ يَقِيئُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

[رواه ابن عباس]<sup>9</sup>

Artinya :

“Rasulullah SAW bersabda : Orang yang meminta kembali sesuatu yang sudah dihibahkannya hal itu adalah ibarat anjing yang menelan kembali sesuatu yang dia muntahkan”<sup>10</sup>

## 2. Syarat-syarat Hibah

Hibah dalam ensiklopedi Islam, para fukaha (ahli fikih) mendefinisikannya sebagai akad yang mengandung penyerahan hak milik seseorang kepada orang lain semasa hidupnya tanpa ganti rugi.

Disebutkan pula, meskipun hibah merupakan akad yang sifatnya untuk mempererat silaturahmi antara sesama manusia, namun sebagai tindakan hukum, hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, baik oleh yang memberikan maupun oleh yang menerima hibah. Akibatnya, jika salah satu rukun atau syarat hibah tidak terpenuhi, maka hibah tersebut menjadi tidak sah.

Ada beberapa rukun hibah yaitu <sup>11</sup>:

<sup>9</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, 2002 *Mutiara Hadist* (Jilid VII Jakarta: Bulan Bintang,1977), h.574.

<sup>10</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, 2002 *Mutiara Hadist* h.574.

<sup>11</sup>Syafiie Hassanbasri. 2001. *Ensiklopedia Islam, Hibah*. (Jakarta: Kompas. 2001 .

- a. Ada ijab dan kabul yang menunjukkan ada pemindahan hak milik seseorang (yang menghibahkan) kepada orang lain (yang menerima hibah).

Bentuk ijab bisa dengan kata-kata hibah itu sendiri, dengan kata-kata hadiah, atau dengan kata-kata lain yang mengandung arti pemberian. Terhadap kabul (penerimaan dari pemberian hibah), para ulama berbeda pendapat. Imam Malik dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa harus ada pernyataan menerima (kabul) dari orang yang menerima hadiah, karena kabul itu termasuk rukun.

Sedangkan bagi segolongan ulama mazhab Hanafi, kabul bukan termasuk rukun hibah. Dengan demikian, *sigat* (bentuk) hibah itu cukup dengan ijab (pernyataan pemberian) saja.

- b. Ada orang yang menghibahkan dan yang akan menerima hibah.

Untuk itu, disyaratkan bahwa yang diserahkan itu benar-benar milik penghibah secara sempurna dan penghibah harus orang yang cakap untuk bertindak menurut hukum. Oleh karena itu, harta orang lain tidak boleh dihibahkan. Demikian pula hibah orang gila atau anak kecil. Syarat lain yang penting bagi penghibah adalah bahwa tindakan hukum itu dilakukan atas kesadaran sendiri, bukan karena ada paksaan dari pihak luar.

- c. Ada harta yang akan dihibahkan, dengan syarat harta itu milik penghibah secara sempurna (tidak bercampur dengan milik orang lain) dan merupakan harta yang bermanfaat serta diakui agama.

Dengan demikian, jika harta yang akan dihibahkan tidak ada, harta tersebut masih dalam khayalan atau harta yang dihibahkan itu adalah benda-benda yang materinya diharamkan agama, maka hibah tersebut tidak sah.

Syarat-syarat hibah agar perjanjian hibah sah dan dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut <sup>12</sup>:

1) Syarat-syarat bagi penghibah

- a) Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah; dengan demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain.
- b) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan.
- c) Penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum (dewasa dan tidak kurang akal).
- d) Penghibah tidak dipaksa untuk memberikan hibah.

2) Syarat-syarat bagi penerima hibah

Bahwa penerima hibah haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang dimaksudkan dengan benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah lahir, tidak dipersoalkan apakah dia anak-anak, kurang akal, dewasa.

Dalam hal ini berarti setiap orang dapat menerima hibah, walau bagaimana pun kondisi fisik dan keadaan mentalnya. Dengan demikian memberi hibah kepada bayi yang masih ada dalam kandungan adalah tidak sah.

---

<sup>12</sup>Suharwadi Chairiumam Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), h. 35.

### 3) Syarat-syarat bagi benda yang dihibahkan

- a) Benda tersebut benar-benar ada;
- b) Benda tersebut mempunyai nilai;
- c) Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya dan pemilikannya dapat dialihkan;
- d) Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah.

Hibah terjemahan pemberian, yaitu pemberian seseorang kepada keluarganya, teman sejawatnya atau kepada orang-orang yang memerlukan dari hartanya semasa hidupnya.

Pemberian yang dimaksud di atas, tentunya pemberian menurut yang dikehendaki oleh agama Islam. Sebab seseorang bisa saja memberikan seluruh harta bendanya terhadap siapa saja yang dikehendaki. Pemberian yang semacam ini jelas akan mendatangkan *mudharat*, yakni *mudharat* kepada ahli warisnya, oleh karena itu Rasulullah saw. melarang berwasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan wasiat pada hakekatnya sama saja dengan hibah, keduanya bisa mendatangkan kerugian kepada ahli warisnya. Di dalam QS Al-Nisa/4: 5 dinyatakan :

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دِينَ ع وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ

كَأَنُورَ أَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ  
وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Terjemahnya :

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua-jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak member mudharat (kepada ahli waris).<sup>13</sup>

Penarikan hibah terhadap harta yang telah dihibahkan tidak mungkin untuk dilakukan, kecuali hibah yang dilakukan orang tua kepada anaknya (Pasal 212)

Dasar pemberian hibah terdapat pada Firman Allah swt dalam QS Al-Baqarah

/2: 272

﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ ﴿٢٧٢﴾

<sup>13</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : PT.Sinergi Pustaka Indonesia,2014), h.102.



Terjemahnya :

Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan).<sup>14</sup>

### 3. Proses Terjadinya dan Hapusnya Hibah

Pada dasarnya setiap orang dapat menghibahkan (barang milik) sebagai penghibah kepada siapa yang dikehendaki ketika penghibah dalam keadaan sehat walafiat. Hibah dilakukan oleh penghibah tanpa pertukaran apapun dari penerima hibah. Hibah dilakukan secara sukarela demi kepentingan seseorang atau demi kemaslahatan umat.<sup>15</sup>

Si pemberi hibah yang telah berkehendak secara sukarela menghibahkan barang milik kepada penerima hibah kemudian melaksanakan proses dalam tata cara dalam Hukum Islam maupun KUHPerdara untuk mensahkan proses hibah tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 1688 KUHPerdara pada dasarnya sesuatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan, kecuali<sup>16</sup>:

- a. Tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana hibah dilakukan;

---

<sup>14</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.57.

<sup>15</sup>Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta:PT.Rineka Cipta,1991), h.103.

<sup>16</sup>Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistem Hukum* (Bandung:PT Pionir Java Bandung,2000), h. 56.

- b. Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah;
- c. Apabila si penerima menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelahnya si penghibah jatuh dalam kemiskinan;

Apabila penuntutan kembali dilakukan oleh si pemberi hibah dan dikabulkan maka semua perbuatan si penerima hibah dianggap batal (Pasal 1690 KUHPerdara).

Menurut Muh. Idris Ramulyo<sup>17</sup> bahwa :

Tuntutan hukum tidak dapat dilakukan ahli waris si penghibah, kecuali apabila si penghibah semula telah diajukan tuntutan, ataupun orang ini telah meninggal dunia di dalam 1 (satu) tahun setelah peristiwa yang dituduhkan.

Peralihan hak melalui hibah ditandai dengan dihasilkannya suatu akta hibah. Akta hibah biasanya dibuat oleh notaris atau para pejabat yang berwenang dengan melampirkan syarat-syarat dalam pengurusannya. Syarat-syarat pengurusan peralihan hak karena hibah (orangtua ke anak) sebagian sama walaupun syarat-syarat peralihan hak karena hibah (umum) ada syarat yang dikurangi.

Syarat-syarat pengurusan peralihan hak karena hibah (orangtua ke anak) yaitu :<sup>18</sup>

- 1) Sertifikat
- 2) Salinan Akta sebelumnya
- 3) SPPT PBB & STTS PBB ( 5 (lima) tahun terakhir)

---

<sup>17</sup>Muh. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 59 - 60.

<sup>18</sup>(<http://www.notarisrudi.com/?m=layanan>)

- 4) KTP Suami/istri (pemberi hibah)
- 5) Surat Hibah (pemberi hibah)
- 6) Kartu Keluarga (pemberi hibah)
- 7) Akta kelahiran (penerima hibah)
- 8) KTP (penerima hibah)
- 9) Surat pernyataan (penerima hibah)
- 10) Bukti bayar BPHTB 50 % ( NJOP - Tidak kena pajak) x 5 %)

Syarat-syarat peralihan hak karena hibah (umum):

- 1) Sertifikat
- 2) Salinan Akta sebelumnya
- 3) SPPT & STTS PBB ( 5 (lima) tahun terakhir)
- 4) KTP suami/istri (pemberi hibah)
- 5) Pernyataan belum kawin (pemberi hibah)
- 6) Surat pernyataan
- 7) Bukti setor BPHTB

#### 4. Penarikan Hibah

Penarikan hibah merupakan perbuatan yang diharamkan meskipun hibah itu terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami isteri.

Adapun hibah yang boleh ditarik hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Suatu penghibahan tidak dapat ditarik dan

karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut (KUH Perdata, Bagian Empat, Pencabutan dan Pembatalan Hibah):

- a) Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah. Dalam hal yang ini barang yang dihibahkan tetap tinggal pada penghibah, atau ia boleh meminta kembali barang itu, bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan atas barang itu oleh penerima hibah serta hasil dan buah yang telah dinikmati oleh penerima hibah sejak ia alpa dalam memenuhi syarat-syarat penghibahan itu. Dalam hal demikian penghibah boleh menjalankan hak-haknya terhadap pihak ketiga yang memegang barang tak bergerak yang telah dihibahkan sebagaimana terhadap penerima hibah sendiri.
- b) Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah.

Dalam hal ini barang yang telah dihibahkan tidak boleh diganggu gugat jika barang itu hendak atau telah dipindahtangankan, dihipotekkan atau dibebani dengan hak kebendaan lain oleh penerima hibah, kecuali kalau gugatan untuk membatalkan penghibahan itu sudah diajukan kepada dan didaftarkan di Pengadilan dan dimasukkan dalam 25 pengumuman tersebut dalam Pasal 616 KUHPerdata. Semua pemindahtanganan, penghipotekan atau pembebanan lain yang dilakukan oleh penerima hibah sesudah pendaftaran tersebut adalah batal, bila gugatan itu kemudian dimenangkan.

- c) Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Dalam hal ini barang yang telah diserahkan kepada penghibah akan tetapi penerima hibah tidak memberikan nafkah, sehingga hibah yang telah diberikan dapat dicabut atau ditarik kembali karena tidak dilakukannya pemberian nafkah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 212 KHI yang mengatakan “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”

Sama halnya KUHPdata dengan KHI yang mengemukakan hanya hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya yang dapat ditarik kembali, dalam KHI tidak lagi dijelaskan lebih lanjut mengenai penarikan hibah.

### ***C. Tinjauan Umum Jual Beli Tanah***

#### **1. Pengertian Jual Beli**

Secara etimologis jual beli (*al-buyu' jama* dari *al-bai'*) merupakan *mashdar*, padahal *mashdar* tidak dapat dijamakkan. Tapi kata ini tetap dijamakkan karena jenisnya yang berbeda-beda. Maknanya secara etimologis ialah mengambil sesuatu dan menerima sesuatu. Secara etimologis, *al-bai'* juga berarti satu depa, entah dimaksudkan untuk tepukan atau untuk ikatan harga dan barang yang dihargai menurut persetujuannya.<sup>19</sup>

Menurut Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, jual beli secara etimologis adalah tukar-menukar sesuatu, yang terkandung di dalamnya penjual dan pembeli.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta :Sinar Grafika, 2013), h.82.

<sup>20</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Beirut : Dar al-fikr,tth), Juz V.h.2.

Adapun menurut terminologis, jual beli adalah tukar-menukar harta yang dimaksudkan untuk suatu kepemilikan, yang ditunjukkan dengan perkataan dan perbuatan. Menurut Syekh bdurrah,am as-Sa'di, jual beli adalah tukar menunkar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Menurut sebagian ulama memberi pengertian tukar-menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah diatur mengenai jual-beli yaitu pada Bab ke V. Pada pasal 1457 dinyatakan bahwa “*Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan*”<sup>21</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli menurut Prof. Dr. Hendi Suhendi, ada 3 yaitu akad (ijab kabul), orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma'kud alaih* (objek akad).<sup>22</sup>

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridaan). Pada dasarnya, ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi tidak mungkin, misalnya bisu atau lainnya, boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung ijab kabul.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka,2015), h. 366.

<sup>22</sup>Mardani ,*Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, h.87.

<sup>23</sup>Hendi Suhendo, *Fiqh Muamalah* (Jakarta :Rajawali Press, 2014).h.70.

Dalil yang mendukung tentang jual beli harus suka sama suka adalah firman Allah dalam QS. Al-Nisa/ 4: 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.<sup>24</sup>

Rukun jual beli kedua ialah dua atau beberapa orang yang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah :

- a. Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, oleh karena itu anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya, Allah Berfirman dalam QS. Al-Nisa/4: 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّرْغُوفًا ﴿٥﴾

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh.<sup>25</sup>

- b. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda tertentu, seperti seorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam,

<sup>24</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 107.

<sup>25</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 100.

sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang

kafir untuk merendahkan mukmin, Allah berfirman dalam QS. Al-Nisa :141

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

Terjemahnya :

Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin<sup>26</sup>

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.<sup>27</sup>

Rukun jual beli yang ketiga ialah benda-benda atau barang yang diperjualbelikan (*ma'kud 'alaih*). Syarat-syarat benda yang menjadi obyek adad ialah<sup>28</sup>

- a. Suci atau mungkin untuk disucikan
- b. Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara', seperti menjual babi, kala, cecak dan yang lainnya.
- c. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti; jika ayahku pergi kujual motor ini kepadamu
- d. Tidak dibatasi waktunya

<sup>26</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.132

<sup>27</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, pasal 58.

<sup>28</sup>Hendi Suhendo, *Fiqh Muamalah*, h.72.



- e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, maka tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut, sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan yang sama.
- f. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain
- g. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukuran yang lainnya.

Apabila sebuah objek dari jual beli merupakan sebidang tanah maka secara yuridis syarat dan prosedur jual beli tanah yang sudah terdaftar (bersertipikat) dimulai dengan datang menghadapnya para pihak baik penjual maupun pembeli ke hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan menyatakan maksudnya untuk mengadakan jual beli tanah.<sup>29</sup>

Pejabat Pembuat Akta Tanah harus dengan teliti memastikan bahwa :

- a. Penjual adalah orang yang berhak atas tanah yang akan dijualnya. Dalam hal ini tentunya ia sebagai pemegang yang sah dari hak atas tanah tersebut yang disebut pemilik.
- b. Dalam hal penjual sudah berkeluarga dan ada persekutuan harta, maka suami istri harus hadir dan bertindak sebagai penjual; seandainya suami atau istri tidak dapat hadir, maka harus dibuat surat bukti secara tertulis dan sah yang menyatakan bahwa suami atau istri menyetujui penjualan tanah tersebut.

---

<sup>29</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*. Pasal 37 dan Pasal 38

Dalam hal penjual berada di bawah perwalian atau pengampuan maka yang bertindak sebagai penjual adalah wali atau pengampunya.

- c. Bila jual beli tersebut menggunakan kuasa menjual, maka Pejabat Pembuat Akta Tanah harus memastikan bahwa orang yang hadir di hadapannya adalah memang benar kuasa si penjual dan berwenang untuk melakukan seluruh prestasi dan menerima seluruh kontra prestasi dalam jual beli tanah tersebut.
- d. Pembeli adalah orang yang berhak untuk mempunyai hak atas tanah yang dibelinya. Hal ini tergantung pada subyek hukum dan obyek hukumnya. Subyek hukum adalah status hukum orang yang akan membelinya, sedangkan obyek hukum adalah hak apa yang ada pada tanahnya. Misalnya, menurut Undang-Undang Pokok Agraria, yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah Warga Negara Indonesia tunggal dan badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah.<sup>30</sup>
- e. Tanah yang menjadi obyek jual beli adalah tanah yang boleh diperjualbelikan atau tidak dalam sengketa. Adapun jenis hak atas tanah yang dapat diperjualbelikan adalah tanah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.

Selanjutnya Pejabat Pembuat Akta Tanah meminta sertipikat hak atas tanah yang akan dijualbelikan, bukti identitas dan berkas kelengkapan lainnya dari para pihak. Bila jual beli tersebut menggunakan kuasa menjual yang dibuat dalam bentuk

---

<sup>30</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, Pasal 21.

di bawah tangan, serta belum diberi tanggal serta belum ditandatangani, maka surat kuasa itu kemudian dilegalisasi oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah bersangkutan selaku notaris dan aslinya dilekatkan pada akta jual beli bersangkutan.

Pengertian legalisasi adalah pengesahan surat yang dibuat dibawah tangan di mana semua pihak yang membuat surat tersebut datang di hadapan notaris dan selanjutnya notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat tersebut diberi tanggal dan ditandatangani oleh para pihak dan akhirnya baru dilegalisasi oleh notaris.<sup>31</sup>

Selanjutnya, Pejabat Pembuat Akta Tanah melakukan pengecekan sertipikat ke Kantor Pertanahan setempat untuk memastikan bahwa sertipikat tersebut bebas dari sitaan, tidak sedang dalam sengketa dan tidak sedang menjadi tanggungan atas suatu utang.

Bila setelah dilakukan pengecekan ternyata sertipikat tersebut,bersih', selanjutnya dilakukan pembuatan akta jual beli. Pembuatan akta tersebut dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu. Sebelum membuat Akta Jual Beli maka Pejabat Pembuat Akta Tanah akan memastikan bahwa pihak penjual sudah membayar pajak yang dibebankan kepada penjual termasuk Pajak Bumi dan Bangunan tahun berjalan dan pembeli sudah membayar pajak yang dibebankan kepada pembeli sesuai dengan Pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menjelaskan bahwa

---

<sup>31</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h.597.

“Pembuatan akta dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu.”<sup>32</sup>

Dalam pembuatan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah maka akta dibuat dengan mengisi blangko akta yang tersedia secara lengkap dan pengisian blangko akta jual beli tersebut sesuai dengan keadaan, status dan data yang benar serta didukung oleh dokumen dokumen yang sepengetahuan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah benar. Akta jual beli terdiri dari dua lembar akta asli, lembar pertama disimpan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan lembar kedua diserahkan kepada Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran peralihan hak tersebut.<sup>33</sup>

Secara keseluruhan akta jual beli memuat keterangan mengenai :

1. Para pihak yaitu Penjual, Pembeli dan saksi-saksi.
2. Keterangan bahwa mereka telah melakukan jual beli.
3. Keterangan mengenai obyek jual beli yaitu status tanah, luasnya, letaknya, batas - batasnya beserta turutan yang mengikuti tanah tersebut.
4. Harga jual beli dan keterangan tentang penerimaan uangnya oleh pihak Penjual.

---

<sup>32</sup>Republik Indonesia , *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*, Pasal 38 Ayat (1).

<sup>33</sup>Caroline Gunawan, “Peranan PPAT dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Hak Milik”, *Tesis* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), h. 81.

5. Syarat-syarat mengenai jual beli yang dituangkan dalam pasal-pasal dalam akta jual beli tersebut.<sup>34</sup>

Setelah akta jual beli diisi dan selesai dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah maka selanjutnya dengan dihadiri oleh Penjual, Pembeli dan 2 (dua) orang saksi, Pejabat Pembuat Akta Tanah membacakan isi akta kepada para pihak serta saksi-saksi dan memberi penjelasan mengenai isi dan maksud dari pembuatan akta jual beli serta prosedur pendaftaran yang harus dilaksanakan. Pada saat akta dibacakan, para pihak dapat mengajukan pertanyaan pertanyaan tentang hal-hal yang tidak dimengerti.<sup>35</sup>

Setelah akta selesai dibacakan dan dijelaskan serta tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap isi akta tersebut, maka dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Penjual dan Pembeli menandatangani akta jual beli dan dengan disaksikan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah harga tanah dapat dilunasi sesuai dengan harga yang tersebut dalam akta jual beli. Apabila harga tanah telah dibayar terlebih dahulu sebelumnya, maka para pihak harus memperlihatkan kwitansi pembayaran tersebut kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah.<sup>36</sup>

Sesuai dengan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu :

---

<sup>34</sup>Caroline Gunawan, "Peranan PPAT dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Hak Milik", *Tesis* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), h. 81.

<sup>35</sup>Caroline Gunawan, "Peranan PPAT dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Hak Milik", *Tesis* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), h. 81.

<sup>36</sup>Caroline Gunawan, "Peranan PPAT dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Hak Milik", *Tesis* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), h. 81.

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.<sup>37</sup>

Setelah beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli ialah ketika dilakukan jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk di buatkan Akta Jual Beli.

Prosedur Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah untuk tanah yang sudah besertifikat dengan syarat :

Dari pihak penjual:

- 1) Sertifikat asli hak atas tanah yang akan dijual
- 2) Bukti identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- 3) Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 4) Surat pernyataan persetujuan menjual istri atau suami bagi yang telah berkeluarga
- 5) Kartu Keluarga (KK).

Dari pihak pembeli:

- 1) Bukti identitas berupa KTP
- 2) Kartu Keluarga (KK);
- 3) Uang tunai untuk pembayaran di hadapan PPAT atau bentuk pembayaran lain yang telah disepakati penjual dan pembeli, seperti cek dan bilyet giro.

---

<sup>37</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah*, , Pasal 40 Ayat (1).

Prosedur Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah untuk tanah yang tidak besertifikat dengan syarat :

- 1) Surat permohonan konversi.
- 2) Foto copy KTP penjual dan pembeli.
- 3) Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- 4) Surat pernyataan persetujuan menjual dari istri atau suami bagi yang telah berkeluarga;
- 5) Surat pernyataan calon penerima hak (pembeli).
- 6) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari KPT.
- 7) Surat tanda bukti hak atas tanah dari kepala desa.
- 8) Surat tanda bukti biaya pendaftaran.<sup>38</sup>

Penjelasan jual beli dalam hukum Islam maupun hukum positif di atas, sudah dipaparkan beberapa pengertian syarat dalam jual beli, maka dari itu apabila dalam kenyataannya tidak sesuai dengan penjelasan di atas, sudah pasti terjadinya sengketa tanah atau jual beli tanah yang bersengketa, dalam hal ini juga hukum Islam dan hukum positif memberikan jalan keluar dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut.

#### **D. Tinjauan Umum Kewarisan**

1. Pengertian Hukum Kewarisan

---

<sup>38</sup>Samun Ismaya, *Pengantar Hukum Agraria*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet. I, 2011), h. 81-82.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>39</sup>

Mewaris secara tidak langsung atau mewaris karena penggantian (plaatsvervulling) pada dasarnya menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dulu meninggal dari pewaris diatur dalam KUHPerdara, ahli waris pengganti menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak, artinya, segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berkenaan dengan warisan beralih kepadanya.<sup>40</sup>

## 2. Dasar Hukum Kewarisan

Dasar dan sumber utama dari Peradilan Agama sbagai lembaga negara yang berwenang menyelesaikan masalah antar sesama orang islam, sebagai hukum agama adalah nas} atau teks yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi, hal hal yang secara langsung mengatur kewarisan adalah sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿١﴾

Terjemahnya :

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap

<sup>39</sup>Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Inpres nomor 1 tahun 1991* tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171.

<sup>40</sup>R.Soebakti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta, Balai Pustaka), h. 224.



(kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.<sup>41</sup>

Adapun dasar hukum waris dalam KUH Perdata terdapat pada Pasal 830 sampai dengan Pasal 1002 KUH Perdata yang intinya Bagian I Tentang Ketentuan Umum (diatur Pasal 830 s/d pasal 851): yang intinya, mengatur tentang Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli waris (Pasal 833 KUH Perdata), yang berbunyi Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.

### 3. Rukun Waris

Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam rukun waris adalah:

- a. Pewaris, adalah orang yang pada saat meninggal dunia atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- b. Ahli waris, adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- c. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya perawatan jenazah (tahjiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.<sup>42</sup>

<sup>41</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.79.

<sup>42</sup>Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171 huruf (b), (c), dan (e).

#### 4. Syarat-syarat Kewarisan

Ada tiga syarat kewarisan, yaitu (a) meninggal dunianya pewaris, (b) hidupnya ahli waris, dan (c) mengetahui status kewarisan.

##### a. Meninggal dunianya pewaris

Yang dimaksud meninggal dunia disini adalah baik meninggal dunia hakiki (sejati), meninggal dunia hukmi (menurut putusan hakim) dan meninggal dunia taqdiri (menurut dugaan). Tanpa ada kepastian bahwa ahli waris meninggal dunia, warisan tidak boleh dibagi-bagikan kepada ahli waris.

##### b. Hidup ahli waris

Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Perpindahan harta tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan. Oleh karena itu, sesudah pewaris meninggal dunia, ahli warisnya harus benar-benar hidup.

##### c. Mengetahui status kewarisan

Agar seseorang dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan suami-istri, hubungan orang tua-anak dan hubungan saudara, baik sekandung seapak maupun seibu.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>Wati Rahmi Ria, *Aspek Yuridis Tentang Hukum Waris Islam* (Lampung: Universitas Lampung, 2008), h. 40.

## 5. Sebab-sebab Mendapatkan Waris

Apabila dianalisis ketentuan hukum waris Islam, yang menjadi sebab seseorang itu mendapatkan warisan dari si mayat (ahli waris) dapat diklarifikasikan sebagai berikut :<sup>44</sup>

### a. Karena Hubungan Perkawinan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayat dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klarifikasi ini adalah : suami atau istri dari si mayat.

### b. Karena adanya hubungan darah

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah/kekeluargaan dengan si mayat, yang termasuk dalam klarifikasi ini seperti : ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara dan lain-lain.

### c. Karena memerdekakan si mayat

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) dari si mayat disebabkan seseorang itu memerdekakan si mayat dari perbudakan, dalam hal ini dapat saja seorang laki-laki atau seorang perempuan.

---

<sup>44</sup>Suhrawadi K.Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 52.

d. Karena sesama Islam

Seseorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak ada meninggalkan ahli waris sama sekali (punah), maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Maal, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam sebab-sebab mendapatkan waris adalah:<sup>45</sup>

1) Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

6. Penghalang Kewarisan

Penghalang mewarisi, yaitu perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama.<sup>46</sup>

Penghalang-penghalang kewarisan tersebut adalah:

a. Perbudakan

---

<sup>45</sup> Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 174.

<sup>46</sup>Fatchur Rahman, *Hukum Waris*, h. 82.

Seorang budak tidak dapat diwarisi karena ia tidak cakap berbuat. Seorang budak tidak dapat diwarisi, jika ia meninggal dunia, sebab ia orang miskin yang tidak memiliki kekayaan sama sekali.

#### b. Pembunuhan

Pembunuhan menjadi penghalang kewarisan karena seseorang yang menyebabkan kematian seseorang tidak dapat mewarisi harta orang yang meninggal.

Menurut ulama Syafi'iyah semua jenis pembunuhan menghalangi kewarisan secara mutlak, baik itu pembunuhan khata', pembunuhan 'amd, atau syibh al-'amd, maupun pembunuhan yang mempunyai hak seperti eksekutor dan saksi.<sup>47</sup> Ulama Hanafiyyah dan Hanabilah berpendapat semua jenis pembunuhan yang mewajibkan hukum qisas, diyah atau kafarah menjadi penghalang kewarisan. Ulama Malikiyyah berpendapat pembunuhan yang menghalangi kewarisan adalah pembunuhan sengaja, sedangkan pembunuhan khata' tidak menghalangi kewarisan.<sup>48</sup>

#### c. Perbedaan Agama

Perbedaan agama berarti agama pewaris berbeda dengan agama ahli waris. Misalnya, pewaris beragama Islam, sedangkan ahli warisnya beragama Kristen. Demikian juga sebaliknya, hal ini didasarkan pada Hadis Rasulullah yang artinya:

“Orang Islam tidak dapat mewaris harta orang kafir, dan orang kafir pun tidak dapat mewaris harta orang-orang Islam”. (Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim)

---

<sup>47</sup>Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Juz III, h. 1005.

<sup>48</sup>Ahmad 'Abd al-Jawad, Usul 'Ilm al-Mawaris, (Beirut: Dar al-Jil, 1986), h.4.

Kompilasi Hukum Islam juga diatur hal-hal yang menjadi penghalang seseorang mendapatkan hak warisnya, hal-hal tersebut adalah:

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Kedua hal ini dianggap sebagai penghalang mendapatkan waris jika telah mempunyai hukum tetap dengan putusan hakim.<sup>49</sup>

#### **E. Kumulasi Perkara**

##### **1. Pengertian Kumulasi**

Kumulasi gugatan adalah penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan.<sup>50</sup> Sedangkan menurut Mukti Arto, kumulasi adalah gabungan beberapa gugatan hak atau gabungan beberapa pihak yang mempunyai akibat hukum yang sama dalam satu proses perkara.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup>Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Inpres nomor 1 tahun 1991* tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 173.

<sup>50</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 102.

<sup>51</sup>A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 44.

## 2. Syarat Kumulasi<sup>52</sup>

- a. Adanya hubungan yang erat dari perkara yang satu dengan yang lainnya atau koneksitas;
- b. Subyek hukum para pihak sama (penggugat dan tergugat);
- c. Prinsip beracara yang cepat dan murah;
- d. Bermanfaat ditinjau dari segi acara (processueel doelmatig).

Buku Pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Agama mencantumkan tentang kumulasi gugatan:<sup>53</sup>

- a. Penggabungan dapat berupa kumulasi subjektif atau kumulasi objektif. Kumulasi subjektif adalah penggabungan beberapa penggugat atau tergugat dalam satu gugatan. Kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan.
- b. Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu, apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan yang saling berbeda/bertentangan.

---

<sup>52</sup>R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi* (Bandung: Bandar Maju, 2005), h.101.

<sup>53</sup>Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Edisi Revisi 2010), h.76-77.

- c. Beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas dan hubungan erat ini harus dibuktikan dengan fakta-faktanya.
- d. Dalam hal suatu tuntutan tertentu diperlukan suatu acara khusus (misalnya gugatan cerai) sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa (gugatan untuk memenuhi perjanjian), maka kedua tuntutan itu tidak dapat dikumulasikan dalam satu gugatan.
- e. Apabila ada salah satu tuntutan hakim tidak berwenang memeriksa sedangkan tuntutan lainnya hakim tidak berwenang, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan.

### 3. Tujuan Kumulasi Gugatan<sup>54</sup>

#### a. Mewujudkan peradilan sederhana

Melalui sistem penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan, dapat dilaksanakan penyelesaian beberapa perkara melalui proses tunggal, dan dipertimbangan serta diputuskan dalam satu putusan.

#### b. Menghindari putusan yang saling bertentangan

Apabila terdapat koneksitas antara beberapa gugatan, cara yang efektif untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan, dengan jalan menempuh sistem kumulasi atau penggabungan gugatan.

### 4. Bentuk Kumulasi Gugatan

Penggabungan gugatan dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu:

---

<sup>54</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h.104.



a. Perbarengan (Concursus, Samenloop, Cdincidence)

Penggabungan ini dapat terjadi apabila seorang penggugat mempunyai beberapa tuntutan yang menuju pada suatu akibat hukum saja. Apabila satu tuntutan sudah terpenuhi, maka tuntutan yang lain dengan sendirinya terpenuhi pula. Misalnya dalam perkara wali adal, dispensasi kawin, dan izin kawin digabung dalam satu gugatan karena ketiga perkara tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat satu sama lainnya dan mempunyai tujuan yang sama yaitu terlaksananya akad perkawinan sebagaimana yang diminta oleh pemohon. Jika izin kawin dikabulkan oleh hakim, maka dengan sendirinya dispensasi kawin dan penetapan wali adal terselesaikan pula. Penggabungan perkara seperti ini akan menghemat waktu, tenaga, dan lebih praktis karena ketiga perkara yang tujuannya sama dapat diselesaikan sekaligus.<sup>55</sup>

b. Penggabungan Subjektif (Subjective Cumulation)

Penggabungan subjektif dapat terjadi apabila terdapat beberapa orang penggugat melawan seorang tergugat, atau seorang penggugat melawan beberapa orang tergugat, atau beberapa orang penggugat melawan beberapa orang tergugat dalam satu gugatan.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), h.41-42.

<sup>56</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), h.72.

### c. Penggabungan Objektif (Objective Cumulation)

Apabila penggugat mengajukan lebih dari satu objek gugatan dalam satu perkara sekaligus. Ini merupakan penggabungan dari tuntutan disebut kumulasi objektif.<sup>57</sup> Contoh penggabungan gugatan cerai dengan harta bersama.

### d. Intervensi

Intervensi yaitu suatu aksi hukum oleh pihak yang berkepentingan dengan jalan melibatkan diri atau dilibatkan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung antara dua pihak yang sedang berperkara.<sup>58</sup>

Ada tiga macam bentuk intervensi:

#### 1) Menyertai (Voeging)

Pihak ketiga mencampuri sengketa yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat dengan bersikap memihak kepada salah satu pihak dan dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukumnya sendiri dengan jalan membela salah satu pihak yang bersengketa. Disyaratkan adanya kepentingan hukum pada pihak ketiga yang mencampuri sengketa, yang ada hubungannya dengan pokok sengketa antara penggugat dan tergugat (pasal 279 Rv).<sup>59</sup>

#### 2) Menengahi (Tussenkomst)

Tussenkomst ialah masuknya pihak ketiga sebagai pihak yang berkepentingan ke dalam perkara perdata yang sedang berlangsung untuk membela kepentingan

---

<sup>57</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1998), h.57.

<sup>58</sup>A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, h.109.

<sup>59</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h.59.

sendiri dan oleh karena itu ia melawan kepentingan kedua belah pihak, (yaitu penggugat dan tergugat) yang sedang berperkara.<sup>60</sup>

### 3) Ditarik sebagai penjamin (Vrijwaring)

Vrijwaring yaitu suatu aksi hukum yang dilakukan oleh tergugat untuk menarik pihak ketiga ke dalam perkara guna menjamin kepentingan tergugat dalam menghadapi gugatan penggugat.<sup>61</sup>

### 5. Perkara yang bisa dikumulasikan

Dalam pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) dijelaskan bahwa perkara penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan cerai ataupun permohonan cerai talak. Jadi, dalam kedua pasal ini terlihat bahwa saat pengajuan perkara gugat cerai ataupun permohonan cerai talak dapat digabung dengan perkara penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri. Abdul Manan dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam perkara wali adal, dispensasi kawin dan izin kawin dapat digabungkan dalam satu gugatan.

### 6. Beberapa Penggabungan Yang Tidak Dibenarkan

Terdapat beberapa penggabungan yang dilarang oleh hukum, larangan tersebut bersumber dari hasil pengamatan praktik peradilan. Antara lain:<sup>62</sup>

#### a. Pemilik objek gugatan berbeda

---

<sup>60</sup>A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, h. 110.

<sup>61</sup>A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, h. 114.

<sup>62</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 108-109.

Penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa objek, dan masing-masing objek gugatan, dimiliki oleh orang yang berbeda atau berlainan. Penggabungan yang demikian baik secara subjektif dan objektif, tidak dibenarkan. Hal ini dikemukakan dalam putusan MA No. 201 K/Sip/1974.

b. Gugatan yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang berbeda

Penggabungan gugatan bertitik tolak pada prinsip, perkara yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang sama. Tidak dibenarkan menggabungkan beberapa gugatan yang tunduk kepada hukum acara yang berbeda. Penerapan yang demikian ditegaskan dalam putusan MA No. 667 K/Sip 1972.

c. Gugatan tunduk pada kompetensi absolut yang berbeda

Jika terdiri dari beberapa gugatan yang masing-masing tunduk kepada kewenangan absolut yang berbeda, penggabungan tidak dapat dibenarkan. Yang paling mungkin terjadi dalam kasus yang seperti itu adalah gugatan perdata TUN dengan gugatan perdata hak milik atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Bertitik tolak pada ketentuan pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999) sekarang diatur dalam pasal 2 jo. pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1986 (tentang Peradilan TUN), gugatan perdata TUN secara absolut menjadi kewenangan Peradilan TUN sedangkan sengketa hak milik dan PMH menjadi yuridiksi absolut Peradilan Umum (PN).

Berdasarkan pembagian fungsi dan kewenangan absolut tersebut, tidak dibenarkan melakukan penggabungan gugatan yang berbeda yuridiksi mengadilinya.

d. Gugatan rekonvensi tidak ada hubungan dengan gugatan konvensi

Sesuai dengan ketentuan pasal 132 a ayat (1) HIR, tergugat berhak mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga terjadi penggabungan antara konvensi dan rekonvensi. Akan tetapi kebolehan yang seperti itu, tetap berpatokan pada syarat, terdapat hubungan erat antara keduanya.

**F. Pihak-pihak dalam Perkara**

1. Pihak dalam perkara voluntair

Dalam perkara voluntair hanya ada pihak pemohon saja. Mungkin ada pemohon I, II dan seterusnya. Karena tidak ada sengketa.

2. Pihak dalam perkara kontesius

Dalam perkara kontesius terdapat dua pihak atau lebih yang bersengketa. Pihak yang mengajukan gugatan disebut penggugat, sedangkan pihak yang digugat disebut Tergugat. Apabila penggugat dan tergugat lebih dari satu orang maka disebut Penggugat I, Penggugat II dan seterusnya. Demikian juga tergugat I, Tergugat II dan seterusnya. Kadang-kadang ada pula pihak-pihak yang turut tergugat yaitu pihak yang tidak digugat langsung namun ada kemungkinan mempunyai hak dalam obyek yang dipersengketakan, tetapi ia tidak mau turut menggugat.

Dalam gugatan harta waris atau hibah, pihak yang menguasai obyek sengketa disebut Tergugat, sedangkan pihak yang tidak menguasai obyek sengketa tetapi mempunyai hak dalam obyek sengketa dan tidak mau menjadi Penggugat maka ia menjadi pihak “Turut Tergugat”. Karena semua orang yang diperkirakan mempunyai hak pada obyek sengketa harus menjadi pihak dalam perkara.

Di samping itu, ada perkara permohonan yang di dalamnya mengandung sengketa maka pihak yang mengajukan disebut Pemohon dan pihak lawan disebut Termohon. Dalam perkara permohonan ijin ikrar talak, maka suami disebut Pemohon dan isteri disebut Termohon.<sup>63</sup>

### **G. Putusan Hakim**

#### **1. Definisi Putusan**

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai Pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>64</sup>

Setelah hakim mengetahui duduk perkaranya yang sebenar-benarnya, maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai. Kemudian dijatuhkan putusan.

#### **2. Macam-macam putusan**

Putusan Pengadilan dibedakan atas 2 (dua) macam (Pasal 185 ayat (1) HIR/Pasal 196 ayat (1) RBg), yaitu putusan sela (tussenvonniss) dan putusan akhir (eindvonniss) :<sup>65</sup>

##### **a. Putusan Sela**

Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan

---

<sup>63</sup>Mukti Arto, *Prakek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, h.41.

<sup>64</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h.175.

<sup>65</sup>Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata* (Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, 2009), h.131.

pemeriksaan perkara. Misalnya, putusan sela Pengadilan Negeri terhadap eksepsi mengenai tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara.

Dalam Pasal 190 ayat (1) HIR/Pasal 201 ayat (1) RBg menentukan bahwa :  
 “Putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama permintaan banding terhadap putusan akhir.”

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal beberapa putusan sela, yaitu preparatoir, interlocutoir, incidentieel, dan provisioneel.

- 1) Putusan preparatoir adalah putusan persidangan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir. Misalnya, putusan untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi.
- 2) Putusan interlocutoir adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian. Misalnya putusan untuk memeriksa saksi atau pemeriksaan setempat.

Karena putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka putusan interlocutoir akan mempengaruhi putusan akhir .

- 3) Putusan incidentieel adalah putusan yang berhubungan dengan insident, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Putusan ini pun belum berhubungan dengan pokok perkara, seperti putusan yang membolehkan seseorang ikut serta dalam suatu perkara (vrijwaring, voeging, dan tussenkomst)
- 4) Putusan provisioneel adalah putusan yang menjawab tuntutan provisi, yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan

guna kepentingan salah satu pihak putusan akhir dijatuhkan. Misalnya dalam perkara perceraian, sebelum perkara pokok diputuskan, istri minta dibebaskan kewajiban untuk tinggal bersama dengan suaminya.

b. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. Perkara perdata dapat diperiksa pada 3 (tiga) tingkatan pemeriksaan, yaitu :

- 1) Pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri, pada tingkatan ini pemeriksaan perkara perdata menggunakan HIR (Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk daerah Pulau Jawa dan Madura) dan RBg (Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk daerah-daerah luar pulau Jawa dan Madura).
- 2) Pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi, pada tingkatan ini pemeriksaan perkara perdata menggunakan Undang – Undang No.20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta RBg (Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk daerah-daerah luar pulau Jawa dan Madura).
- 3) Pemeriksaan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung, pada tingkatan ini pemeriksaan perkara perdata menggunakan Undang – Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.



Putusan akhir menurut sifat amarnya (diktumnya) dapat dibedakan atas 3 (tiga) macam, yaitu putusan condemnatoir, putusan constitutief, dan putusan declaratoir.

- 1) Putusan condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi. Hak perdata penggugat yang dituntutnya terhadap tergugat, diakui kebenarannya oleh hakim. Amar putusan selalu berbunyi “Menghukum .... dan seterusnya”
- 2) Putusan constitutief adalah putusan yang menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya, putusan yang membatalkan suatu perjanjian, menyatakan pailit, memutuskan suatu ikatan perkawinan, dan sebagainya. Amar putusan berbunyi: “Menyatakan... dan seterusnya”
- 3) Putusan declaratoir adalah putusan yang menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum. Misalnya, perjanjian antara penggugat dan tergugat dinyatakan sah menurut hukum dan sebagainya. Amar putusannya selalu berbunyi : “Menyatakan ... sah menurut hukum.”

Dari ketiga putusan akhir tersebut diatas, putusan yang memerlukan pelaksanaan (executie) hanyalah putusan akhir yang bersifat condemnatoir, sedangkan putusan akhir lainnya hanya mempunyai kekuatan mengikat.

### 3. Formulasi Putusan<sup>66</sup>

Maksud formulasi putusan adalah susunan atau sistematika yang harus dirumuskan dalam putusan agar memenuhi syarat perundang-undangan. Secara garis

---

<sup>66</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 807-816

besar, formulasi putusan diatur dalam pasal 184 ayat (1) HIR atau Pasal 195 RBG. Apabila putusan yang dijatuhkan tidak mengikuti susunan yang dijatuhkan tidak mengikuti susunan perumusan yang digariskan pasal di atas, putusan tidak sah dan harus dibatalkan.

Mengenai formulasi putusan tidak hanya diatur dalam pasal 184 ayat (1) HIR dan Pasal 195 RBG, tetapi juga dalam pasal 23 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam pasal 25 UU No 4 Tahun 2004. Bertitik tolak dari pasal-pasal di atas, terdapat beberapa unsur formula yang harus tercantum dalam putusan.

- a. Memuat secara Ringkas dan Jelas Pokok Perkara, Jawsaban, Pertimbangan dan Amar Putusan

Mengenai apa saja yang mesti tercantum dalam putusan adalah hal-hal berikut:

#### 1) Dalil Gugatan

Dalil gugatan atau fundamentum petendi, dijelaskan dengan singkat dasar hukum dan hubungan hukum serta fakta yang menjadi dasar gugatan. Penerapan uraian dalil gugatan dalam putusan, dibawah penyebutan identitas para pihak.

Uraian tentang ini menurut pasal di atas :

- Cukup berupa ringkasan dalil gugatan
- Tetapi harus jelas dan dimengerti

#### 2) Mencantumkan Jawaban Tergugat

Keharusan mencantumkan jawaban tergugat menurut Pasal 184 ayat (1) HIR, cukup dengan ringkas. Tidak mesti keseluruhan. Cukup diambil yang pokok dan relevan dengan syarat, tidak boleh menghilangkan makna hakiki jawaban tersebut. Agar ringkasan itu tidak menyimpang dari jawaban yang sebenarnya, hakim dapat ,menanyakan tergugat tentang hal-hal yang kurang jelas dan meragukan dalam jawaban.

Uraian atau perumusan mengenai jawaban dalam putusan, ditemptkan dibawah ringkasan dalil gugatan. Dengan sistematika yang demikian terjalin kesinambungan susunan, rumusan, putusan antara dalil gugatan dengan jawaban atau bantahan tergugat.

### 3) Uraian Singkat Ringkasan dan Lingkup Pembuktian

Uraian selanjutnya, deskripsi fakta dan alat bukti atau pembuktian yang ringkas dan lengkap. Dimulai dengan alat buktii atau pembuktian yang diajukan penggugat, dan dilanjutkan dengan pembuktian tergugat:

- Alat bukti apa saja yang diajukan masing-masing pihak,
- Terpenuhi atau tidak syarat formil dan syarat materiil masing-masing alat bukti yang diajukan.

### 4) Pertimbangan Hukum

Dapat dikatakan pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dan hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian:

- (1) Apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materiil,
- (2) Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian,
- (3) Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti
- (4) Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak

Selanjutnya, diikuti analisis, hukum apa yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang obyektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan.

Apabila putusan tidak lengkap dan saksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya.

#### 5) Ketentuan Undang-undang

Keharusan menyebut pasal-pasal tertentu peraturan perundangan yangn diterapkan dalam putusan, digariskan dalam pasal 184 ayat (2) HIR yang menegaskan, apabila putusan didasarkan pada aturan undang-undang yang pasti maka aturan itu harus disebut. Juga diatur dalam pasal 23 ayat (1) UU No.14 tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No, 35 tahun 1999 (Sekarang pada pasal 25 ayat (1) UU No.4 tahun 2004).

#### 6) Amar Putusan

Amar atau dictum utusan merupakan pernyataan (deklarasi) yang berkenaan dengan status dan hubungan hukum antara para pihak dengan barang objek yang

disengketakan. Dan juga berisi perintah atau penghukuman atau *condemnatoir* yang ditimpakan kepada pihak yang berperkara.

Amar putusan harus jelas dan ringkas perumusannya, dengan acuan sebagai berikut.

#### (1) Gugatan Mengandung Cacat Formil

Seperti yang dijelaskan, berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No.4 Tahun 1996, gugatan tidak memiliki dasar hukum, gugatan *error in persoma* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*, mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relative dan sebagainya.

Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan :

Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvanklelijke verklaard*)

Memang terdapat variasi, dihubungkan dengan jenis cacat formil yang terkandung dalam gugatan :

- Kalau cacat formilnya surat kuasa, *error in persona*, *obscuur libel*, *premature*, kedaluwarsa, *ne bis in idem*, amar putusannya:

“Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima”

- Kalau cacat formilnya mengenai yurisdiksi atau kompetensi, amar putusan dapat berbunyi:

(a) Menyatakan Tidak Berwenang Mengadili, atau

(b) Gugatan Tidak Dapat Diterima.

Dengan demikian, dapat dicantumkan salah satu di antaranya yakni menyatakan tidak berwenang mengadili secara absolute atau relative atau langsung amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Tetapi dibenarkan juga mencantumkan keduanya. Didahului pernyataan tidak berwenang mengadili, yang diikuti dengan pernyataan gugatan tidak dapat diterima;

- Kalau cacat formil yang dijatuhkan berdasarkan Eksepsi yang diajukan tergugat, dan selain itu tergugat juga mengajukan reconvensi, amar putusan yang mesti dijatuhkan:

1) Dalam Konvensi

(a) Tentang eksepsi, Mengabulkan Eksepsi

(b) Dalam Pokok Perkara, Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima

2) Dalam Reconvensi

Kemungkinan bisa berupa;

Menyatakan Gugatan Reconvensi Tidak Dapat Diterima, atau

(a) Menolak Reconvensi (apabila tidak terbukti)

(b) Mengabulkan seluruh atau sebagian (apabila terbukti)

(2) Gugatan Tidak Terbukti

Apabila penggugat tidak mampu mengajukan alat bukti yang cukup memenuhi batas minimal pembuktian atau tergugat mengajukan bukti lawan yang melumpuhkan atau menyingkirkan eksistensi dan nilai kekuatan pembuktian yang diajukan penggugat maka secara teknis yustisial, penggugat dianggap tidak berhasil

membuktikan dalil gugatannya. Akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatan, gugatannya mesti ditolak seluruhnya. Dengan demikian amar putusan yang mesti dijatuhkan:

“Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya”

b. Mencantumkan Biaya Perkara

Hal lain yang mesti dicantumkan dalam formulasi putusan berkenaan dengan biaya perkara. Pencantumannya dalam putusan diatur dalam pasal 184 ayat (1) HIR, Pasal 187 ayat (1) RBG. Selain putusan mencantumkan mengenai pokok-pokok perkara sebagaimana yang diuraikan diatas, juga mencantumkan tentang banyaknya biaya perkara. Bahkan dalam pasal 183 ayat (1) HIR, Pasal 194 RBG, hal itu pun telah ditegaskan, bahwa banyaknya biaya perkara yang dijatuhkan kepada salah satu pihak, harus disebut dalam putusan.

### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan secara kualitatif mengenai objek yang dibicarakan sesuai kenyataan yang terdapat dalam masyarakat.<sup>1</sup>

### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Wajo, Kota Sengkang tepatnya di Pengadilan Agama Sengkang. Dengan alasan terdapatnya kasus mengenai pembatalan hibah, pembatalan jual beli dan penetapan ahli waris yang diajukan secara bersamaan di Pengadilan Agama Sengkang namun kemudian gugatannya tidak dapat diterima.

### **C. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan beberapa jenis pendekatan Yuridis empiris. Secara yuridis yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Secara empiris dengan melihat fakta yang ada di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dipandang dari sudut penerapan hukum.

### **D. Sumber Data**

Berdasarkan sumbernya, jenis data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan dicatat untuk pertama kali. Data sekunder adalah data hasil pengumpulan orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau klasifikasi menurut

---

<sup>1</sup>Soejono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 1984), h.10.



keperluan mereka.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data primer dan sekunder. Adapun sumber data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berikut :

1. Data primer.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Sengkang . Sumber data primer ini adalah hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan menguasai permasalahan yang akan dibahas di lokasi penelitian.

2. Data sekunder.

Bahan penelitian kepustakaan ini menghasilkan data sekunder yang diperoleh dari 2 (dua) bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer maupun badan hukum sekunder.

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari :

- 1) Al-Qur'anul Karim
- 2) Al-Hadits
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari :

- 1) Buku yang membahas tentang hibah, jual beli dan kewarisan.

---

<sup>2</sup>S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 143.

- 2) Artikel dan tulisan yang berkaitan dengan masalah hibah, jual beli dan kewarisan.

### ***E. Metode Pengumpulan Data***

Di dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan tehnik pengumpulan data, sebagai berikut :

#### **1. Tehnik wawancara.**

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya-jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>3</sup>

Pengumpulan data yang diperoleh melalui informasi atau hasil wawancara terhadap piha-pihak di Pengadilan Agama Sengkang yang mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas yakni mengenai pembatalan hibah, pembatalan Jual Beli, dan penetapan Ahi Waris (**Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 166/Pdt.G/2015/PA Skg**)

#### **2. Dokumentasi.**

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau

---

<sup>3</sup>Esterberg, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 97.

catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain.<sup>4</sup>

### 3. Penelusuran literatur ilmiah

Penelusuran literatur ilmiah yang berhubungan dengan masalah hibah, jual beli dan kewarisan serta menganalisis putusan tentang penarikan akta hibah dengan terlebih dahulu menghubungkannya dengan teori-teori tentang hibah.

### **F. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “divalidasi”. Validasi terhadap peneliti, meliputi; pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian - baik secara akademik maupun logiknya<sup>5</sup>

### **G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.**

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>6</sup> Tujuan peneliti melakukan analisis data adalah untuk menyederhanakan data sehingga mudah untuk membaca data yang diolah. Data yang berhasil diperoleh atau yang telah berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik itu data primer dan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian

---

<sup>4</sup>fitwiethayalisi, “penelitian kualitatif (metode pengumpulan data)”<https://fitwiethayalisi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/penelitian-kualitatif-metodepengumpulan-data/> (24 November 2015)

<sup>5</sup>Sugiono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfa Beta, 2009), h. 305.

<sup>6</sup>Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007) h. 46.

disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan, dan menjelaskan guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

#### H. *Pengujian Keabsahan Data*

##### 1. Meningkatkan ketekunan.

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak. Dengan demikian dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Dengan melakukan hal ini, dapat meningkatkan kredibilitas data.<sup>7</sup>

##### 2. Menggunakan bahan referensi.

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya.<sup>8</sup> Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi.

---

<sup>7</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 306.

<sup>8</sup>Sugiono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 306.

## **BAB IV**

### **PENYELESAIAN HIBAH YANG DIPERJUALBELIKAN**

#### ***A. Profil Pengadilan Agama Sengkang***

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama**

Berdirinya Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo dapat kita lihat pertama kali pada pasal 1 Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'ah di luar Jawa dan Madura yang berbunyi “ di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri.

Selanjutnya oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tersebut menentukan nama-nama tempat di mana akan dibentuk Pengadilan Agama /Mahkamah Syari'ah dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Sengkang tercantum dalam daftar-daftar nomor Pengadilan Agama /Mahkamah Syari'ah.

Namun demikian bukan berarti secara otomatis Pengadilan Agama sengkang Kabupaten Wajo telah terbentuk, sebab pada pasal 12 dari Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan “ pelaksana dari peraturan ini diatur oleh menteri Agama “. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1950 keluarlah Penetapan menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian

Barat sebagai realisasi dari pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957.

Dalam penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tersebut menetapkan bahwa dalam nomor urut 17 (tujuh belas) akan diobentuk Pengadilan Agama /mahkamah Syari'ah Sengkang Kabupaten Wajo.

Akan tetapi dengan dasar penetapan Menteri Agama tersebut Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Sengkang Kabupaten Wajo belum dapat melaksanakan tugasnya sebagai salah satu badan peradilan yang resmi karena di samping belum ada kantornya juga belum ada pegawainya. Barulah pada tahun 1959 diangkat 3 (tiga) orang pegawai Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo, tetapi masih terbentur pada masalah belum adanya pejabat Ketua yang ditunjuk sebagai pimpinan, sehingga Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo pada waktu itu belum dapat berjalan. Dan nanti pada tanggal 1 Juni 1960 Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo resmi terbentuk baik dari segi yuridis formil maupun dari segi kenyataan, karena pada waktu itu Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo diresmikan dan sekaligus pelantikan Bapak K.H.hamzah badawi sebagai panitera merangkap Pejabat Ketua berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama No : C/Iim-17/1396 tanggal 3 Maret 1960 terhitung mulai tanggal 1 Maret 1960 sebagai pindahan dari pegawai Kantor Urusan Agama Kabupaten Wajo.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Pengadilan Agama Sengkang, "Profil Pengadilan Agama Sengkang", *Situs Resmi Pengadilan Agama Sengkang*.

## 2. Visi dan Misi PA Sengkang

Adapun visi dan misi dari Pengadilan Agama Sengkang yaitu:

### a. Visi.

Terwujudnya Pengadilan Agama Sengkang sebagai bagian pengadilan Indonesia yang Agung.

### b. Misi.

- 1) Mewujudkan pelayanan yang transparan, cepat dan tepat waktu.
- 2) Mewujudkan kinerja yang professional
- 3) Mewujudkan pembinaan dan pengawasan yang berkualitas<sup>2</sup>

## 3. Struktur Organisasi

Adapun struktur Organisasi yang menjalankan Pengadilan Agama Sengkang yaitu:

Ketua : Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Wakil Ketua : Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H.

Hakim : Dra. Hj. Dzakiyyah  
Hj. St. Aisyah S., S.H.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Drs. H. Idris, M.HI

---

[http://www.pasengkang.net/index.php?option=com\\_content&view=article&id=34&Itemid=78](http://www.pasengkang.net/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=78)  
(23 April 2016)

<sup>2</sup>Pengadilan Agama Sengkang, “Visi dan Misi Pengadilan Agama Sengkang”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Sengkang*.  
[http://www.pasengkang.net/index.php?option=com\\_content&view=article&id=34&Itemid=78](http://www.pasengkang.net/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=78)  
(23 April 2016).

Drs. M. Yasin Paddu  
 Dra. Hj. Jusmah  
 Drs. Muhammadong, M.H.  
 Dra. Hj. St. Hasma  
 Dra. Hj. Faridah Mustafa  
 Panitera : Hartanto, S.H.  
 Wakil Panitera : Drs. Muh.Tahir, S.H.  
 Sekretaris : Suherman S., S.HI.  
 Panitera Muda Gugatan : Dra. Hj. Hasmawiyati  
 Panitera Muda Permohonan : Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.  
 Panitera Muda Hukum : H. Arifin, S.Ag., M.H.  
 Panitera Pengganti : Drs. H. Lukman H.  
 H. Ridwan, S.H.  
 Muharrar Syam, B.A.  
 Dra. Wahdah  
 Sulfian P.,S. Ag.  
 Hj. Fitriani, S. Ag.  
 Jurusita : Gusti Hasan, S.H.  
 Juru Sita Pengganti : Munawir Mustafa  
 Kasubbag Kepegawaian : Marzuki Mekka, S.Ag., S.H.  
 Kasubbag Perencanaan  
 TI, dan Pelaporan : Muh. Yunus, Amd.Hk.,S.E.  
 Kasubbag Umum dan



Keuangan : Moh. Riski Prakarsa K., S.E.<sup>3</sup>

#### 4. Yurisdiksi PA Sengkang

Setiap Pengadilan Agama memiliki ruang lingkup untuk menjalankan kewenangannya di setiap daerah, hal tersebut dikenal dengan istilah yurisdiksi.

Begitu pula dengan Pengadilan Agama Sengkang yang memiliki yuridiksi di Kabupaten Daerah Tk II Wajo Propinsi Sulawesi Selatan yang memiliki Luas wilayah 2.406,19 km<sup>2</sup> yang terdiri atas 14 kecamatan, 48 kelurahan dan 128 desa dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Kabupaten Luwu

Sebelah Selatan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone

Sebelah Timur Teluk Bone

Sebelah Barat Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sidrap.<sup>4</sup>

#### 5. Tupoksi PA Sengkang

Pengadilan Agama Sengkang melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

---

<sup>3</sup>Pengadilan Agama Sengkang, “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sengkang”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Sengkang*.[http://www.pasengkang.net/index.php?option=com\\_content&view=article&id=34&Itemid=78](http://www.pasengkang.net/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=78) (23 April 2016).

<sup>4</sup>Pengadilan Agama Sengkang, “Yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Sengkang*.[http://www.pasengkang.net/index.php?option=com\\_content&view=article&id=34&Itemid=78](http://www.pasengkang.net/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=78) (23 April 2016).

a. Perkawinan

Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain :

- 1) Izin beristri lebih dari seorang;
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 3) Dispensasi kawin;
- 4) Pencegahan perkawinan;
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 6) Pembatalan perkawinan;
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- 8) Perceraian karena talak;
- 9) Gugatan perceraian;
- 10) Penyelesaian harta bersama;
- 11) Penguasaan anak-anak;
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- 14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) Pencabutan kekuasaan wali;

- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum Cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
- 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- 20) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
- 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- 22) Pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang RI nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

b. Waris

Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris

c. Wasiat

Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

d. Hibah

Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

e. Wakaf

Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

f. Zakat

Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

g. Infaq

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.

h. Shodaqoh

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt. dan pahala semata.

i. Ekonomi Syari'ah

Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

- 1) Bank syari'ah;
- 2) Lembaga keuangan mikro syari'ah;
- 3) Asuransi syari'ah;
- 4) Reasuransi syari'ah;
- 5) Reksa dana syari'ah;
- 6) Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- 7) Sekuritas syari'ah;
- 8) Pembiayaan syari'ah;
- 9) Pegadaian syari'ah;
- 10) Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah;
- 11) Bisnis syari'ah;<sup>5</sup>

Untuk melaksanakan tugas - tugas pokok tersebut Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. **Fungsi Mengadili (judicial power)**, yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing ; (vide Pasal 49 Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006) ;
2. **Fungsi Pengawasan**, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera / Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006) ; Serta terhadap pelaksanaan administrasi

---

<sup>5</sup>Indonesia Legal Center Publishing, *Undang-undang Peradilan Agama* (Cet.II; Jakarta: CV.Karya Gemilang, 2009),h.95.

umum. (vide : Undang - Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

3. **Fungsi Pembinaan**, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) ;
4. **Fungsi Administratif**, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
5. **Fungsi Nasehat**, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
6. **Fungsi lainnya**, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991 ;<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Pengadilan Agama Sengkang, “Tupoksi Pengadilan Agama Sengkang”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Sengkang*.

**B. Kedudukan Hukum Tanah Hibah Sebagai Harta Warisan Setelah Diperjualbelikan.**

Sebagai perbutaan hukum, hibah harus memenuhi apa yang diatur dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“BW”), bahwa hibah merupakan pemberian oleh seseorang kepada orang lainnya secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, atas barang-barang bergerak dengan akta Notaris maupun barang tidak bergerak dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah “PPAT” pada saat pemberi hibah masih hidup. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>7</sup>

Pada dasarnya hibah sah dan akibatnya berlaku bagi para pihak jika penerima hibah telah menerima dengan tegas pemberian tersebut dengan akta notaris. Hal ini diatur dalam Pasal 1683 jo. Pasal 1682 KUHPerdato.

Pasal 1682 KUHPerdato:

Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.<sup>8</sup>

Pasal 1683 KUHPerdato:

Tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang

---

[http://www.pasengkang.net/index.php?option=com\\_content&view=article&id=34&Itemid=78](http://www.pasengkang.net/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=78)  
(23 April 2016).

<sup>7</sup>Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171 huruf G.

<sup>8</sup>R. Soebakti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta, Balai Pustaka), h.438.

yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu. Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup; dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya.<sup>9</sup>

Akan tetapi, hibah atas benda-benda bergerak yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunduk, tidak memerlukan akta notaris dan adalah sah bila pemberian tersebut diserahkan begitu saja kepada penerima hibah atau kepada orang lain yang menerima hibah itu untuk diteruskan kepada penerima hibah seperti yang terdapat dalam Pasal 1687 KUHPerdota.<sup>10</sup>

Perlu diketahui bahwa ada beberapa hal yang dapat menyebabkan hibah menjadi batal, yaitu antara lain:

1. Hibah yang mengenai benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari.<sup>11</sup>
2. Hibah dengan mana si penghibah memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah, dianggap batal. Yang batal hanya terkait dengan benda tersebut.<sup>12</sup>
3. Hibah yang membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup>R. Soebekti, R.Tgitrosoedibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h.438.

<sup>10</sup>R. Soebekti, R.Tgitrosoedibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h.439.

<sup>11</sup>R. Soebekti, R.Tgitrosoedibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h.436.

<sup>12</sup>R. Soebekti, R.Tgitrosoedibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h.436.

<sup>13</sup>R. Soebekti, R.Tgitrosoedibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h.436.



4. Hibah atas benda tidak bergerak menjadi batal jika tidak dilakukan dengan akta notaris.<sup>14</sup>

Dalam Perkara ini, si pemberi hibah memberikan hibah kepada penerima hibah yang juga merupakan ahli warisnya di hadapan PPAT pada tanggal 14 Mei 2008 mencakup seluruh harta dan melebihi 1/3 harta peninggalan pemberi hibah yang dihibahkan kepada masing-masing anak Tergugat I yaitu : Tergugat VI, VII, VIII dan IX serta alm. Andi Pajung;

Hibah merupakan kehendak bebas si pemilik harta untuk menghibahkan kepada siapa saja yang ia kehendaki. Jadi, pemberi hibah bertindak secara aktif menyerahkan kepemilikan hartanya kepada penerima hibah.

Namun kebebasan selalu dibatasi dengan hak pihak lain. Di dalam harta pemberi hibah, terdapat hak ahli waris yang lain. Dalam hukum kewarisan Islam, pemberian hibah untuk orang lain juga dibatasi maksimum hanya sebesar 1/3 harta. Jadi, jika memang hibah melanggar hal tersebut, maka dapat menggugat pemberian hibah. Namun jika tidak mempermasalahkan, maka hibah tetap bisa dilaksanakan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 210 menyatakan bahwa;

Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>R. Soebekti, R.Tgitrosoedibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h.438.

<sup>15</sup>Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 210.

Untuk mencegah terjadinya tuntutan di kemudian hari, dalam praktik selalu disyaratkan adalah surat persetujuan dari anak kandung pemberi hibah. Dengan demikian, pemberian hibah harus memperhatikan persetujuan dari para ahli waris dan jangan melanggar hak mutlak mereka. Hak mutlak adalah bagian warisan yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk masing-masing ahli waris.<sup>16</sup>

Dalam kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai hibah yang diberikan pada saat si pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.<sup>17</sup>

Dalam perkara ini, diduga si pemberi hibah memberikan hibah yang melebihi dari 1/3 dari harta yang dimilikinya tanpa izin dari ahli waris lainnya, sehingga ahli waris yang tidak mendapatkan hibah ini menuntut hibah tersebut. Namun para ahli waris ini menuntut hal tersebut setelah si pemberi hibah meninggal dunia dan beberapa objek hibah berupa tanah yang dihibahkan telah diperjualbelikan oleh si penghibah sendiri sebelum meninggal dunia dan sebagian objek hibah berupa tanah yang lain dijual oleh ahli waris yang menerima hibah. Jadi hal tersebut wajar dilakukan oleh ahli waris pemberi hibah karena tidak sesuai dengan pasal 213 KHI.

Selanjutnya, sebelum meninggal dunia si pemberi hibah menarik kembali hibah berupa tanah yang diberikan kepada ahli warisnya, hal tersebut diduga karena si penghibah pada saat itu sedang sakit dan membutuhkan uang.

---

<sup>16</sup>Dra. Hj. Jusmah, S.HI., Hakim Pengadilan Agama Sengkang, *Wawancara*, Pengadilan Agama Sengkang, 13 Juli 2016

<sup>17</sup>Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 213.

Penarikan hibah ini ditandai dengan adanya peralihan hak dengan cara jual-beli di atas tanah obyek sengketa II dan III artinya selain dengan cara hibah yang dilakukan oleh pemberi hibah kepada ahli warisnya, lalu kemudian si pemberi hibah melakukan lagi peralihan hak dengan cara jual beli kepada para Tergugat X s/d XXXII di atas tanah obyek sengketa II dan sudah memiliki SHM (Sertifikat Hak Milik).

Secara tidak langsung si pemberi Hibah memenuhi pasal 1668 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

Si penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah; hibah yang semacam itu, sekadar mengenai benda tersebut, dianggap sebagai batal.<sup>18</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga diatur mengenai penarikan hibah yaitu pada pasal 716 sampai dengan pasal 730 yang secara keseluruhan menjelaskan bahwa dibenarkan dapat dilakukan penarikan hibah oleh penghibah dengan syarat si penerima hibah menyetujuinya dan dengan adanya putusan pengadilan.<sup>19</sup>

Maka dari itu peristiwa hibah yang dilakukan sebelumnya oleh si pemberi hibah terhadap objek tersebut dinyatakan batal demi hukum. Batal demi hukum merupakan sanksi perdata terhadap suatu perbuatan hukum yang mengandung cacat yuridis, berupa perbuatan hukumnya tidak mempunyai

---

<sup>18</sup>R. Soebekti, R.Tgitrosoedibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h.436.

<sup>19</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, pasal 716- pasal 730, buku III, Bagian III.

akibat hukum semenjak terjadinya perbuatan hukum tersebut atau berdaya surut atau perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku semenjak akta ditandatangani.<sup>20</sup> Sehingga jual beli atas tanah ex hibah tersebut yang dilakukan oleh si pemberi hibah tidak terikat dengan perbuatan hibah yang sebelumnya dilakukan, lagi pula menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah penarikan hibah dapat dilakukan dengan syarat si penerima hibah menyetujuinya, dan dalam perkara ini ex penerima hibah atau ahli waris dari pemberi hibah (tergugat) menyatakan tidak keberatan atas penarikan hibah yang dilakukan oleh si pemberi hibah. Jadi jual beli yang dilakukan oleh si pemberi hibah kepada pihak lain sah karena telah terpenuhi syarat materill maupun syarat formilnya yang dibuktikan dengan pihak pembeli telah memiliki AJB (Akta Jual Beli) dan SHM (Sertifikat Hak Milik)

Namun, sebaiknya si pemberi hibah sebelum melakukan jual beli terhadap objek tanah tersebut, membuat akta notaril untuk menggugurkan akta hibah yang sebelumnya, hal ini untuk meminimalisir kemungkinan sengketa dimasa mendatang. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Mukhlis Irfany dalam Tesis nya yaitu:

Apabila kedua belah pihak (pemberi dan penerima hibah) sepakat dan akta hibah tersebut belum didaftarkan (belum balik nama sertifikat),

---

<sup>20</sup>Angga, “Batal demi hukum merupakan sanksi perdata terhadap suatu perbuatan hukum yang mengandung cacat yuridis”, [http://www.academia.edu/10886061/Batal\\_demi\\_hukum\\_merupakan\\_sanksi\\_perdata\\_terhadap\\_suatu\\_perbuatan\\_hukum\\_yang\\_mengandung\\_cacat\\_yuridis](http://www.academia.edu/10886061/Batal_demi_hukum_merupakan_sanksi_perdata_terhadap_suatu_perbuatan_hukum_yang_mengandung_cacat_yuridis), 16 Juli 2016.

maka penarikan kembali akta hibah tersebut cukup dengan akta notariil berupa Akta Pembatalan Hibah yang dibuat oleh notaris setempat.<sup>21</sup>

Jika dilihat dari objek II yang telah dipaparkan diatas, maka objek tanah ex hibah tersebut tidak termasuk dalam harta yang ditinggalkan si pemberi hibah karena jika diliat dari peristiwanya jual beli dilakukan sejak tahun 2010 s/d 2012 sedangkan si pemberi hibah yang menjadi pewaris meninggal pada tanggal 8 Januari 2012 sehingga tidak dapat dikatakan sebagai budel waris. Hal ini juga dikatakan oleh Drs.Idris,S.HI.,M.HI. (Hakim Pengadilan Agama Sengkang) yang menyatakan bahwa yang dimaksud “Budel waris adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris setelah dikeluarkan untuk biaya pemakaman, wasiat dan hibah”.<sup>22</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya perawatan jenazah (tahjiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.<sup>23</sup> Sedangkan Menurut KUHPerdara Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian.<sup>24</sup>

Selanjutnya mengenai tanah sengketa obyek sengketa III yang telah dihibahkan oleh si penghibah kepada si penerima hibah alm. Andi Pajung, yang

---

<sup>21</sup>Mukhlis Irfany, “Penarikan Kembali Hibah yang telah dituangkan dalam Akta Notaris oleh Pemberi Hibah”, *Tesis* (Yogyakarta: Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada , 2012), Abstrak.

<sup>22</sup>Drs.Idris,S.HI.,M.HI, Hakim Pengadilan Agama Sengkang, *Wawancara*, Pengadilan Agama Sengkang, 13 Juli 2016.

<sup>23</sup>Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171 huruf (b), (c), dan (e).

<sup>24</sup>R.Soebekti, R.Tgitrosoedibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h.221.

juga dialihkan dengan cara jual beli di atas tanah sebagian obyek sengketa III. Dalam hal ini perbuatan hibah yang dilakukan oleh si pemberi hibah kepada si penerima hibah alm. Andi Pajung benar adanya karena telah dibuat akta hibah di depan PPAT sesuai dengan pasal 1683 KUHPdata. Perolehan tanah secara hibah seyogyanya didaftarkan peralihan haknya itu di Kantor Pertanahan setempat sebagai bentuk pengamanan hibah tanah.<sup>25</sup> Namun dalam hal ini Tergugat I maupun pembeli dari sebagian Tanah objek III belum mendaftarkan peralihan haknya itu di Kantor Pertanahan setempat.

Akta hibah yang dibuat di depan PPAT hanya sebagai bukti bahwa pemberian tersebut diberikan kepada si penerima hibah namun belum terdaftar di BPN sebagai pemilik tanah tersebut. Kekuatan Hukum akta hibah terletak pada fungsi akta autentik itu sendiri yakni sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang (Pasal 1682, 1867 dan pasal 1868 BW) sehingga hal ini merupakan akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta autentik sebagai alat pembuktian.<sup>26</sup>

Maka dari itu, objek sengketa III yang telah dihibahkan lalu diperjual belikan tersebut memungkinkan dapat digugat sebagai budel waris oleh ahli waris lainnya karena secara yuridis tanah tersebut masih atas nama si pemberi

---

<sup>25</sup>Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.100.

<sup>26</sup>Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, h.100.

hibah dan terdapat cacat formil pada peristiwa pemberian hibahnya. Sehingga, perkara ini tepat jika diajukan bersamaan dengan jual beli dan hibah di Pengadilan Agama jika subjeknya beragama Islam sesuai dengan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

***C. Pertimbangan Hukum, Hakim Pengadilan Agama Sengkang terhadap putusan Nomor: 166/Pdt.G./2015/Pa.Skg***

Perkara Nomor: 166/Pdt.G./2015/Pa.Skg terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 2 Februari 2015 dan tercatat sebagai perkara Malwaris di buku Induk Perkara.<sup>27</sup> Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Drs. Idris, S.Hi, M.Hi (Hakim Pengadilan Agama Sengkang) yang menyatakan bahwa:

Sebenarnya perkara nomor 166/ Pdt.G/ 2015/ Pa.Skg ini merupakan perkara malwaris yang mana pada intinya penggugat menginginkan pembagian warisan terhadap seluruh harta dari pewaris hanya saja sebelum melaksanakan pembagiannya diselesaikan terlebih dahulu sengketa lain yang berkaitan.<sup>28</sup>

Perkara ini bermula terjadi pada tahun 2008 sampai tahun 2012. Pada tanggal 14 Mei 2008 Hj. Kumala binti H. Benawa selaku pemberi hibah memberikan hibah yang mencakup seluruh hartanya berupa tanah dan perhiasan emas kepada ahli warisnya yang merupakan anak dari salah satu saudaranya dan setelah itu sebagian dari tanah yang dihibahkan dijual lagi oleh Hj. Kumala

---

<sup>27</sup>Buku Induk Perkara Pengadilan Agama Sengkang Tahun 2015

<sup>28</sup>Drs.Idris,S.HI.,M.HI, Hakim Pengadilan Agama Sengkang, *Wawancara*, Pengadilan Agama Sengkang, 13 Juli 2016.

sendiri, lalu sebagian tanah yang telah dihibahkan telah dijual lagi oleh ahli warisnya. Sehingga penggugat yang juga ahli waris dari pemberi hibah menggugat harta yang telah dihibahkan tersebut pada saat yang memberikan hibah telah meninggal dunia.

### **1. Para Pihak dalam perkara nomor 166/ Pdt.G/ 2015/ Pa.Skg**

Perkara ini di ajukan oleh Penggugat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Hamka Jarod, S.H. dan Muh. Nursal, SH., Advokat/Pengacara, yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim No. 40, Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar berdasarkan sura kuasa khusus Nomor: 8/SK/PA.Skg/I/2015, tertanggal 13 Januari 2015.

Adapun prinsipal penggugat yaitu sebagai berikut;<sup>29</sup>

1. **Hj. Indo Anja binti Ambo Oga**, umur 70 tahun, agama Islam, merupakan keponakan dari Hj. Kumala binti H. Benawa (Anak Subaeda binti H. Benawa) sebagai **Penggugat I.**
2. **Hj. Maryam binti Ambo Oga**, umur 70 tahun, agama Islam, merupakan keponakan dari Hj. Kumala binti H. Benawa (Anak Subaeda binti H. Benawa) sebagai **Penggugat II.**
3. **Hj. Azisah binti Ambo Oga**, umur 64 tahun, agama Islam, keponakan dari Hj. Kumala binti H. Benawa (Anak Subaeda binti H. Benawa) sebagai **Penggugat III.**

---

<sup>29</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor perkara : 166/Pdt.G/2015/PA. Skg”, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, <http://www.putusan.mahkamahagung.go.id> (20 Februari 2016).



4. **H. Burhanuddin bin Ambo Oga**, umur 62 tahun, agama Islam, keponakan dari Hj. Kumala binti H. Benawa (Anak Subaeda binti H. Benawa) sebagai **Penggugat IV**.
5. **H. Ambo Tang bin Ambo Oga**, umur 54 tahun, agama Islam, keponakan dari Hj. Kumala binti H. Benawa (Anak Subaeda binti H. Benawa) sebagai **Penggugat V**.
6. **Juddawiah binti H. Abu Bakar**, umur 54 tahun, Agama Islam, keponakan dari Hj. Kumala binti H. Benawa (anak Hj. Indo Coma binti H. Benawa ) sebagai **Penggugat VI**.
7. **Hj. Warda binti H. Abu Bakar**, umur 52 tahun, agama Islam, keponakan dari Hj. Kumala binti H. Benawa (anak Hj. Indo Coma binti H. Benawa ) sebagai **Penggugat VII**.
8. **Ilmu Edi bin H. Umar**, umur 33 tahun, agama Islam, keponakan dari Hj. Kumala binti H. Benawa (Anak H. Palli bin H. Benawa) sebagai **Penggugat VIII**.
9. **Heriadi bin H. Umar**, umur 30 tahun, agama Islam, keponakan dari Hj. Kumala binti H. Benawa (Anak H. Palli bin H. Benawa) sebagai **Penggugat IX**.
10. **Herlina binti H. Umar**, umur 28 tahun, agama Islam, keponakan dari Hj. Kumala binti H. Benawa (Anak H. Palli bin H. Benawa) sebagai **Penggugat X**.

11. **Hj. Syahidah binti H. Umar, umur 28 tahun,** agama Islam, keponakan dari Hj. Kumala binti H. Benawa (Anak H. Palli bin H. Benawa) sebagai **Penggugat XI.**
12. **Agus Salim bin Muhammadong,** umur 30 tahun, agama Islam, keponakan dari Hj. Kumala binti H. Benawa (Anak Muhammadong bin H. Benawa) sebagai **Penggugat XII.**
13. **Heri Utari bin Muhammadong,** umur 28 tahun, agama Islam, keponakan dari Hj. Kumala binti H. Benawa (Anak Muhammadong bin H. Benawa), sebagai **Penggugat XIII.**
14. **Najemia binti Muhammadong,** umur 22 tahun, agama Islam, keponakan dari Hj. Kumala binti H. Benawa (Anak Muhammadong bin H. Benawa) sebagai **Penggugat XIV.**
15. **Muhammad. Ilyas bin Muhammadong,** umur 22 tahun, agama Islam, keponakan dari Hj. Kumala binti H. Benawa (Anak Muhammadong bin H. Benawa) sebagai, **Penggugat XV.**

Apabila dilihat dari principal penggugat menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 174 semuanya memenuhi klarifikasi untuk mendapatkan warisan karena masing-masing memiliki hubungan darah dengan orang yang telah meninggal (Hj. Kumala binti H. Benawa) dan juga tidak terhalang untuk mendapatkan warisan. Maka dari itu sudah tepat jika para penggugat mengajukan gugatan untuk membagi harta warisan yang dimiliki oleh Hj. Kumala binti H. Benawa yang dirinci lagi kedalam 3 obyek gugatan yaitu

pembatalan hibah, pembatalan jual beli dan penetapan ahli waris serta pembagian harta waris.

Dalam hal ini pihak tergugat, memberikan kuasa kepada H.M. Yunus Naru, SH., dan Sarifa Nabila, SH., Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jl. Lasangkuru No. 47 Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 April 2015 Nomor 48/SK.PA Skg/IV/2015.

Adapun principal tergugat sebagai berikut :<sup>30</sup>

1. **Hj. Andi Gusti binti Muhammadong**, umur 45 tahun, agama Islam, keponakan dari Hj. Kumala binti H. Benawa (Anak Muhammadong bin H.Benawa) sebagai **Tergugat I**.
2. **Andi Senni binti Muhammadong**, agama Islam, keponakan dari Hj. Kumala binti H. Benawa (Anak Muhammadong bin H.Benawa) sebagai **Tergugat II**.
3. **Andi Samang bin Muhammadong, agama Islam**, keponakan dari Hj. Kumala binti H. Benawa (Anak Muhammadong bin H.Benawa) sebagai, **Tergugat III**.
4. **Hj. Andi Hujriyah binti Muhammadong**, agama Islam, keponakan dari Hj. Kumala binti H. Benawa (Anak Muhammadong bin H.Benawa) sebagai **Tergugat IV**.

---

<sup>30</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor perkara : 166/Pdt.G/2015/PA. Skg”, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, <http://www.putusan.mahkamahagung.go.id> (20 Februari 2016).

5. **Andi Abd Rahman bin Muhammadong, agama Islam**, keponakan dari Hj. Kumala binti H. Benawa (Anak Muhammadong bin H.Benawa) sebagai, sebagai **Tergugat V**.
6. **Andi Uleng bin A. Mappanyukki, umur 34 tahun**, agama Islam, cucu dari Hj. Kumala binti H. Benawa (Anak Hj.Andi Gusti binti Muhammadong) sebagai, sebagai **Tergugat VI**.
7. **Andi Sulung bin A. Mappanyukki**, umur 32 tahun, agama Islam, cucu dari Hj. Kumala binti H. Benawa (Anak Hj.Andi Gusti binti Muhammadong), sebagai **Tergugat VII**.
8. **Andi Pawiloi bin A. Mappanyukki**, umur 33 tahun, agama Islam, cucu dari Hj. Kumala binti H. Benawa (Anak Hj.Andi Gusti binti Muhammadong), sebagai **Tergugat VIII**.
9. **Andi Sangaji bin A. Mappanyukki** , umur 25 tahun, agama Islam, cucu dari Hj. Kumala binti H. Benawa (Anak Hj.Andi Gusti binti Muhammadong), sebagai **Tergugat IX**.
10. **Mappaneddin**, umur 66 tahun, agama Islam, pembeli tanah yang dijual oleh Hj. Kumala Benawa binti H. Benawa sebagai **Tergugat X**.
11. **Sa'ali, umur 30 tahun**, agama Islam, pembeli tanah yang dijual oleh Hj. Kumala Benawa binti H. Benawa, sebagai **Tergugat XI**.
12. **H. Askar, umur 29 tahun**, agama Islam, pembeli tanah yang dijual oleh Hj. Kumala Benawa binti H. Benawa **Tergugat XII**

13. **Sanna, umur 31** tahun, agama Islam, pembeli tanah yang dijual oleh Hj. Kumala Benawa binti H. Benawa sebagai **Tergugat XIII**.
14. **Ichal, H.N umur 36** tahun, agama Islam, pembeli tanah yang dijual oleh Hj. Kumala Benawa binti H. Benawa, sebagai **Tergugat XIV**,
15. **Yunita, S.Pd, umur 46** tahun, agama Islam, pembeli tanah yang dijual oleh Hj. Kumala Benawa binti H. Benawa, sebagai **Tergugat XV**.
16. **Hj. Nurwilis, umur 42** tahun, agama Islam, pembeli tanah yang dijual oleh Hj. Kumala Benawa binti H. Benawa sebagai **Tergugat XVI**.
17. **Muh. Asbi Abbas, umur 32** tahun, agama Islam, pembeli tanah yang dijual oleh Hj. Kumala Benawa binti H. Benawa, sebagai **Tergugat XVII**.
18. **Faisal Sade, SE, umur 37** tahun, agama Islam, pembeli tanah yang dijual oleh Hj. Kumala Benawa binti H. Benawa sebagai **Tergugat XVIII**.
19. **Hj. Sunarti, umur 38** tahun, agama Islam, pembeli tanah yang dijual oleh Hj. Kumala Benawa binti H. Benawa sebagai **Tergugat XIX**.
20. **Suriani, umur 28** tahun, agama Islam, pembeli tanah yang dijual oleh Hj. Kumala Benawa binti H. Benawa, sebagai **Tergugat XX**.
21. **Muhammad Nasrul Abbas**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pembeli tanah yang dijual oleh Hj. Kumala Benawa binti H. Benawa, sebagai **Tergugat XXI**.

22. **Andi Besse Sahri Alam**, umur 38 tahun, agama Islam, pembeli tanah yang dijual oleh Hj. Kumala Benawa binti H. Benawa, sebagai **Tergugat XXII**.
23. **Arifuddin**, umur 32 tahun, agama Islam, pembeli tanah yang dijual oleh Hj. Kumala Benawa binti H. Benawa sebagai **Tergugat XXIII**.
24. **Muchtar H. Sake**, umur 41 tahun, agama Islam, pembeli tanah yang dijual oleh Hj. Kumala Benawa binti H. Benawa sebagai **Tergugat XXIV**.
25. **M. Yunus**, umur 34 tahun, agama Islam, pembeli tanah yang dijual oleh Hj. Kumala Benawa binti H. Benawa, sebagai **Tergugat XXV**.
26. **Hj. Masati**, umur 43 tahun, agama Islam, pembeli tanah yang dijual oleh Hj. Kumala Benawa binti H. Benawa, sebagai **Tergugat XXVI**.
27. **Akas, S.Sos**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Andi Macca Amirullah No. II, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat XXVII**.
28. **Herman**, umur 39 tahun, agama Islam, pembeli tanah yang dijual oleh Hj. Kumala Benawa binti H. Benawa, sebagai **Tergugat XXVIII**.
29. **Andy Usman**, umur 28 tahun, agama Islam, pembeli tanah yang dijual oleh Hj. Kumala Benawa binti H. Benawa sebagai **Tergugat XXIX**.
30. **Muh. Zakir**, umur 44 tahun, agama Islam, pembeli tanah yang dijual oleh Hj. Kumala Benawa binti H. Benawa, sebagai **Tergugat XXX**.

31. **Hj. Asmayanti, umur 31** tahun, agama Islam, pembeli tanah yang dijual oleh Hj. Kumala Benawa binti H. Benawa, sebagai **Tergugat XXXI.**
32. **Ikhwan, umur 30** tahun, agama Islam, pembeli tanah yang dijual oleh Hj. Kumala Benawa binti H. Benawa, sebagai **Tergugat XXXII.**
33. **H. Suhandi**, agama Islam, pembeli tanah yang dijual oleh Hj.A.Gusti binti Muhammadong sebagai **Tergugat XXXIII.**
34. **Rismayani**, agama Islam, pembeli tanah yang dijual oleh Hj.A.Gusti binti Muhammadong, sebagai **Tergugat XXXIV.**
35. **Fathul Abbas**, agama Islam, pembeli tanah yang dijual oleh Hj.A.Gusti binti Muhammadong, sebagai **Tergugat XXXV.**
36. **Muh. Sadikin**, agama Islam, pembeli tanah yang dijual oleh Hj.A.Gusti binti Muhammadong sebagai **Tergugat XXXVI.**
37. **Kepala Wilayah Kecamatan Tempe, selaku PPAT** dengan alamat Kantor Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **turut Tergugat.**  
Tergugat yang digugat oleh penggugat ialah yang sementara menguasai objek sengketa diantaranya yaitu penerima hibah dari si pemberi hibah yang merupakan ahli waris nya dan pembeli tanah yang sebelumnya dihibahkan oleh si pemberi hibah.

## **2. Objek Sengketa perkara nomor 166/Pdt.G/2015/Pa.Skg**

Objek sengketa dalam perkara nomor 166/Pdt.G/2015/Pa.Skg yaitu berupa tanah dan perhiasan emas, namun yang akan kita bahas dalam

pembahasan ini hanya sebatas objek berupa tanah. Adapun objek berupa tanah yang digugat oleh para penggugat yaitu sebagai berikut.<sup>31</sup>

- a. Sebidang tanah dan bangunan seluas 1.400 m<sup>2</sup> sertifikat hak milik Nomor 529/Desa Tempe atas nama Hj. Kumala Benawa, persil 311, kahir 266 CI No. Urut 62 Blok 57 terletak di Jl. Lapawennari (sebelah Barat Masjid Tarbiyah), Lingkungan Bulu Tempe, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Lorong  
 Sebelah Timur : Jalan Lapawennari  
 Sebelah Selatan : Tanah H. AmboTang  
 Sebelah Barat : Tanah H. Habe Jaje

Yaitu obyek sengketa I.

- b. Sebidang tanah perumahan seluas 10.025 m<sup>2</sup> karena adanya pembebasan ganti rugi jalanan sehingga tersisa  $\pm$  8.020 m<sup>2</sup>, hak milik Hj. Kumala Benawa sertifikat tanah hak milik Nomor 655/Kel. Tempe, terletak di Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah H. Muh. Saleng  
 Sebelah Timur : Jalanan

---

<sup>31</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor perkara : 166/Pdt.G/2015/PA. Skg", *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, <http://www.putusan.mahkamahagung.go.id> (20 Februari 2016).



Sebelah Selatan : Tanah Abd. Mutalib

Sebelah Barat : Jalan Lembu II

Yaitu obyek sengketa II;

- c. Sebidang tanah perumahan seluas  $\pm 6.500 \text{ m}^2$ , sertifikat hak milik Hj.Kumala Benawa, persil 80II, kohir 290 CI, Blok 56 No. Urut 8 terletak di Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : BTN H. sutomo

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Selatan : BTN H. Sutomo

Sebelah Barat : BTN H. Sutomo

Yaitu obyek sengketa III;

Setiap objek tanah yang ada diatas telah terikat pada suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh H.Kumala semasa hidupnya. Surat pemberian tertanggal 11 Pebruari tahun 2008 yang disusul terbitnya Akta Hibah tanggal 14 Mei 2008 terhadap seluruh harta H.Kumala, semuanya dibuat di hadapan atau sepengetahuan pejabat yang berwenang; yang kemudian diterbitkan beberapa Akta Jual Beli kepada Tergugat X s/d XXXII (23 orang) sejak tahun 2010 s/d tahun 2012 (Januari 2012) yang meliputi sebagian objek II. Dan objek III yang merupakan hibah yang diberikan kepada Alm.A.Pajung telah dijual kepada tergugat XXXIII s/d XXXVI. Hal ini dapat dilihat dari gugatan, eksepsi, replik dan duplik dari penggugat dan tergugat.

### 3. Petitum Penggugat dalam perkara nomor 166/Pdt.G/2015/Pa.Skg

Dalam gugatannya penggugat memohon kepada majelis hakim untuk :<sup>32</sup>

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan/dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sengkang adalah sah dan berharga;
3. Menetapkan almarhumah Hj. Kumala binti H. Benawa telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2012;
4. Menetapkan para Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Hj. Kumala binti H. Benawa;
5. Menetapkan seluruh harta peninggalan almarhumah Hj. Kumala, baik berupa tanah pekarangan, maupun emas perhiasan adalah budel waris yang akan dibagi kepada ahli warisnya yang berhak
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Hj. Kumala binti H. Benawa sesuai dengan hukum Islam yang dianut oleh semua pihak dalam perkara ini;
7. Menyatakan batal demi hukum atau menyatakan tidak sah dan tidak mengikat serta tidak berkekuatan hukum Akta Hibah yang dibuat di hadapan Turut Tergugat masing-masing yang terletak pada obyek sengeta I;

---

<sup>32</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor perkara : 166/Pdt.G/2015/PA. Skg”, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, <http://www.putusan.mahkamahagung.go.id> (20 Februari 2016).

8. Menyatakan batal demi hukum, atau menyatakan tidak sah dan tidak mengikat serta tidak berkekuatan hukum Akta Jual-beli yang dibuat di hadapan Turut Tergugat masing-masing yang terletak pada obyek sengketa II;
  9. Menyatakan batal demi hukum, atau menyatakan tidak sah dan tidak mengikat serta tidak berkekuatan hukum peralihan hak dengan cara jual- beli di hadapan Turut Tergugat masing-masing yang terletak di atas tanah obyek sengketa III, yang terletak di Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Sengkang, Kabupaten Wajo;
  10. Menghukum para Tergugat dan atau Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta peninggalan almarhumah Hj. Kumala binti H. Benawa untuk membagi harta peninggalan tersebut sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila ternyata tidak dapat dibagi secara natura, maka harus diserahkan kepada Lembaga Lelang Negara, dan hasilnya dibagi sesuai dengan hak dari masing-masing ahli waris almarhumah Hj. Kumala binti H. Benawa;
  11. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
  12. Menghukum semua pihak atau siapa saja yang terkait dalam perkara ini untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
  13. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Subsider:
1. Bila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

#### 4. Eksepsi Tergugat dalam perkara nomor 166/Pdt.G/2015/Pa.Skg

Terhadap gugatan tersebut maka tergugat menanggapi satu persatu mengenai hal tersebut;<sup>33</sup>

1. Pada halaman pertama tentang perihal gugatan, pihak Penggugat mengajukan tiga macam perkara atau penggabungan tiga materi perkara yaitu gugatan pembatalan hibah, gugatan pembatalan jual beli dan penetapan ahli waris serta pembagian waris. Hal ini tidak dapat dibenarkan secara hukum acara dan proses beracara, dimana Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang dibebani tiga materi pokok perkara dalam suatu proses acara persidangan (komulasi obyektif), suatu hal yang tidak wajar, tidak semestinya, apalagi dalam hal kompetensi dalam tiga materi pokok perkara tersebut;
  - a. Adanya para Tergugat X sampai dengan Tergugat XXXII punya dasar kepemilikan hak autentik berupa Akta Jual Beli (AJB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM), hal ini menyagkut sengketa hak, maka hal tersebut masuk dalam kompetensi Pengadilan Negeri sehingga Pengadilan Agama Sengkang tidak berwenang mengadili sengketa hak tersebut;

---

<sup>33</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor perkara : 166/Pdt.G/2015/PA. Skg”, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, <http://www.putusan.mahkamahagung.go.id> (20 Februari 2016).

- b. Bahwa dengan adanya produk hukum berupa Akta Jual Beli (AJB) dan Akta Hibah, serta sertifikat Hak Milik (SHM), maka gugatan para Penggugat menyangkut pembatalan Akta Jual Beli (AJB), sangat tidak tepat sebab Akta Jual Beli dan Akta Hibah yang merupakan akta autentik dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, maka proses pembatalannya sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, Akta Jual Beli (AJB) harus melalui Peradilan Umum, sedangkan Akta Hibah dan sertifikat Hak Milik (SHM) harus melalui proses Peradilan Tata Usaha Negara;
- c. Bahwa menyangkut gugatan penetapan ahli waris serta pembagian waris, pihak Penggugat pun sangat keliru tidak mengetahui yang mana dimaksud budel waris Hj. Kumala, bahwa pengertian budel waris secara hukum adalah harta yang ditinggalkan (setelah meninggal dunia) yang belum pernah dibagi waris, nah sebagaimana obyek sengketa Penggugat akui bahwa telah dijual Hj. Kumala, namun Penggugat masih memasukkannya sebagai budel waris, apalagi sebagian obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat jelas-jelas telah dibeli oleh sebagian pihak Tergugat (Tergugat X sampai dengan Tergugat XXXII) semasa hidupnya Hj. Kumala, dimana Hj. Kumala sendiri yang menjualnya;

- d. Gugatan Penggugat kurang pihak/kurang lengkap subyek hukumnya, masih ada pihak yang seharusnya ikut dilibatkan tetapi tidak dilibatkan dalam perkara ini;

Maka secara nyata gugatan Penggugat cacat formal atau tidak lengkap, masih ada`pihak yang seharusnya dilibatkan dalam perkara ini namun tidak dilibatkan, hal ini sesuai yang dimaksud : **Yurisprudensi MARI No. 1424/Sip/1975 tanggal 08 Juni 1976:** “Mahkamah Agung Republik Indonesia membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formal tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat tetapi tidak digugat atau dilibatkan dalam perkara ini”.

**Yurisprudensi MARI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 – 7 -1973** “Karena setelah diajukan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri, atas perintah Mahkamah Agung, tanah dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak diterima”.

Itulah tadi bantahan tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat dan akan dibahas satu persatu. Tergugat menyatakan bahwa “penggabungan tiga materi perkara yaitu gugatan pembatalan hibah, gugatan pembatalan jual beli dan penetapan ahli waris serta pembagian waris tidak dapat dibenarkan secara hukum acara dan proses beracara”. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Drs. Idris, M. Hi (Hakim Pengadilan Agama

Sengkang) yang mengatakan bahwa “Tiga perkara tersebut (pembatalan hibah, pembatalan jual beli dan penetapan serta pembagian ahli waris) tidak dibenarkan karena tidak asesor”.<sup>34</sup> Yang dimaksud dengan gugatan asesor adalah gugatan tambahan terhadap gugatan pokok. Tujuannya untuk melengkapi gugatan pokok agar kepentingan penggugat lebih terjamin, meliputi segala hal yang dibenarkan hukum dan perundang-undangan. Gugatan asesor tidak dapat berdiri sendiri, dan oleh karena itu hanya dapat ditempatkan dan ditambahkan dalam gugatan pokok.<sup>35</sup>

Dalam hal ini gugatan yang diajukan berdiri sendiri dan bukan termasuk gugatan asesor tapi merupakan penggabungan gugatan, sehingga yang perlu dianalisa adalah syarat penggabungan yaitu :

- a. Adanya hubungan yang erat dari perkara yang satu dengan yang lainnya atau koneksitas;
- b. Subyek hukum para pihak sama (penggugat dan tergugat);
- c. Prinsip beracara yang cepat dan murah;
- d. Bermanfaat ditinjau dari segi acara (processueel doelmatig).<sup>36</sup>

Objek perkara pembatalan hibah, pembatalan jual beli dan penetapan serta pembagian ahli waris tidak dibenarkan akumulasinya karena ada yang

---

<sup>34</sup>Drs.Idris,S.HI.,M.HI, Hakim Pengadilan Agama Sengkang, *Wawancara*, Pengadilan Agama Sengkang, 13 Juli 2016.

<sup>35</sup>M.Yahya Harahap,S.H.*Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.67.

<sup>36</sup>R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi* (Bandung: Bandar Maju, 2005), h.101.

bersifat contentious dan ada pula yang bersifat voluntair, dalam perkara ini yang bersifat contentious adalah pembatalan hibah dan jual beli yang menentukan jumlah harta warisan yang akan dibagikan maka dari itu dikatakan malwaris dan yang bersifat voluntair yaitu penetapan dan pembagian harta warisan. Dikatakan mengandung perkara voluntair karena dalam petitum penggugat mengatakan “Menetapkan para Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Hj. Kumala binti H. Benawa”, ini merupakan salah satu ciri perkara bersifat voluntair yang mana putusannya bersifat declaratoir dan juga produk pengadilan berupa penetapan<sup>37</sup>. Hal ini dinilai tidak bermanfaat dari segi hukum acara karena dalam perkara contentious dan voluntair memiliki penanganan yang berbeda dalam hukum acara, misalnya upaya hukum yang diajukan dalam perkara kontentiosa adalah banding sedangkan perkara voluntair upaya hukumnya adalah kasasi. Sehingga penggabungan dari ketiga objek gugatan tersebut tidak dibenarkan menurut hukum acara.

Mengenai bantahan tergugat yang pada intinya menyatakan bahwa; yang digugat oleh penggugat menyangkut sengketa hak, maka hal tersebut masuk dalam kompetensi Pengadilan Negeri sehingga Pengadilan Agama Sengkang tidak berwenang mengadili sengketa hak tersebut dan adanya produk hukum berupa Akta Jual Beli (AJB) dan Akta Hibah, serta sertifikat Hak Milik (SHM), maka gugatan para Penggugat

---

<sup>37</sup>Dr. Idris, S.Hi.,M.Hi, Hakim Pengadilan Agama Sengkang, *Wawancara*, Pengadilan Agama Sengkang, 13 Juli 2016.



menyangkut pembatalan Akta Jual Beli (AJB) harus melalui Pengadilan Negeri dan akta Hibah dan Sertifikat Hak Milik di selesaikan di PTUN.<sup>38</sup>

Sebelum membahas mengenai sengketa hak milik dalam perkara ini maka akan dibahas terlebih dahulu pembagian kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri mengenai sengketa hak milik.

Sengketa hak milik atas tanah dalam tata hukum Indonesia merupakan domain atau kewenangan dari Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama dengan perbedaan jangkauan kewenangan pada dua lingkungan peradilan tersebut.<sup>39</sup> Dasar hukum kewenangan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum terdapat dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Sementara itu, kewenangan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama diatur dalam Pasal 50 ayat (2) dan Penjelasan Angka 38 Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kewenangan penyelesaian sengketa hak milik pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum bersifat umum dalam arti menjangkau segala

---

<sup>38</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor perkara : 166/Pdt.G/2015/PA. Skg”, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, <http://www.putusan.mahkamahagung.go.id> (20 Februari 2016).

<sup>39</sup>Drs. H. Aridi, SH.,M.Si.,M. Natsir Asnawi, S.Hi.,*Batasan Kewenangan Pengadilan Dalam Sengketa Hak Milik Atas Tanah*. (31 Maret 2016)

bentuk sengketa hak milik atas tanah. Pengecualian atas hal ini adalah terhadap sengketa hak milik atas tanah yang subjek hukumnya adalah subjek hukum orang-orang yang beragama Islam. Terhadap hal yang terakhir ini, merupakan kewenangan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Hanya saja, perlu dipahami bahwa sekalipun subjek hukumnya adalah orang-orang yang beragama Islam, Pengadilan Agama tidak berwenang menyelesaikan sengketa hak milik dimaksud jika sengketa hak milik tersebut berdiri sendiri, tidak dikumulasikan dengan sengketa lain, misalnya sengketa waris mal waris, sengketa harta bersama, sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, atau sengketa ekonomi syariah.<sup>40</sup>

Kewenangan Peradilan Agama untuk sekaligus mengadili sengketa milik yang terkait dengan objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan legitimasi dari upaya simplifikasi dan unifikasi proses peradilan serta representasi dari asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yahya Harahap dalam hal ini pernah mengemukakan bahwa betapa tidak praktis suatu proses peradilan yang mengharuskan suatu kasus dengan subjek, objek, dan pokok permasalahan yang sama ke dalam dua forum peradilan yang berbeda.<sup>41</sup> Proses peradilan demikian

---

<sup>40</sup>Drs. H. Aridi, SH.,M.Si.,M. Natsir Asnawi, S.Hi.,*Batasan Kewenangan Pengadilan Dalam Sengketa Hak Milik Atas Tanah*.

<sup>41</sup>M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989 Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 173.

tidak menunjukkan karakter hukum yang matang (*maturity of law*) yang bersifat praktis, rasional, dan aktual.

Hal ini menegaskan bahwa perkara hak milik yang berkaitan dan berhubungan dengan objek kewenangan Pengadilan Agama yang terdapat dalam pasal 49 dapat diselesaikan di Pengadilan Agama termasuk perkara 166/Pdt.G/2015/Pa.Skg yang mengakumulasikan perkara pembatalan jual beli, pembatalan hibah dan penetapan ahli waris serta pembagian ahli waris. Namun dalam perkara ini penggabungan perkaranya tidak dibenarkan sehingga beralasan gugatannya tidak dapat diterima. Bantahan tergugat yang mengatakan “menyangkut kekeliruan penggugat terhadap budel waris Hj. Kumala, bahwa pengertian budel waris secara hukum adalah harta yang ditinggalkan (setelah meninggal dunia) yang belum pernah dibagi waris”. Hal ini sejalan dengan pernyataan Drs. Idris, M.Hi (Hakim Pengadilan Agama Sengkang) yang mengatakan bahwa “Budel waris adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris setelah dikeluarkan untuk biaya pemakaman, wasiat dan hibah”.<sup>42</sup> Maka seharusnya harta dari pemberi hibah yang dijadikan budel waris hanya harta yang ditinggalkan saja, dan tidak termasuk tanah yang dijual sendiri oleh si pemberi hibah kepada orang lain karena hal tersebut dilakukan sendiri oleh si pemberi hibah.

---

<sup>42</sup>Dr. Idris, S.Hi.,M.Hi, Hakim Pengadilan Agama Sengkang, *Wawancara*, Pengadilan Agama Sengkang, 13 Juli 2016.

Tergugat juga membantah mengenai “gugatan penggugat kurang pihak/kurang lengkap subyek hukumnya, masih ada pihak yang seharusnya ikut dilibatkan tetapi tidak dilibatkan dalam perkara ini”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 Tanggal 16 Juni 1971, kaidah hukumnya :

Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatannya menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas acara perdata, bahwa hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya.

dan Putusan Mahkamah Agung RI nomor: 1411 K/Sip/1978 tanggal 13 Maret 1979, kaidah hukumnya berbunyi:

Pengikutsertaan pihak ketiga dalam suatu proses perdata yang sedang berjalan, ditentukan oleh ada tidaknya permintaan untuk itu dari para pihak atau pihak ketiga diluar perkara yang merasa berkepentingan.

Sehingga dalam perkara ini penggugat tidak harus memasukkan semua pihak yang tidak dikehendaki namun apabila ada pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut dapat mengikutsertakan diri apabila berkepentingan.

Penggugat sebaiknya menjelaskan dalam posita mengenai semua ahli waris yang tidak terhalang agar dapat dilihat posisinya meskipun tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>Dr. Idris, S.Hi.,M.Hi, Hakim Pengadilan Agama Sengkang, *Wawancara*, Pengadilan Agama Sengkang, 13 Juli 2016.

## 5. Proses Pengambilan Putusan oleh Majelis Hakim

Setelah penggugat mengemukakan bantahannya dalam eksepsi dan duplik maka giliran hakim memberikan keputusan. Dalam pengambilan keputusan hakim diwajibkan untuk adil oleh karena itu harus melalui proses pengambilan putusan, yaitu :

### a. Musyawarah majelis hakim

Musyawarah majelis hakim merupakan perundingan yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap perkara yang diajukan. Dalam musyawarah ini setiap hakim memiliki hak yang sama dalam hal :<sup>44</sup>

- 1) Mengkontrahir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak dengan melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadi peristiwa hukum.

Mengkontrahir yaitu upaya majelis hakim untuk mengungkap dalil-dalil yang ditemukan oleh Penggugat di dalam posita surat gugatan, jawaban Tergugat dalam eksepsi, dalam pokok perkara. Selanjutnya replik, duplik, dan selanjutnya kemampuan para pihak memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dari Penggugat dan bantahan tergugat, sehingga dalil-dalil dari Penggugat

---

<sup>44</sup>Dr. Idris, S.Hi.,M.Hi, Hakim Pengadilan Agama Sengkang, *Wawancara*, Pengadilan Agama Sengkang, 13 Juli 2016.

dan bantahan dari Tergugat jelas bagi majelis hakim, mana yang fakta dan mana yang hanya sekedar asumsi para pihak.<sup>45</sup>

- 2) Mengkualifisir peristiwa hukum artinya adalah menggolongkan peristiwa hukum,
- 3) Mengkonstituir yaitu menetapkan keadilan kepada para pencari keadilan.

#### b. Metode Penemuan Hukum

Penemuan hukum merupakan hal yang paling sulit dilaksanakan. Karena hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*), padahal hakim tidak mengetahui semua hukum, sebab hukum itu banyak ragamnya, ada yang tertulis ada pula yang tidak tertulis. Tetapi hakim harus mengadili dengan benar.

Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim yang menanggapi perkara nomor 166/Pdt.G/2015/Pa.Skg memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :<sup>46</sup>

#### **Eksepsi I:**

Pada halaman pertama tentang perihal gugatan, pihak Penggugat mengajukan tiga macam perkara atau penggabungan tiga materi perkara yaitu gugatan pembatalan hibah, gugatan pembatalan jual beli dan penetapan ahli waris serta pembagian waris; Hal mana menurut Tergugat adalah suatu hal yang

---

<sup>45</sup>Drs.H.Wildan Suyuthi, SH.,MH.,*Teknik Pembuatan Putusan*, diskusi pembinaan hakim tanggal 17 Mei 2016 di 6 Askor.

<sup>46</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor perkara : 166/Pdt.G/2015/PA. Skg”, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, <http://www.putusan.mahkamahagung.go.id> (20 Februari 2016).

tidak wajar, tidak semestinya, apalagi dalam hal kompetensi dalam tiga materi pokok perkara tersebut, sementara Penggugat dalam repliknya halaman 2 alinea pertama, menyatakan bahwa adanya kumulasi gugatan ini secara hukum adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan satu sama lain sangat terkait sehingga secara hukum harus bersamaan atau dikumulasi dalam gugatan ini karena hak waris para Penggugat hanya bisa dicapai, melekat dan mendapatkan hak waris apabila terlebih dahulu ada pembatalan hibah dan pembatalan akta jual-beli yang telah dilakukan oleh alm. Hj. Kumala;

**Eksepsi selanjutnya:**

- a. Adanya para Tergugat X sampai dengan Tergugat XXXII punya dasar kepemilikan hak autentik berupa Akta Jual Beli (AJB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM), hal ini menyakut sengketa hak, maka hal tersebut masuk dalam kompetensi Pengadilan Negeri sehingga Pengadilan Agama Sengkang tidak berwenang mengadili sengketa hak tersebut; sementara Penggugat dalam repliknya menyatakan **tidak benar** Tergugat X s/d XXXII punya dasar kepemilikan hak autentik didalilkan sebagai sengketa kepemilikan karena apa yang diuraikan dalam gugatan adalah asal seluruh obyek sengketa harta warisan dari alm. Hj. Kumala, sehingga secara hukum gugatan ditujukan kepada Pengadilan Agama Sengkang sebagai wewenang untuk mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing menyatakan bahwa sebagian obyek sengketa telah berada dan dikuasai oleh Tergugat X s/d Tergugat XXXII dengan peralihan hak melalui jual beli dari alm. Hj. Kumala ketika masih hidup kepada para Tergugat X s/d XXXII, (**Penggugat** dalam posita gugatannya point 6 halaman 9, sedang **Tergugat** dalam jawaban/eksepsinya point I.a. hal 2) dan salah satu materi gugatan Penggugat adalah pembatalan akta jual-beli yang ada di tangan para Tergugat X s/d XXXII tersebut (sebagaimana dalam petitum gugatan point 8), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum selaku pembeli yang beritikad baik harus dilindungi haknya, sementara menyangkut pembatalan akta jual beli tidak masuk dalam wewenang Pengadilan Agama, sehingga majelis menilai eksepsi Tergugat sepanjang materi perkara pembatalan akta jual-beli beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam repliknya bahwa hak waris Penggugat hanya bisa dicapai apabila terlebih dahulu ada pembatalan akta hibah dan pembatalan akta jual-beli, sementara pembatalan akta jual-beli bukan wewenang Pengadilan Agama, maka Majelis menilai gugatan Penggugat tersebut tidak jelas/kabur karena bergantung pada adanya pembatalan akta jual beli yang harus diselesaikan terlebih dahulu di luar Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa **gugatan Penggugat tidak jelas/kabur**, cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang **gugatan Penggugat tidak jelas/kabur** cukup beralasan untuk dikabulkan, maka eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

**Dalam pokok perkara:**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang **tidak jelasnya gugatan** dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan cacat hukum, yakni kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang kewarisan, maka sesuai dengan Pasal 192 R.Bg, biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

Dalam eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat beralasan hukum;
- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.8.456.000,00 (delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Melihat dari putusan diatas, pertimbangan hakim yang menyatakan;

Bergantung pada adanya pembatalan akta jual beli yang harus diselesaikan terlebih dahulu di luar Pengadilan Agama dan hak waris penggugat hanya bisa dicapai apabila terlebih dahulu ada pembatalan akta hibah dan akta jual beli.<sup>47</sup>

Dalam putusan ini tidak dijelaskan secara rinci mengenai peraturan ataupun Undang-Undang yang melandasi kalimat tersebut seharusnya dicantumkan peraturan atau Undang-Undang yang mengaturnya. Sesuai pasal 184 ayat (2) HIR menegaskan, apabila putusan didasarkan pada aturan undang-undang yang pasti maka aturan itu harus disebut.

Pembatalan akta jual beli tanah merupakan sengketa hak milik, kewenangan penyelesaian sengketa hak milik pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum bersifat umum dalam arti menjangkau segala bentuk sengketa hak milik atas tanah. Pengecualian atas hal ini adalah terhadap sengketa hak milik atas tanah yang subjek hukumnya adalah subjek hukum orang-orang yang beragama Islam. Terhadap hal yang terakhir ini, merupakan kewenangan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Hanya saja, perlu

---

<sup>47</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor perkara : 166/Pdt.G/2015/PA. Skg", *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, <http://www.putusan.mahkamahagung.go.id> (20 Februari 2016).

dipahami bahwa sekalipun subjek hukumnya adalah orang-orang yang beragama Islam, Pengadilan Agama tidak berwenang menyelesaikan sengketa hak milik dimaksud jika sengketa hak milik tersebut berdiri sendiri, tidak dikumulasikan dengan sengketa lain, misalnya sengketa waris mal waris, sengketa harta bersama, sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, atau sengketa ekonomi syariah.

Kewenangan Peradilan Agama untuk sekaligus mengadili sengketa milik yang terkait dengan objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 merupakan legitimasi dari upaya simplifikasi dan unifikasi proses peradilan serta representasi dari asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yahya Harahap dalam hal ini pernah mengemukakan bahwa betapa tidak praktis suatu proses peradilan yang mengharuskan suatu kasus dengan subjek, objek, dan pokok permasalahan yang sama ke dalam dua forum peradilan yang berbeda.<sup>48</sup> Proses peradilan demikian tidak menunjukkan karakter hukum yang matang (*maturity of law*) yang bersifat praktis, rasional, dan aktual.

Menurut analisis penulis, putusan hakim yang menyatakan bahwa “gugatan tergugat tidak dapat diterima” hanya menekankan pada salah satu aspek bahwa perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam

---

<sup>48</sup>M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989 Edisi Kedua*, h. 173.

repliknya bahwa hak waris Penggugat hanya bisa dicapai apabila terlebih dahulu ada pembatalan akta hibah dan pembatalan akta jual-beli, sementara pembatalan akta jual-beli bukan wewenang Pengadilan Agama, maka Majelis menilai gugatan Penggugat tersebut tidak jelas/kabur karena bergantung pada adanya pembatalan akta jual beli yang harus diselesaikan terlebih dahulu di luar Pengadilan Agama;<sup>49</sup>

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Pasal 50 ayat (2) dan Penjelasan Angka 38 Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menjelaskan bahwa sengketa hak milik yang berkaitan dengan kewenangan absolute Pengadilan Agama dalam pasal 49 diselesaikan di Pengadilan Agama selama subjek nya antara orang beragama Islam.

Majelis Hakim tidak begitu memperjelas dan mempertimbangkan lebih lanjut penggabungan objek perkara yang diajukan penggugat. Padahal hal tersebut juga dimasukkan dalam eksepsi tergugat yang mengatakan;

....penggabungan tiga materi perkara yaitu gugatan pembatalan hibah, gugatan pembatalan jual beli dan penetapan ahli waris serta pembagian waris tidak dapat dibenarkan secara hukum acara dan proses beracara.

Penggabungan perkara yang dilakukan oleh penggugat yaitu menggabungkan perkara kontentius dan voluntair yang tidak dibenarkan hukum acara, maka dari itu seharusnya dipisahkan antara perkara kontentius dan voluntair namun penyelesaiannya di Pengadilan Agama bukan menyelesaikannya diluar Pengadilan Agama.

---

<sup>49</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor perkara : 166/Pdt.G/2015/PA. Skg”, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, <http://www.putusan.mahkamahagung.go.id> (20 Februari 2016).

Dalam perkara ini yang bersifat kontentius adalah pembatalan hibah dan jual beli yang menentukan jumlah harta warisan yang akan dibagikan maka dari itu dikatakan malwaris dan yang bersifat voluntair yaitu penetapan dan pembagian harta warisan. Dikatakan mengandung perkara voluntair karena dalam petitum penggugat mengatakan; “Menetapkan para Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Hj. Kumala binti H. Benawa,” ini merupakan salah satu ciri perkara bersifat voluntair yang mana putusannya bersifat declaratoir dan juga produk pengadilan berupa penetapan<sup>50</sup>. Hal ini dinilai tidak bermanfaat dari segi hukum acara karena dalam perkara contentious dan voluntair memiliki penanganan yang berbeda dalam hukum acara, misalnya upaya hukum yang diajukan dalam perkara kontentius adalah banding sedangkan perkara voluntair upaya hukumnya adalah kasasi. Sehingga penggabungan dari ketiga objek gugatan tersebut tidak dibenarkan.

Adapun yurisprudensi yang dapat menjadi pertimbangan yaitu adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 677 K/Sip/1972 Tanggal 13 Desember 1972, kaidah hukumnya berbunyi: “Dalam perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya tetapi masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak boleh digabungkan” dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1652 K/Sip/1975 tanggal 22 September 1976, kaidah hukumnya berbunyi:

---

<sup>50</sup>Dr. Idris, S.Hi.,M.Hi, Hakim Pengadilan Agama Sengkang, *Wawancara*, Pengadilan Agama Sengkang, 13 Juli 2016.

“Kumulasi dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan lainnya tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku”



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

1. Kedudukan hukum tanah hibah sebagai harta warisan setelah diperjualbelikan, bahwa tanah yang dahulu nya dimiliki oleh si penghibah lalu dihibahkan kepada ahli warisnya dialihkan lagi dengan cara jual beli oleh si penghibah sendiri dan dilakukan pula oleh ahli waris yang menerima hibah tersebut. Untuk objek tanah yang di hibahkan oleh si penghibah lalu dialihkan lagi dengan cara jual beli oleh penghibah sendiri maka secara tidak langsung si pemberi hibah tersebut telah menarik kembali hibah yang diberikan dan memenuhi pasal 1668 KUHPerdara sehingga mengakibatkan peristiwa hibah tersebut batal demi hukum, yang berarti hibah sebelumnya kembali menjadi hak pemberi hibah. Jadi jual beli yang dilakukan oleh si pemberi hibah kepada pihak lain dianggap sah karena telah terpenuhi syarat materill maupun syarat formilnya yang dibuktikan dengan pihak pembeli telah memiliki AJB (Akta Jual Beli) dan SHM (Sertifikat Hak Milik), sehingga objek tanah tersebut tidak dapat dimasukkan sebagai budel waris seperti yang dituntut oleh penggugat. Beda hal nya dengan hibah yang dialihkan dengan cara jual beli oleh si penerima hibah yang juga ahli warisnya, meskipun dilakukan di hadapan PPAT dan memiliki akta hibah yang otentik masih memungkinkan digugat oleh ahli waris lain untuk dibatalkan karena proses pemberian

hibah yang melebihi dari 1/3 harta pemberi hibah dapat ditarik kembali menjadi harta warisan. Hal ini juga memungkinkan peristiwa jual beli nya dibatalkan karena SHM masih atas nama si pemberi hibah.

2. Pertimbangan hakim dalam memutus sengketa tanah hibah yang diperjualbelikan dalam putusan Nomor 166/ Pdt.G/ 2015/ PA Skg di Pengadilan Agama Sengkang dalam hal ini, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Pasal 50 ayat (2) dan Penjelasan Angka 38 Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menjelaskan bahwa sengketa hak milik yang berkaitan dengan kewenangan absolute Pengadilan Agama dalam pasal 49 diselesaikan di Pengadilan Agama selama subjek nya antara orang beragama Islam dan Majelis Hakim tidak begitu memperjelas serta lebih mempertimbangkan penggabungan objek perkara yang diajukan penggugat. Padahal hal tersebut juga dimasukkan dalam eksepsi tergugat.

#### **B. Implikasi Penelitian**

1. Perlu adanya sosialisasi maupun penyuluhan hukum yang dilakukan dalam masyarakat mengenai pengelolaan harta peninggalan agar masyarakat lebih mengetahui dan memahami permasalahan kewarisan dan hibah yang terjadi di keluarga.
2. Perlu adanya ketelitian hakim Pengadilan Agama dalam mempertimbangkan dan memutus permasalahan mengenai sengketa hak



milik yang berkaitan dengan kewenangan absolute Pengadilan Agama. Karena tidak menutup kemungkinan akan ada banyak permasalahan baru mengenai hak milik yang muncul dalam masyarakat yang berkaitan dengan kewenangan absolute Pengadilan Agama.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Aburaera, Sukarno. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Makasar: Arus Timur Makassar, 2012.

al-Jawad, Ahmad 'Abd. *Usul 'Ilm al-Mawaris*. Beirut: Dar al-Jil, 1986.

Angga, "Batal demi hukum merupakan sanksi perdata terhadap suatu perbuatan hukum yang mengandung cacat yuridis", [http://www.academia.edu/10886061/Batal\\_demi\\_hukum\\_merupakan\\_sanksi\\_perdata\\_terhadap\\_suatu\\_perbuatan\\_hukum\\_yang\\_mengandung\\_cacat\\_yuridis](http://www.academia.edu/10886061/Batal_demi_hukum_merupakan_sanksi_perdata_terhadap_suatu_perbuatan_hukum_yang_mengandung_cacat_yuridis), (16 Juli 2016).

Anto, Hendrie, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Yogyakarta : Ekonisia, 2005.

Aridi dan M. Natsir Asnawi. *Batasan Kewenangan Pengadilan Dalam Sengketa Hak Milik Atas Tanah*. Jurnal Online diakses 31 Maret 2016.

Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *2002 Mutiara Hadist*. Jilid VII. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Aziz Muhammad Azzam, Abdul. *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*. Jakarta : Amzah, 2010.

Bafadhal, Faizah, "Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan kewarisan dan Pembatalan Hibah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia", (31 Maret 2016).

Chairiumam Pasaribu, Suharwadi. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 1996.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171 huruf (b), (c), dan (e).

Esterberg, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2002.

Fatchur Rahman, *Hukum Waris*, h. 82.

fitwiethayalisiyi, "penelitian kualitatif (metode pengumpulan data)" <https://fitwiethayalisiyi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/penelitian-kualitatif-metodepengumpulan-data/>. (24 November 2015)

Gaffar, Abdul, *Hibah Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Samata: Alauddin University Press, 2013

Gottschalk, Louis. *Understanding History; A Primer of Historical Method* (terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press. 1998.

Gunawan, Caroline. "Peranan PPAT dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Hak Milik", *Tesis*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

- Harahap, M Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989 Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Acara Perdata*,. Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Helmi, Karim. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,1993.
- Herdiansyah, Haris. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ILMU Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Ibin, Dede “*Hibah, Fungsi dan Korelasinya dengan Kewarisan*”. <http://www.google.co.id/search?sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=dede+ibin>. (31 Maret 2016)
- Indonesia Legal Center Publishing, *Undang-undang Peradilan Agama*. Cet.II; Jakarta: CV.Karya Gemilang, 2009.
- Irfany, Mukhlis. “Penarikan Kembali Hibah yang telah dituangkan dalam Akta Notaris oleh Pemberi Hibah”, *Tesis* . Yogyakarta: Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada , 2012.
- Ismaya, Samun. *Pengantar Hukum Agraria*. Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet. I, 2011.
- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : PT.Sinergi Pustaka Indonesia,2014.
- Lexy J. Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor perkara : 166/Pdt.G/2015/PA. Skg”, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, <http://www.putusan.mahkamahagung.go.id>
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mardani ,*Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta :Sinar Grafika, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Mujahidin, DR,MH, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata*. Jakarta: IKAHI, Cet.I, 2008.
- Pengadilan Agama Sengkang, “Info Perkara Pengadilan Agama Sengkang”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Sengkang*.[http://www.pasengkang.net/index.php?option=com\\_content&view=article&id=34&Itemid=78](http://www.pasengkang.net/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=78) (23 April 2016).

- Pengadilan Agama Sengkang, “Profil Pengadilan Agama Sengkang”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Sengkang*. [http://www.pasengkang.net/index.php?option=com\\_content&view=article&id=34&Itemid=78](http://www.pasengkang.net/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=78) (23 April 2016).
- Pengadilan Agama Sengkang, “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sengkang”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Sengkang*. [http://www.pasengkang.net/index.php?option=com\\_content&view=article&id=34&Itemid=78](http://www.pasengkang.net/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=78) (23 April 2016).
- Pengadilan Agama Sengkang, “Tupoksi Pengadilan Agama Sengkang”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Sengkang*. [http://www.pasengkang.net/index.php?option=com\\_content&view=article&id=34&Itemid=78](http://www.pasengkang.net/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=78) (23 April 2016).
- Pengadilan Agama Sengkang, “Visi dan Misi Pengadilan Agama Sengkang”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Sengkang*. [http://www.pasengkang.net/index.php?option=com\\_content&view=article&id=34&Itemid=78](http://www.pasengkang.net/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=78) (23 April 2016).
- Pengadilan Agama Sengkang, “Yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Sengkang*. [http://www.pasengkang.net/index.php?option=com\\_content&view=article&id=34&Itemid=78](http://www.pasengkang.net/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=78) (23 April 2016).
- R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Bandar Maju, 2005.
- Ramulyo, Muh. Idris. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.
- Ria, Wati Rahmi, *Aspek Yuridis Tentang Hukum Waris Islam*. Lampung: Universitas Lampung, 2008.
- S. Nasution, *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, Juz III.
- Seknun, Maulana Yusuf “Penyelesaian Sengketa Hibah di Pengadilan Agama Makassar (Studi Kasus Putusan No.1497 /Pdt.G/ 2012/ PA.Mks)”, *skripsi*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014.
- Soebakti, R dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
- Soekanto, Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press, 1984.
- Sri, Endang. *Pelaksanaan pembatalan hibah tanah oleh pemberi hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No.95 /Pdt.G/2004 /PN SMG)*, *Tesis*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2009.

- Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfa Beta, 2009.
- Suhendo, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajawali Press, 2014.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya* . Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Suyuthi, Wildan. *Teknik Pembuatan Putusan*, diskusi pembinaan hakim tanggal 17 Mei 2016 di 6 Askor
- Syafiie Hassanbasri. 2001. *Ensiklopedia Islam, Hibah*. Kompas. Jakarta, 3 Oktober 2001 .
- Syahrani, Riduan. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Syaodih, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya, 2006
- Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung: PT Pionir Java Bandung, 2000.
- Wirartha, I Made. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Beirut : Dar al-fikr, Tth, Juz V.  
([http ://www.notarisrudi ,com/?m=layanan](http://www.notarisrudi.com/?m=layanan)) 31 Maret 2016

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Agama Sengkang No. 166/Pdt.G/2015/Pa Skg
2. Surat Keterangan telah melakukan penelitian
3. Pedoman Wawancara
4. SK Pembimbing
5. SK Penguji Hasil
6. Pengesahan Draft Skripsi
7. Persetujuan Pembimbing
8. Dokumentasi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 166 /Pdt.G/2015/PA Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Gugatan Pembatalan Hibah, Pembatalan Jual-beli dan Penetapan ahli waris serta pembagian warisan antara:

1. **Hj. Indo Anja binti Ambo Oga**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Lapaddaga, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Penggugat I**.
2. **Hj. Maryam binti Ambo Oga**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Lesangi, Rt.001/RW.001, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Penggugat II**.
3. **Hj. Azisah binti Ambo Oga**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Lapaddaga, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Penggugat III**.
4. **H. Burhanuddin bin Ambo Oga**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No.20, Kelurahan Terang-terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Penggugat IV**.
5. **H. Ambo Tang bin Ambo Oga**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Tolumi, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Penggugat V**.
6. **Juddawiah binti H. Abu Bakar**, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di jalan Jenderal Sudirman No. 20,

Hal. 1 dari 35 hal. Put.No.166/Pdt.G/2015/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Terang-terang, Kecamatan Ujung Bulu, kabupaten Bulukumba, sebagai **Penggugat VI**.

7. **Hj. Warda binti H. Abu Bakar**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di lingkungan Tolumi, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Penggugat VII**.

8. **Ilmu Edi bin H. Umar**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di BTN Tae blok JJ, Kelurahan Amessangen, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Penggugat VIII**

9. **Heriadi bin H. Umar**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Bau Munawwarah, No. 51, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Penggugat IX**.

10. **Herlina binti H. Umar**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Bau Munawwarah No. 51, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Penggugat X**.

11. **Hj. Syahidah binti H. Umar, umur 28 tahun**, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Bau Munawwarah No. 51, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Penggugat XI**.

12. **Agus Salim bin Muhammadong**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan K.H. Muh. Ramli no 53, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Penggugat XII**.

13. **Heri Utari bin Muhammadong**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di BTN Somba Opu, Blok L No.2, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, sebagai **Penggugat XIII**.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **Najemia binti Muhammadong**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sirsak, Desa Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara selanjutnya sebagai **Penggugat XIV**.

15. **Muhammad. Ilyas bin Muhammadong**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di BTN Somba Opu Blok I No.2, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, disebut **Penggugat XV**.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Hamka Jarod, S.H.** dan **Muh. Nursal, SH.**, Advokat/Pengacara, yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim No. 40, Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar berdasarkan sura kuasa khusus Nomor: 8/SK/PA.Skg/I/2015, tertanggal 13 Januari 2015.

melawan

1. **Hj. Andi Gusti binti Muhammadong**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di jalan Lapawennari (sebelah Barat Masjid Tarbiyah), Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat I**.
2. **Andi Senni binti Muhammadong**, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di jalan Lapawennari (sebelah Barat Masjid Tarbiyah, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat II**.
3. **Andi Samang bin Muhammadong**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di BTN I, Kelurahan Tanah Konkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Tergugat III**.
4. **Hj. Andi Hujriyah binti Muhammadong**, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di BTN I, Kelurahan Tanah Konkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Tergugat IV**.

Hal. 3 dari 35 hal. Put.No.166/Pdt.G/2015/PA Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Andi Abd Rahman bin Muhammadong, agama Islam**, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jambu, Lr.1, Kelurahan Tanah Konkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Tergugat V**.
6. **Andi Uleng bin A. Mappanyukki, umur 34 tahun**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Lapawennari (sebelah Barat Masjid Tarbiyah, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat VI**.
7. **Andi Sulung bin A. Mappanyukki, umur 32 tahun**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Lapawennari (sebelah Barat Masjid Tarbiyah, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat VII**.
8. **Andi Pawiloi bin A. Mappanyukki, umur 33 tahun**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Lapawennari (sebelah Barat Masjid Tarbiyah, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat VIII**.
9. **Andi Sangaji bin A. Mappanyukki**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wirasawsta, bertempat tinggal di jalan Lapawennari (sebelah Barat Masjid Tarbiyah, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat IX**.
10. **Mappaneddin**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Lembu I, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat X**.
11. **Sa'ali, umur 30 tahun**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Lembu, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat XI**.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **H. Askar, umur 29** tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Udang, Kelurahan Watanglepue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat XII**
13. **Sanna, umur 31** tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Lapaddaga, Kelurahan Watanglepue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat XIII**.
14. **Ichal, H.N umur 36** tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Radeng Ajeng Kartini, No. 36, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat XIV**,
15. **Yunita, S.Pd, umur 46** tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Lembu, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat XV**.
16. **Hj. Nurwilis, umur 42** tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Palaguna, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat XVI**.
17. **Muh. Asbi Abbas, umur 32** tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jawa No. 37-39, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat XVII**.
18. **Faisal Sade, SE, umur 37** tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jawa No. 13, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat XVIII**.
19. **Hj. Sunarti, umur 38** tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Baru Orai, Kelurahan Laelo, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat XIX**.
20. **Suriani, umur 28** tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bakke Orai, Kelurahan Salo Manraleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat XX**.

Hal. 5 dari 35 hal. Put.No.166/Pdt.G/2015/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21. Muhammad Nasrul Abbas**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jawa Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat XXI**.
- 22. Andi Besse Sahri Alam**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bun Tomo, RT/RW 013, Kelurahan Baka, Kecamatan Samarinda, Seberang Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat XXII**.
- 23. Arifuddin**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Empat Lima Utara, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat XXIII**.
- 24. Muchtar H. Sake**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Amanagappa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat XXIV**.
- 25. M. Yunus**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bau Munawwarah, Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat XXV**.
- 26. Hj. Masati**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bau Munawwarah, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat XXVI**.
- 27. Akas, S.Sos**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Andi Macca Amirullah No. II, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat XXVII**.
- 28. Herman**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bau Baharuddin, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat XXVIII**.
- 29. Andy Usman**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Andi Macca Amirullah, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat XXIX**.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30. Muh. Zakir, umur 44** tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Andi Paggaru, Lr. I, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat XXX.**
- 31. Hj. Asmayanti, umur 31** tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raden Ajeng Kartini No. 150, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat XXXI.**
- 32. Ikhwan, umur 30** tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jenderal sudirman, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat XXXII.**
- 33. H. Suhandi,** agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Macan, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat XXXIII.**
- 34. Rismayani,** agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Macan, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat XXXIV.**
- 35. Fathul Abbas,** agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Macan, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat XXXV.**
- 36. Muh. Sadikin,** agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Macan, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat XXXVI.**
- 37. Kepala Wilayah Kecamatan Tempe, selaku PPAT** dengan alamat Kantor Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **turut Tergugat.**

Dalam hal ini Tergugat I, II, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVIII, XXI, XXIII, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXV dan XXXVI memberikan kuasa kepada **H.M. Yunus Naru, SH., dan Sarifa Nabila, SH.,** Advokat/Konsultan Hukum,

Hal. 7 dari 35 hal. Put.No.166/Pdt.G/2015/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jl. Lasangkuru No. 47 Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 April 2015 Nomor 48/SK.PA Skg/IV/2015.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak-pihak yang berperkara.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 2 Februari 2015 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah Hj. Kumala binti H. Benawa, telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2012 dan H. Benawa dan istrinya yang bernama Hj. Indo Tuwo adalah orang tua dari Hj. Kumala, keduanya sudah meninggal dunia, dimana H. Benawa meninggal pada tahun 1974, sedangkan Hj. Indo Tuwo meninggal pada tahun 1969;
2. Bahwa alm. Hj. Kumala binti H. Benawa semasa hidupnya tidak pernah menikah namun mempunyai ahli waris, yakni saudara-saudara kandungnya:
  - a. Hj. Subaeda binti H. Benawa  
Bahwa Hj. Subaedah binti H. Benawa meninggal tahun 2003, semasa hidupnya menikah dengan Ambo Oga yang meninggal tahun 1979 dikaruniai anak yang masing-masing bernama:
    - 1). Hj. Indo Anja binti Ambo Oga, perempuan masih hidup (Penggugat I)
    - 2). Hj. Maryam binti Ambo Oga, perempuan masih hidup (Penggugat II)
    - 3). Hj. Indo Upe binti Ambo Oga, perempuan meninggal dunia tahun 2009;  
Alm. Hj. Indo Upe binti Ambo Oga semasa hidupnya menikah dengan H. Zakariah yang meninggal dunia tahun 2012 dikaruniai anak yang masing-masing bernama:
      - a) H. Ambo Dai bin H. Zakariah, laki-laki masih hidup

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Hj. Erni binti H. Zakariah, perempuan masih hidup
  - c) Alamsyah bin H. Zakariah, laki-laki masih hidup
  - d) Eka binti H. Zakariah, perempuan masih hidup
- Anak alm. Hj. Indo Upe binti Ambo Oga tidak termasuk ahli waris dari Hj. Kumala karena lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris
- 4). Hj. Azisa binti Ambo Oga, perempuan masih hidup (Penggugat III)
  - 5). H. Burhanuddin bin Ambo Oga, laki-laki masih hidup Penggugat IV)
  - 6). H. Ambo Tang bin Ambo Oga, laki-laki masih hidup (Penggugat V)
- b. Hj. Indo Coma binti H. Benawa, perempuan meninggal dunia pada tahun 1993, semasa hidupnya menikah dengan H. Abu Bakar yang meninggal dunia tahun 1972, dikaruniai anak yang masing-masing bernama:
- 1). Juddawiah binti H. Abu Bakar, perempuan masih hidup (Penggugat VI)
  - 2). Hj. Wardah binti H. Abu Bakar, perempuan masih hidup (Penggugat VII)
- c. Muhammadong bin H. Benawa, laki-laki meninggal dunia pada tahun 2006, semasa hidupnya menikah dengan Andi Geddong sebagai istri pertama yang meninggal pada tahun 1970 dikaruniai anak masing-masing bernama:
- 1). Hj. Gusti binti Muhammadong, perempuan masih hidup (Tergugat I)
  - 2). Hj. Senni binti Muhammadong, perempuan masih hidup (tergugat II)
  - 3). A. Samang bin Muhammadong, laki-laki masih hidup (Tergugat III)
  - 4). Hj. Hujeriah binti Muhammadong, perempuan masih hidup Tergugat IV)
  - 5). Abd. Rahman bin Muhammadong, laki-laki masih hidup (Tergugat V).
- Alm. Muhammadong bin H. Benawa meninggal dunia tahun 2006, semasa hidupnya menikah dengan Indo Sengngeng sebagai istri kedua, dikaruniai anak bernama:
- 1). Agus Salim bin Muhammadong, laki-laki masih hidup (Penggugat XII)

Hal. 9 dari 35 hal. Put.No.166/Pdt.G/2015/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Heri Utari binti Muhammadong, perempuan masih hidup (Penggugat XIII)
- 3). Najemiah binti Muhammadong, perempuan masih hidup (Penggugat XIV)
- 4). Muh. Ilyas bin Muhammadong, laki-laki masih hidup (Penggugat XV).
- d. H. Palli bin H. Benawa, meninggal tahun 2010 semasa hidupnya menikah dengan H. Umar dan dikaruniai anak masing-masing bernama:
  - 1). Ilmu Edi bin H. Umar, laki-laki masih hidup (Penggugat VIII)
  - 2). Heriadi bin H. Umar, laki-laki masih hidup (Penggugat IX)
  - 3). Herlina binti H. Umar, perempuan masih hidup (Penggugat X)
  - 4). Syahidah binti H. Umar, perempuan masih hidup (Penggugat XI).
3. Bahwa alm. Hj. Kumala binti H. Benawa disamping meninggalkan ahli waris tersebut, juga meninggalkan harta warisan berupa:
  - a. Sebidang tanah dan bangunan seluas 1.400 m2 sertifikat hak milik Nomor 529/Desa Tempe atas nama Hj. Kumala Benawa, persil 311, kohir 266 CI No. Urut 62 Blok 57 terletak di Jl. Lapawennari (sebelah Barat Masjid Tarbiyah), Lingkungan Bulu Tempe, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Lorong
    - Sebelah Timur : Jalan Lapawennari
    - Sebelah Selatan : Tanah H. Ambo Tang
    - Sebelah Barat : Tanah H. Habe JajeSelanjutnya disebut obyek sengketa I.
  - Obyek sengketa ini dikuasai oleh para Tergugat I, II, III, IV, V dan para Tergugat VI, VII, VIII, IX.
  - b. sebidang tanah perumahan seluas 10.025 m2 karena adanya pembebasan ganti rugi jalanan sehingga tersisa  $\pm$  8.020 m2, hak milik Hj. Kumala Benawa sertifikat tanah hak milik Nomor 655/Kel. Tempe, terletak di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah H. Muh. Saleng

Sebelah Timur : Jalanan

Sebelah Selatan : Tanah Abd. Motalib

Sebelah Barat : Jalan Lembu II

Selanjutnya disebut obyek sengketa II

Obyek sengketa ini dikuasai oleh para Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII;

- c. Sebidang tanah perumahan seluas  $\pm 6.500 \text{ m}^2$ , sertifikat hak milik Hj. Kumala Benawa, persil 80II, kohir 290 CI, Blok 56 No. Urut 8 terletak di Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : BTN H. Sutomo

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Selatan : BTN H. Sutomo

Sebelah Barat : BTN H. Sutomo

Selanjutnya disebut obyek sengketa III

Obyek sengketa ini dikuasai oleh para Tergugat VIII, XXXIII, XXXIV, XXXV dan XXXVI.

Bahwa harta-harta peninggalan alm. Hj. Kumala binti Benawa sebagaimana diuraikan di atas masih dalam bentuk budel warisan dan belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya.

- 4 Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa dalam penguasaan para Tergugat baik secara fisik maupun surat-suratnya dan kondisi pewaris pada saat diterbitkannya hibah dalam keadaan sakit atau tidak sehat atau tidak normal sehingga pihak para Tergugat sangat leluasa mengambil kesempatan agar

Hal. 11 dari 35 hal. Put.No.166/Pdt.G/2015/PA Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris melakukan hibah tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya dan tanpa hadirnya ahli waris lainnya atau tanpa persetujuan ahli waris lainnya, karena sangat beralasan hukum sebab seluruh ahli waris lainnya khususnya para Penggugat tahu persis bila kondisi alm. Hj. Kumala binti H. Benawa sejak tahun 2006 telah jatuh sakit sampai meninggal dunia, sehingga untuk melakukan perbuatan hukum berupa hibah harus disertai oleh ahli waris lainnya. Menurut Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

“Hibah yang akan diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit atau dekat dengan kematian maka harus mendapat persetujuan dengan ahli waris lainnya”.

5. Akan tetapi sungguh sangat ironis ada itikad buruk tergambar dari Tergugat I usaha untuk menguasai, memiliki harta warisan secara sepihak, dan usaha menghilangkan hak waris lainnya karena pada tanggal 14 Mei 2008 hibah terjadi secara diam-diam faktanya terbit akta hibah mencakup seluruh harta dan melebihi 1/3 harta peninggalan Hj. Kumala binti Benawa yang dihibahkan kepada masing-masing anak Tergugat I yaitu : Tergugat VI, VII, VIII dan IX serta alm. Andi Pajung;
6. Bahwa lebih ironis lagi selanjutnya terbit lagi peralihan hak yang dilakukan Hj. Kumala binti H. Benawa, peralihan hak berdasarkan jual-beli di atas tanah obyek sengketa II dan III artinya selain dengan cara hibah yang dilakukan oleh pemberi hibah (Hj. Kumala binti H. Benawa) kepada Tergugat VI, VII, VIII, IX dan alm. A. Pajung, lalu kemudian Hj. Kumala Benawa binti H. Benawa melakukan lagi peralihan hak dengan cara jual beli kepada para Tergugat X s/d XXXII di atas tanah obyek sengketa II, sehingga terjadi peralihan berganda yaitu seperti didalilkan di atas, baik dialihkan dengan cara hibah maupun dengan cara jual beli, maka dari itu Hj. Kumala tidak dapat diragukan lagi bahwa pewaris dalam kondisi sakit atau tidak sehat atau tidak normal karena mengalihkan dua kali obyek tanah sengketa II yaitu selain dengan cara hibah kepada Tergugat VI, VII, VIII, IX dan alm. Andi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajung, juga mengalihkan dengan cara jual-beli kepada para Tergugat X s/d XXXII;

7. Bahwa juga sangat ironis sekali tanah sengketa obyek sengketa III yang telah dihibahkan oleh pewaris kepada alm. Andi Pajung, selain itu pengalihan juga dilakukan oleh Hj. Andi Gusti binti Muhammadong dengan cara jual beli di atas tanah sebagian obyek sengketa III yang dibuat dihadapan Turut Tergugat kepada masing-masing:

7.1. Pengalihan oleh Hj. Andi Gusti binti Muhammadong dengan cara jual beli kepada H. Suhandi (Tergugat XXXIII) sebidang tanah seluas  $\pm$  180 M2 sebagian di atas obyek sengketa III yaitu yang terletak di Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: rencana jalan
- Sebelah Barat : tanah milik Maddu Ompeng
- Sebelah Selatan : tanah milik Maddu Ompeng
- Sebelah Timur : rencana jalan.

7.2. Pengalihan yang dilakukan oleh Hj. Andi Gusti binti Muhammadong dengan cara jual-beli kepada Rismayani (Tergugat XXXIV) sebidang tanah seluas  $\pm$  180 M2 sebagian di atas obyek sengketa III yaitu yang terletak di Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: rencana jalan
- Sebelah Barat : tanah Andi Pajung
- Sebelah Selatan : tanah Maddu Ompeng
- Sebelah Timur : rencana jalan.

7.3. Pengalihan yang dilakukan oleh Hj. Andi Gusti binti Muhammadong dengan cara jual-beli kepada Faisal Sade, SE (Tergugat XVIII) sebidang tanah seluas  $\pm$  150 M2 sebagian di atas tanah obyek

Hal. 13 dari 35 hal. Put.No.166/Pdt.G/2015/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa III yaitu yang terletak di Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Baharuddin Nonci
- Sebelah Barat : rencana jalan
- Sebelah Selatan : tanah milik Maddu Ompeng
- Sebelah Timur : tanah milik Andi Pajung

7.4. Pengalihan yang dilakukan oleh Hj. Andi Gusti binti Muhammadong dengan cara jual-beli kepada Fathul Abbas (Tergugat XXXV) sebidang tanah seluas  $\pm 150$  M2 sebagian di atas tanah obyek sengketa III yaitu yang terletak di Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Andi Pajung
- Sebelah Barat : tanah milik Faisal Sade
- Sebelah Selatan : rencana jalan
- Sebelah Timur : rencana lorong.

7.5. Pengalihan yang dilakukan oleh Hj. Andi Gusti binti Muhammadong dengan cara jual-beli kepada Muh. Sadikin (Tergugat XXXVI) sebidang tanah seluas  $\pm 150$  M2 sebagian di atas tanah obyek sengketa III yaitu yang terletak di Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik H. Sotomo
- Sebelah Barat : rencana jalan
- Sebelah Selatan : tanah milik Andi Pajung
- Sebelah Timur : tanah milik Andi Pajung.

8. Bahwa disamping peninggalan almarhumah berupa tanah tersebut, alm. Hj. Kumala juga meninggalkan harta berupa perhiasan emas sejumlah 804 gram, dengan perincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah kalung emas model balok seberat 50 gram, dikuasai oleh Tergugat (Hj. Andi Gusti binti Muhammadong);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah kalung emas model rantai, seberat 100 gram, dikuasai oleh Tergugat (Hj. Andi Gusti binti Muhammadong);
  - c. 1 (satu) buah gelang emas model rantai, seberat 100 gram, dikuasai oleh Tergugat (Hj. Andi Gusti binti Muhammadong);
  - d. 2 (dua) buah gelang emas permata intan, seberat 20 gram, dikuasai oleh Tergugat (Hj. Andi Gusti binti Muhammadong);
  - e. 12 (dua belas) buah gelang broncong emas, seberat 120 gram, dikuasai oleh Tergugat (Hj. Andi Gusti binti Muhammadong);
  - f. 3 (tiga) buah cincin emas laki-laki seberat 30 gram, dikuasai oleh Tergugat (Hj. Andi Gusti binti Muhammadong);
  - g. 3 (tiga) buah cincin emas permata bellahang, seberat 15 gram dikuasai oleh Tergugat (Hj. Andi Gusti binti Muhammadong);
  - h. 1 (satu) buah cincin emas model sikat, seberat 10 gram, dikuasai oleh Tergugat (Hj. Andi Gusti binti Muhammadong);
  - i. 3 (tiga) buah cincin emas, seberat 9 gram, dikuasai oleh Tergugat (Hj. Andi Gusti binti Muhammadong);
  - j. 1 (satu) buah peniti tali emas, seberat 50 gram, dikuasai oleh Tergugat (Hj. Andi Gusti binti Muhammadong);
  - k. 3 (tiga) buah emas batangan, seberat 300 gram, dikuasai oleh Tergugat (Hj. Andi Gusti binti Muhammadong).
9. Bahwa harta-harta peninggalan almarhumah Hj. Kumala binti H. Benawa masih berbentuk budel waris dan belum pernah terbagi kepada ahli warisnya;
10. Bahwa Penggugat, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah berupaya untuk menemui para Tergugat dan meminta agar harta warisan peninggalan alm. Hj. Kumala binti H. Benawa dapat dibagi secara kekeluargaan namun para Tergugat tidak pernah memperdulikannya, bahkan mengalihkannya kepada pihak lain dengan cara jual-beli tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya;

Hal. 15 dari 35 hal. Put.No.166/Pdt.G/2015/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa agar gugatan para Penggugat tersebut tidak sia-sia/ilusoir, maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera mengamankan semua harta warisan Hj. Kumala tersebut dengan meletakkan sita jaminan terhadap semua harta warisan milik Hj. Kumala, baik yang ada dalam penguasaan Tergugat maupun yang telah berada dalam penguasaan pihak ketiga;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan/dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sengkang adalah sah dan berharga;
3. Menetapkan almarhumah Hj. Kumala binti H. Benawa telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2012;
4. Menetapkan para Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Hj. Kumala binti H. Benawa;
5. Menetapkan seluruh harta peninggalan almarhumah Hj. Kumala, baik berupa tanah pekarangan, maupun emas perhiasan adalah budel waris yang akan dibagi kepada ahli warisnya yang berhak berupa:
  - 5.1. Sebidang tanah dan bangunan seluas 1.400 m2 sertifikat hak milik Nomor 529/Desa Tempe atas nama Hj. Kumala Benawa, persil 311, kohir 266 CI No. Urut 62 Blok 57 terletak di Jl. Lapawennari (sebelah Barat Masjid Tarbiyah), Lingkungan Bulu Tempe, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Lorong
    - Sebelah Timur : Jalan Lapawennari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah H. Ambo Tang
- Sebelah Barat : Tanah H. Habe Jaje

Yaitu obyek sengketa I.

- 5.2. Sebidang tanah perumahan seluas 10.025 m<sup>2</sup> karena adanya pembebasan ganti rugi jalanan sehingga tersisa  $\pm$  8.020 m<sup>2</sup>, hak milik Hj. Kumala Benawa sertifikat tanah hak milik Nomor 655/Kel. Tempe, terletak di Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H. Muh. Saleng  
Sebelah Timur : Jalanan  
Sebelah Selatan : Tanah Abd. Mutalib  
Sebelah Barat : Jalan Lembu II

Yaitu obyek sengketa II;

- 5.3. Sebidang tanah perumahan seluas  $\pm$  6.500 m<sup>2</sup>, sertifikat hak milik Hj. Kumala Benawa, persil 80II, kohir 290 CI, Blok 56 No. Urut 8 terletak di Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : BTN H. sutomo  
Sebelah Timur : Sungai  
Sebelah Selatan : BTN H. Sutomo  
Sebelah Barat : BTN H. Sutomo

Yaitu obyek sengketa III;

- 5.4. Perhiasan emas sejumlah 804 gram dengan perincian sebagai berikut:

- 5.4.1. 1 (satu) buah kalung emas model balok seberat 50 gram, dikuasai oleh Tergugat (Hj. Andi Gusti binti Muhammadong);  
5.4.2. 1 (satu) buah kalung emas model rantai, seberat 100 gram, dikuasai oleh Tergugat (Hj. Andi Gusti binti Muhammadong);  
5.4.3. 1 (satu) buah gelang emas model rantai, seberat 100 gram, dikuasai oleh Tergugat (Hj. Andi Gusti binti Muhammadong);

Hal. 17 dari 35 hal. Put.No.166/Pdt.G/2015/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4.4. 2 (dua) buah gelang emas permata intan, seberat 20 gram, dikuasai oleh Tergugat (Hj. Andi Gusti binti Muhammadong);
- 5.4.5. 12 (dua belas) buah gelang broncong emas, seberat 120 gram, dikuasai oleh Tergugat (Hj. Andi Gusti binti Muhammadong);
- 5.4.6. 3 (tiga) buah cincin emas laki-laki seberat 30 gram, dikuasai oleh Tergugat (Hj. Andi Gusti binti Muhammadong);
- 5.4.7. 3 (tiga) buah cincin emas permata bellahang, seberat 15 gram dikuasai oleh Tergugat (Hj. Andi Gusti binti Muhammadong);
- 5.4.8. 1 (satu) buah cincin emas model sikat, seberat 10 gram, dikuasai oleh Tergugat (Hj. Andi Gusti binti Muhammadong);
- 5.4.9. 3 (tiga) buah cincin emas, seberat 9 gram, dikuasai oleh Tergugat (Hj. Andi Gusti binti Muhammadong);
- 5.4.10. 1 (satu) buah peniti tali emas, seberat 50 gram, dikuasai oleh Tergugat (Hj. Andi Gusti binti Muhammadong);
- 5.4.11. 3 (tiga) buah emas batangan, seberat 300 gram, dikuasai oleh Tergugat (Hj. Andi Gusti binti Muhammadong).
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Hj. Kumala binti H. Benawa sesuai dengan hukum Islam yang dianut oleh semua pihak dalam perkara ini;
7. Menyatakan batal demi hukum atau menyatakan tidak sah dan tidak mengikat serta tidak berkekuatan hukum Akta Hibah yang dibuat di hadapan Turut Tergugat masing-masing yang terletak pada obyek sengketa I;
8. Menyatakan batal demi hukum, atau menyatakan tidak sah dan tidak mengikat serta tidak berkekuatan hukum Akta Jual-beli yang dibuat di hadapan Turut Tergugat masing-masing yang terletak pada obyek sengketa II;
9. Menyatakan batal demi hukum, atau menyatakan tidak sah dan tidak mengikat serta tidak berkekuatan hukum peralihan hak dengan cara jual-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli di hadapan Turut Tergugat masing-masing yang terletak di atas tanah obyek sengketa III, yang terletak di Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Sengkang, Kabupaten Wajo;

10. Menghukum para Tergugat dan atau Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta peninggalan almarhumah Hj. Kumala binti H. Benawa untuk membagi harta peninggalan tersebut sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila ternyata tidak dapat dibagi secara natura, maka harus diserahkan kepada Lembaga Lelang Negara, dan hasilnya dibagi sesuai dengan hak dari masing-masing ahli waris almarhumah Hj. Kumala binti H. Benawa;
11. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
12. Menghukum semua pihak atau siapa saja yang terkait dalam perkara ini untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
13. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Bila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa para Tergugat III, IV, V, VIII, IX, XV, XVII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII, XXX, XXXII, XXXIV dan XXXVII tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa para Tergugat I, II, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVIII, XXI, XXIII, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXV dan XXXVI melalui kuasanya dalam jawabannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

Bahwa gugatan Penggugat tersebut cacat hukum/tidak berdasar hukum acara, serta kabur dan tidak sempurna;

- I. Pada halaman pertama tentang perihal gugatan, pihak Penggugat mengajukan tiga macam perkara atau penggabungan tiga materi perkara yaitu gugatan pembatalan hibah, gugatan pembatalan jual beli dan penetapan ahli waris serta pembagian waris. Hal ini tidak dapat

Hal. 19 dari 35 hal. Put.No.166/Pdt.G/2015/PA Skg



dibenarkan secara hukum acara dan proses beracara, dimana Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang dibebani tiga materi pokok perkara dalam suatu proses acara persidangan (komulasi obyektif), suatu hal yang tidak wajar, tidak semestinya, apalagi dalam hal kompetensi dalam tiga materi pokok perkara tersebut;

- a. Adanya para Tergugat X sampai dengan Tergugat XXXII punya dasar kepemilikan hak autentik berupa Akta Jual Beli (AJB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM), hal ini menyagkut sengketa hak, maka hal tersebut masuk dalam kompetensi Pengadilan Negeri sehingga Pengadilan Agama Sengkang tidak berwenang mengadili sengketa hak tersebut;
  - b. Bahwa dengan adanya produk hukum berupa Akta Jual Beli (AJB) dan Akta Hibah, serta sertifikat Hak Milik (SHM), maka gugatan para Penggugat menyangkut pembatalan Akta Jual Beli (AJB), sangat tidak tepat sebab Akta Jual Beli dan Akta Hibah yang merupakan akta autentik dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, maka proses pembatalannya sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, Akta Jual Beli (AJB) harus melalui Peradilan Umum, sedangkan Akta Hibah dan sertifikat Hak Milik (SHM) harus melalui proses Peradilan Tata Usaha Negara;
- II. Bahwa menyangkut gugatan penetapan ahli waris serta pembagian waris, pihak Penggugat pun sangat keliru tidak mengetahui yang mana dimaksud budel waris Hj. Kumala, bahwa pengertian budel waris secara hukum adalah harta yang ditinggalkan (setelah meninggal dunia) yang belum pernah dibagi waris, nah sebagaimana obyek sengketa Penggugat akui bahwa telah dijual Hj. Kumala, namun Penggugat masih memasukkannya sebagai budel waris, apalagi sebagian obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat jelas-jelas telah dibeli oleh sebagian



pihak Tergugat (Tergugat X sampai dengan Tergugat XXXII) semasa hidupnya Hj. Kumala, dimana Hj.Kumala sendiri yang menjualnya;

III. Gugatan Penggugat kurang pihak/kurang lengkap subyek hukumnya, masih ada pihak yang seharusnya ikut dilibatkan tetapi tidak dilibatkan dalam perkara ini;

a. Anak almarhum Indo Upe, ada 4 (empat) orang, yaitu :

H. Ambo Dai; Hj. Erni, Alamsyah dan Eka;

Kalau alasan Penggugat bahwa Hj. Indo Upe lebih dulu meninggal dunia dari pewaris (istilah hukum adat bugis, polo aletenna) maka sebenarnya para Penggugat dan juga para Tergugat berstatus sama yaitu polo aletenna, karena saudara-saudara kandung almarhumah Hj. Kumala semuanya duluan meninggal dunia dari pada Hj. Kumala;

Hj. Kumala meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2012 sedangkan saudara Hj. Kumala yang bernama:

1. Hj. Subaedah, meninggal tahun 2003 yang merupakan ibu dari Penggugat I, II, III, IV dan V;
2. Hj. Coma, meninggal tahun 1993 yang merupakan ibu dari Penggugat VI dan VII;
3. Muhammadong, meninggal tahun 2006, ayah dari Tergugat I, II, III, IV, V serta ayah dari Penggugat XII, XIII, XIV dan XV;
4. Hj. Palli, meninggal tahun 2010, ibu dari Penggugat VIII, XIV, XV dan XVI;

- Dengan berdasar polo aletenna maka sewajarnya seluruh anak-anak bahkan cucu dari saudara kandung Hj. Kumala binti H. Bennawa tidak masuk sebagai ahli waris dari Hj. Kumala;
- Cucunya yang merupakan bagian dari hidupnya karena tinggal serumah dengannya serta merawat almarhumah hingga akhir hayatnya. Pemberian itu bisa diartikan sebagai hibah, atau wasiat ataupun wakaf yang dibuat secara sah dan memenuhi syarat sebagaimana yang

Hal. 21 dari 35 hal. Put.No.166/Pdt.G/2015/PA Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertuang dalam suatu pemberian tertanggal 11 Pebruari 2008 di hadapan dua orag saksi, Kepala Ligkungan, diketahui Lurah Tempe dan disahkan oleh Camat Tempe dan ditingkatkan dalam bentuk Akta Hibah;

- Kalau Hj. Kumala setelah tahun 2008 masih melakukan penjualan atau menghibahkan beberapa bagian dari tanah miliknya itu adalah haknya karena semua demi kebaikan dan amal jariyah, dan pihak yang pernah diberi hibah tidak ada yang keberatan;
- b. H. Umar, suami dari Hj. Palli, masih hidup, kedudukannya sama dengan Penggugat, namun tidak diikutkan dalam perkara ini. Mungkin Penggugat kuatir karena H. Umar (suami Hj. Palli) selaku kuasa dari Hj. Kumala pada pengurusan ganti rugi tanah milik Hj. Kumala yang diperoleh dari Pemda (surat kuasa tertanggal 15 November 2007);
- c. Istri kedua Muhammadong bin H. Benawa bernama Indo Sengngeng, tidak dijelaskan apakah masih hidup atau telah meninggal dunia, jika masih hidup maka statusnya sama dengan para Penggugat, harus ikut dilibatkan dalam perkara ini.

### **Dalam Pihak Tergugat :**

1. Bahwa dilibatkannya Pemerintah Kecamatan Tempe selaku turut Tergugat maka otomatis Pemda Wajo wajib dilibatkan karena Camat Tempe merupakan jabatan structural dan tidak berdiri sendiri ada atasan setingkat di atasnya yang memiliki pertanggung jawaban yang sama secara administrasi sebagaimana undang-undang otonomi daerah yang ada;
2. BPN Kabupaten Wajo; bahwa dengan adanya prodak hukum yang telah dikeluarkan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas obyek

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa maka secara hukum BPN Wajo seharusnya dilibatkan dalam perkara ini;

3. Bank BNI Cabang Sengkang dan Bank Danamon Cabang sengkang, bahwa dengan beralihnya hak keperdataan dari salah satu atau beberapa Tergugat kepada pihak perbankan, maka secara hukum bank yang bersangkutan mempunyai hak dan kepentingan yang sama dengan para Tergugat lainnya atas obyek sengketa;
4. Subyek hukum lainnya yang punya hubungan hukum dengan subyek dan obyek yang disengketakan, maka pihak tersebut mempunyai hak dan kepentingan atas obyek sengketa tersebut, dimana pihak yang menguasai obyek sengketa membeli dari Hj. Kumala sendiri ataupun dari pihak yang sebelumnya telah membeli dari Hj. Kumala, subyek hukum tersebut antara lain:
  - Pada obyek sengketa point I Tergugat I, II, III, IV dan V sama sekali tidak menguasai obyek, kecuali Tergugat VI, VII, VIII dan IX;
  - Pada obyek sengketa point II, dikuasai Abd. Rahim, Hj. Sahida, A. wawang, Fire, Agus, Syam, A. Haedar, H. Dedi, Muamar, Muhammadong;
  - Pada obyek sengketa point III, dikuasai ole Irosi, Fitriani, A. Haedar, Rahman, Yahya, Asis, Hj. Sahidah, A. Pasamula dan H. Sinring;

Sewajarnya ikut dilibatkan dalam perkara ini.

- IV. Bahwa batas-batas obyek sengketa point II, dan point III lebih-lebih lagi batas-batas dan luas kapling yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat banyak sekali yang tidak sesuai dengan keadaan fakta di lokasi;

Hal. 23 dari 35 hal. Put.No.166/Pdt.G/2015/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka secara nyata gugatan Penggugat cacat formal atau tidak lengkap, masih ada pihak yang seharusnya dilibatkan dalam perkara ini namun tidak dilibatkan, hal ini sesuai yang dimaksud :

**Yurisprudensi MARI No. 1424/Sip/1975 tanggal 08 Juni 1976:** “Mahkamah Agung Republik Indonesia membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formal tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat tetapi tidak digugat atau dilibatkan dalam perkara ini”.

**Yurisprudensi MARI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 – 7 -1973** “Karena setelah diajukan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri, atas perintah Mahkamah Agung, tanah dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak diterima”.

Berdasarkan ungkapan dalam eksepsi tersebut di atas, maka beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

### B. Dalam pokok perkara

- Bahwa segala yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan uraian tanggapan terhadap dalil Penggugat dalam pokok perkara di bawah ini;
- Bahwa para Tergugat I, II, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVIII, XXI, XXIII, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXV dan XXXVI, menolak dan membantah sekeras-kerasnya segala dalil yang diajukan para Penggugat terkecuali hal-hal yang telah diakui sepanjang tidak merugikan hak dan kepentingan para Tergugat;
- Bahwa obyek sengketa poin 3. a. (I) bukan keseluruhan milik alm. Hj. Kumala, sebab sebagian dibeli Hj. Kumala dan sebagian lagi dibeli oleh Hj. Tanjung (SHM atas nama Hj. Kumala), dan milik Hj. Tanjung tersebut dijual oleh anaknya nama Farida kepada Hj. A. Gusti (Tergugat I) dan tidak benar kalau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, II, III, IV, V yang menguasainya, yang benar hanyalah Tergugat VI, VII, VIII dan IX yang menguasainya;

- Bahwa obyek sengketa poin 3. b.(II) adalah asal harta milik Hj. Kumala binti H. Benawa, yang merupakan bagian Hj. Kumala dari orang tuanya (H. Benawa) yang bersamaan dibagikan bagian saudaranya Hj. Kumala tanggal 22 Januari 1959 (kakek-nenek para Penggugat); Luasnya semula  $\pm 10.000$  m, karena adanya pembebasan ganti rugi untuk jalanan (kuasa Hj. Kumala untuk urusan ganti rugi tersebut adalah H. Umar/ayah Penggugat VIII, IX, X, XI, maka luasnya sisa  $\pm 9.000$  m<sup>2</sup> bukan 8.020 m<sup>2</sup>, demikian pula batas sebelah utaranya bukan H.M. Saleng tapi Dr. Sukiman/H. Beddu dan Indo Angka, sedangkan batas sebelah selatannya bukan Abd. Muthalib, tetapi adalah Jl. Lembu I; dan tidak benar obyek sengketa ini dikuasai oleh Tergugat VII s/d XXXII;
- Bahwa obyek sengketa poin 3.c.(III) adalah harta milik Hj. Kumala binti H. Benawa, juga merupakan bagian Hj. Kumala dari orang tuanya (H. Benawa) yang bersamaan dibagikan juga kepada saudara-saudara Hj. Kumala (kakek nenek dari para Penggugat) dan tidak benar bila Tergugat VIII juga menguasai;
- Bahwa tidak benar dalil-dalil Penggugat yang menganggap obyek sengketa tersebut masih dalam bentuk budel waris, sebab obyek sengketa tersebut ada yang sudah dihibahkan dan ada pula yang sudah dijual sendiri oleh Hj. Kumala semasa masih hidup (hal itu diakui secara terang-terangan oleh para Penggugat dalam uraian posita gugatannya), maka sangat mustahil masih dianggap budel waris, bahkan sudah berstatus Hak Milik dengan bukti otentik bagi masing-masing yang menguasainya (AJB dan SHM);
- Bahwa oleh karena obyek sengketa sebagian poin III.a, 3.I, 3.II, 3.III adalah hak mutlak Hj. Kumala maka tidak ada yang berhak melarangnya kalau ia mau menjualnya ataupun mau memberikan kepada siapa saja semasa hidupnya, apalagi Hj. Kumala tidak punya anak keturunan (tidak pernah kawin) dan

Hal. 25 dari 35 hal. Put.No.166/Pdt.G/2015/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua saudara kandungnya semasa hidupnya telah diberikan (dibagi-bagikan) harta milik H. Benawa/Indo Tuwo (orang tuanya) bersama dengan Hj. Kumala yaitu pada tanggal 22 Januari 1959, sehingga tidak patut apabila anak cucu Hj. Subaedah, Hj. Coma, Muhammadong dan Hj. Palli secara serakah menuntut dari harta Hj. Kumala apalagi telah dihibahkan ataupun dijual sendiri oleh Hj. Kumala untuk dinikmati sesuai kebutuhan dan kemauannya;

- Menanggapi dalil gugatan Penggugat pada poin 4 halaman 6 yang menuduh kondisi Hj. Kumala pada saat diterbitkannya hibah dalam keadaan sakit atau tidak sehat atau tidak normal hingga para pihak Tergugat sangat leluasa mengambil kesempatan agar pewaris melakukan hibah Tanpa sepengetahuan para ahli waris lainnya;
- Tuduhan dan fitnah tersebut bertentangan dengan pengakuan pihak Penggugat sendiri di dalam uraian posita dan keterangan di muka sidang sebelum jawaban ini, yaitu kalau surat pemberian tertanggal 11 Pebruari tahun 2008 yang disusul terbitnya Akta Hibah tanggal 14 Mei 2008, semuanya dibuat di hadapan atau sepengetahuan pejabat yang berwenang; yang kemudian diterbitkan beberapa Akta Jual Beli kepada Tergugat X s/d XXXII (23 orang) sejak tahun 2010 s/d tahun 2012 (Januari 2012) juga di hadapan atau sepengetahuan pihak yang berwenang menurut hukum; maka transaksi yang dilakukan oleh Hj. Kumala yang dipersaksikan atau dibuat oleh pejabat yang berwenang sejak tanggal 11 Pebruari 2008 s/d tahun 2011 menandakan Hj. Kumala binti H. Benawa masih dalam kondisi sehat rohani dan jasmani;

Demikian pula dalil Penggugat ditambah keterangan di muka sidang tanggal 23 April 2015 ada istilah Hj. Kumala melakukan PERALIHAN BERGANDA, maksudnya setelah menghibahkan hartanya kemudian menjualnya pula, justru disinilah membuktikan bahwa para Tergugat yang pernah memdapat hibah, kemudian Hj. Kumala menjual pula obyek tersebut tanpa adanya keberatan dari pihak yang pernah menerima hibah,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan proses hibah tidak ada akal-akalan mencari kesempatan yang dituduhkan kepada penerima hibah;

Maka dengan adanya fakta yang terungkap ini, buyarlah segala tuduhan dan fitnah yang dibuat oleh pihak Penggugat, sebagai dalil Penggugat yang ingin mencaplok hak-hak para Tergugat;

- Selanjutnya mengenai gugatan Penggugat angka 7 halaman 15 dimana obyek sengketa poin III (3.a) dimana obyek yang pernah dihibahkan kepada alm. A.Pajung, yang dijual oleh H.A.Gusti binti Muhammadong kepada Tergugat XXXIII/H.Suhanda, Tergugat XXXIV/Rismayani, Tergugat XVIII/Faisal Sade SE, Tergugat XXXV/Fathul Abbas dan Tergugat XXXVI/Muh. Sadikin, disamping itu benar sudah dihibahkan oleh Hj. Kumala kepada cucunya A. Pajung, namun pada saat HJ. Kumala butuhkan keuangan, maka atas izin **Hj. Kumala** dalam hal ini **Hj. A. Gusti** (kemanakan yang serumah dan yang mengurus **Hj. Kumala**) menjual obyek poin III tersebut, dari harga hasil penjualan tersebut diberikan pula kepada pihak Penggugat (yaitu Juddawiah, Hj. Wardah dan Herlina) karena mereka mendesak **Hj. Kumala** seolah-olah Hj. Kumala berutang pada mereka, sekalipun Hj. Kumala tidak pernah berutang pada mereka;

Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan pernah menemui pihak para Tergugat agar harta warisan peninggalan Hj. Kumala dapat dibagi, dalil itu adalah isapan jempol belaka, apalagi dengan alasan para Tergugat bahkan mengalihkannya dengan cara jual beli; Para Tergugat I. II, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVIII, XXI, XXIII, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXV dan XXXVI sangat menyangkali dan menolak dalil Penggugat tersebut;

Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas maka dengan segala kerendahan hati para Tergugat memohon ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

**Dalam Eksepsi:**

Hal. 27 dari 35 hal. Put.No.166/Pdt.G/2015/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam eksepsi:

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak seluruh jawaban para Tergugat di atas, terkecuali apa yang diakui secara tegas dan terinci yang tidak merugikan para Penggugat;

2. Menanggapi jawaban para Tergugat yaitu pada eksepsi point I, sub a, b dan c. perihal gugatan pihak Penggugat mengajukan tiga (3) materi perkara, yaitu gugatan pembatalan hibah, gugatan pembatalan jual beli, penetapan ahli waris serta pembagiannya;

Bahwa adanya kumulasi gugatan ini secara hukum adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan satu sama lain sangat terkait sehingga secara hukum harus bersamaan atau dikumulasi dalam gugatan ini karena hak waris para Penggugat hanya bisa dicapai melekat dan mendapatkan hak waris apabila terlebih dahulu harus ada pembatalan hibah atas hibah yang dilakukan oleh alm Hj. Kumala kepada para penerima hibah, demikian pula Akta Jual-beli di atas akta hibah yang telah dilakukan oleh pemberi hibah;

3. Bahwa menanggapi jawaban para Tergugat dalam dalil jawabannya pada huruf (a) dan (b), halaman 2 bahwa para Tergugat X s/d XXXII punya dasar kepemilikan hak autentik berupa akta jual-beli dan sertifikat hak milik (SHM)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini menyangkut sengketa kompetensi Pengadilan Negeri sehingga Pengadilan agama sengkang tidak berhak mengadili;

Bahwa dalil di atas tidak benar bila didalilkan sengketa kepemilikan karena apa yang diuraikan dalam gugatan adalah jelas yang digugat adalah asal seluruh obyek sengketa harta warisan dari alm Hj. Kumala dan para Penggugat memiliki hak waris atas harta tersebut sehingga secara hukum gugatan ditujukan kepada Pengadilan agama Sengkang adalah mutlak sebagai wewenang untuk mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini;

4. Menanggapi jawaban para Tergugat pada angka romawi II, dimana mendalilkan gugatan penetapan ahli waris dan pembagian waris sangat keliru, tidak mengetahui yang mana dimaksud budel waris alm. Hj. Kumala.....dst;

Justru para Penggugat tidak keliru mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Agama, karena yang digugat adalah seluruh harta peninggalan alm. Hj. Kumala yang telah melakukan hibah lebih dari 1/3 harta, dan diatas tanah yang telah dihibahkan itu diterbitkan lagi akta jual-beli kepada Tergugat X s/d XXXII sehingga terbit administrasi surat berganda, dengan demikian perbuatan hukum yang dilakukan alm. Hj. Kumala yaitu hibah dan jual – beli adalah tidak sah dan tidak mengikat;

5. Menanggapi dalil para Tergugat point III halaman 3 s/d 9 terkait gugatan para Penggugat kurang pihak;

Bahwa dalil para Tergugat tidak benar karena Penggugat telah memasukkan seluruh ahli waris dari alm Hj. Kumala dan pada petitum gugatan telah pula dirinci dan disebutkan siapa-siapa untuk ditetapkan sebagai ahliwaris alm. Hj. Kumala dan meminta ditetapkan bagian-bagian masing-masing, sehingga dalil para Tergugat tidak bernilai hukum dan harus dikesampingkan.

**Dalam pokok perkara:**

Hal. 29 dari 35 hal. Put.No.166/Pdt.G/2015/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala dalil yang diuraikan dalam menanggapi eksepsi para Tergugat tersebut di atas adalah dalil yang tidak terpisahkan dengan tanggapan dalil-dalil dalam pokok perkara;
2. Bahwa Penggugat menolak dan membantah dalil-dalil dalam jawaban Tergugat yang merugikan hak dan kepentingan para Penggugat;
3. Bahwa menanggapi jawaban para Tergugat alinea 3 halaman 10, bahwa obyek sengketa bukan seluruhnya milik Hj. Kumala Benawa sebagian dibeli oleh H. Tanjung sebagian dibeli oleh Hj. Kumala.....dst;  
Bahwa tanah obyek sengketa 3.a seluas 1400 m2 sebagian milik H. Tanjung seluas 775 m2 dan sebagian milik Hj. Kumala lalu kemudian didalilkan anak H. Tanjung bernama Farida mengalihkannya kepada A. Gusti adalah rekayasa belaka karena H. Tanjung sudah menggantikan tanahnya di tempat lain, sehingga dalil ini harus dikesampingkan;
4. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada halaman 11 daftar satu yang mendalilkan obyek sengketa 3.c bukan harta peninggalan Hj. Kumala yang secara nyata terbit dua akta di atas obyek yang sama berdasarkan pengakuan para Tergugat pada halaman 13 alinea pertama dan kedua yaitu akta hibah dan akta jual-beli di atas obyek yang sama, dan hal ini juga yang telah diuraikan dalam tanggapan eksepsi adalah tidak sah dan tidak mengikat sehingga seluruh obyek sengketa kembali statusnya menjadi harta warisan untuk dibagi kepada seluruh ahli waris;
5. Bahwa jumlah keseluruhan obyek sengketa 3.b 10.000 m2 dan dikurangi dengan adanya pembebasan ganti rugi sehingga tersisa seluas  $\pm 80.20$  m2 sehingga batas tanahnya sudah benar dalam gugatan Penggugat;  
Dalam jawaban Tergugat pada pokoknya lihat dan baca halaman 13 alinea pertama **"Hj. Kumala melakukan peralihan berganda, maksudnya setelah menghibahkan hartanya kemudian menjualnya pula, justru disinilah membuktikan bahwa para Tergugat yang pernah mendapat**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**hibah kemudian Hj. Kumala menjual pula obyek tersebut tanpa adanya keberatan dari pihak yang pernah menerima hibah”**

Dari kutipan kata-kata dari para Tergugat di atas maka akta hibah yang telah dilakukan alm. Hj. Kumala, kemudian mengalihkan lagi tanah yang telah dihibahkan melalui akta jual-beli, maka telah terjadi error administrative atau kesalahan administrasi yang seharusnya menurut hukum akta jual-beli tidak bisa timbul apabila tidak dilakukan pembatalan hibah oleh Hj. Kumala terlebih dahulu, maka akta jual-beli tersebut batal demi hukum atau tidak sah atau tidak memiliki nilai hukum;

6. Bahwa adapun dasar terbitnya akta hibah di atas tanah obyek sengketa 3.b yang melanggar aturan undang-undang yang ada karena alm. Hj. Kumala menghibahkan hartanya melebihi 1/3 harta kepada A. Sulung, Pawalloi dan Sangaji masing-masing 3000 m<sup>2</sup> yang kemudian diatas tanah tersebut terbit lagi akta jual-beli secara berganda yang dilakukan alm. Hj. Kumala sehingga terbit administrasi secara berganda, maka menurut hukum akta jual-beli tersebut harus dinyatakan batal demi hukum atau batal dengan sendirinya, maka dengan demikian seluruh harta peninggalan tersebut mutlak kembali menjadi harta warisan yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris;
7. Bahwa demikian pula halnya hibah yang dilakukan oleh alm. Hj. Kumala kepada alm. A. Panjung dijual oleh A. Gusti yang kemudian dibagi-bagikan kepada Juddawiyah, Hj. Wardah dan Heri adalah rekayasa belaka, untuk menutupi kelemahannya karena penguasaan atas harta peninggalan alm. Hj. Kumala secara sepihak;
8. Bahwa seluruh dalil yang diajukan oleh pihak Tergugat pada halaman 13 alinea 2, halaman 14 dan 15, hanya isapan jempol belaka atau hasil rekayasa belaka untuk menutupi dan menghilangkan keseluruhan harta warisan Hj. Kumala agar bisa dimonopoli termasuk seluruh warisan berupa emas;

Hal. 31 dari 35 hal. Put.No.166/Pdt.G/2015/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedasarkan uraian-uraian di atas, maka dimohon kiranya Majelis Hakim memutuskan hal-hal sebagai berikut:

## **Dalam eksepsi:**

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

## **Dalam pokok perkara:**

- Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum para Tergugat dan turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

### **I. Dalam Eksepsi:**

- Bahwa para Tergugat dalam hal ini tetap mempertahankan eksepsi yangtelah diajukan, serta menolak dan membantah keras segala tanggapan pihak Penggugat terkecuali hal-hal yang diakui sepanjang tidak merugikan hak dan kepentingan pihak Tergugat;
- Bahwa Komulasi dari 3 materi pokok perkara yang diajukan sekaligus oleh pihak Penggugat adalah komulasi obyek yang tidak mungkin dipertimbangkan dan diputus sekaligus, karena terdapat 3 materi pokok sebagaimana diakui sendiri oleh pihak Penggugat dalam repliknya pada halaman 2 yaitu:

“... karena hak waris para Penggugat hanya bisa dicapai melekat dan mendapatkan hak waris apabila terlebih dahulu harus ada pembatalan hibah....” Maka sewajarnya sesuai pengakuan pihak Penggugat, untuk mencapai hak waris yang akan digugat maka terlebih dahulu harus ada keputusan pembatalan hibah, apalagi materi pokok gugatan juga meminta pembatalan jual beli;

- Bahwa adapun istilah Hj. Kumala melakukan peralihan berganda itu bukan kutipan dari kata-kata para Tergugat, tetapi itu bersumber dari kata-kata Penggugat sendiri dalam posita gugatannya;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam eksepsi para Tergugat mengungkapkan adanya istilah Penggugat peralihan berganda itu, justru itulah membuktikan ketidak benaran tuduhan dari Penggugat yang menuduh pihak Tergugat (penerima hibah) mengakali Hj. Kumala atau mencari kesempatan dalam keadaan Hj. Kumala telah sakit parah;
- Sebab kenyataan hibah yang telah diberikan kepada cucu-cucunya 5 orang (kini sebagai Tergugat), diambil kembali dan dijual karena kebutuhan yang dianggap perlu, justru ini sepengetahuan penerima hibah sebab sampai sekarang penerima hibah tidak pernah merasa keberatan karena mereka sadar bahwa pemilik asal tetap punya hak atas hartanya;
- Bahwa yang hendak dipolitisir oleh Penggugat menyangkut hibah yang tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari harta, itu sudah buyar pula karena obyek hibah sudah diambil kembali oleh orang tua/pemberi hibah dan itu sudah dijual semuanya (sesuai keterangan Penggugat di muka siding), sehingga menurut logic hokum, seorang pemilik tanah yang sah menjual tanahnya secara sah, adalah benar dan mendapat perlindungan hokum, pihak ketiga tidak punya hak untuk protes ataupun membatalkan jual beli tersebut;

### II. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa segala uraian yang tertuang dalam duplik hal eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan tentang hal pokok perkara;
2. Bahwa para Tergugat dalam hal ini tetap menolak dan membantah dalil yang diuraikan dalam replik Penggugat, terkecuali hal-hal yang diakui sepanjang tidak merugikan hak dan kepentingan pihak Tergugat;
3. Bahwa menyangkut jawaban para Tergugat alinea 3 halaman 10 yang ditanggapi oleh Penggugat yang menganggapnya rekaasa belaka, hal mana pihak Tergugat akan membuktikannya bahwa bukan rekayasa;
4. Bahwa megeni tanggapan salah dari Penggugat yang menuduh dalil jawaban para Tergugat halaman 11 datar satu "mendalilkan obyek sengketa poin 3 C bukan harta pninggalan Hj. Kumala" adalah kebohongan

Hal. 33 dari 35 hal. Put.No.166/Pdt.G/2015/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berupa kelicikan untuk memutar balikan kebenaran, sebab jawaban Tergugat pada halaman 11 datar satu adalah “bahwa obyek sengketa poin 3 C (III) adalah harta milik Hj. Kumala, juga merupakan bagian Hj. Kumala dari orang tuanya (H. Benawa);

5. Bahwa bagaimana mungkin menurut hukum harta milik sah dari alm. Hj. Kumala yang telah dijual sendiri waktu masih hidup, kini dituntut untuk dijadikan budel waris, sangat tidak wajar, kecuali harta itu asih utuh ditinggalkan Hj. Kumala, kemudian setelah meninggalkan ada pihak yang menjualnya, namun hal itu sudah diakui secara lisan dimuka sidang oleh pihak Penggugat materiil bersama kuasa hukumnya; belum lagi pengakuan dalam dalil-dalil Penggugat tentang hal itu, Penggugat hanya berupaya mengelabui dengan ulasan-ulasan yang memutar balikan keadaan, antara lain:

- Harta Hj.Kumala telah pernah ada yang dihibahkan, alas an hibah tidak benar, hanya diakali karena sudah sakit keras (tahun 2006);
- Harta Hj. Kumala diantaranya yang sudah dihibahkan masih dijual lagi oleh Hj. Kumala, itupun dituduh Hj. Kumala melanggar hukum administrasi adanya peralihan berganda;

6. Perlu disadari oleh Penggugat hal tersebut adalah hak asasi Hj. Kumala, dimana jelas penerima hibah sama sekali tidak ada yang keberatan kalau Hj. Kumala menjual kembali, kenapa Penggugat yang ikut pusing dan keberatan;
7. Begitupula Hj. Kumala masih sehat untuk bertindak mengalihkan hak-haknya, yang ia lakukan sejak tahun 2008 s.d. tahun 2011 dia lakukan dengan sepengetahuan yang punya hubungan hukum serta dihadapan pejabat yang berwenang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Jadi bukan rekayasa dan bukan error administrative, semua sah dan wajar menurut hukum, justru pihak Penggugat yang error in persona dan error in obyekto, sehingga gugatannya patut ditolak seluruhnya, setidaknya tidak dapat diterima;
9. Mengenai harga tanah, yang disuruh Hj. A. Gusti untuk menjualnya dan diberikan kepada Juddawiah, Hj. Wardah, Sahriani, karena mereka mendesak dengan alasan ada utang Hj. Kumala pada mereka, itu dapat dibuktikan bukan rekayasa;
10. Para Tergugat dalam mengajukan dalil bantahan adalah akurat dan obyektif, bukan rekayasa dan dalam limit yang sah dan berdasar hukum.

Berdasarkan segenap uraian dalam duplik ini maka dengan segala kerendahan hati memohon kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabalkan eksepsi para Tergugat
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

## Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
- Menghukum Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap termasuk dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

## Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, Tergugat I. II, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVIII, XXI, XXIII, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXV dan XXXVI

Hal. 35 dari 35 hal. Put.No.166/Pdt.G/2015/PA Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi Pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah **cacat hukum/tidak berdasar hukum acara, serta kabur dan tidak sempurna;**

### Eksepsi I:

Pada halaman pertama tentang perihal gugatan, pihak Penggugat mengajukan tiga macam perkara atau penggabungan tiga materi perkara yaitu gugatan pembatalan hibah, gugatan pembatalan jual beli dan penetapan ahli waris serta pembagian waris; Hal mana menurut Tergugat adalah suatu hal yang tidak wajar, tidak semestinya, apalagi dalam hal kompetensi dalam tiga materi pokok perkara tersebut, sementara Penggugat dalam repliknya halaman 2 alinea pertama, menyatakan bahwa adanya kumulasi gugatan ini secara hukum adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan satu sama lain sangat terkait sehingga secara hukum harus bersamaan atau dikumulasi dalam gugatan ini karena hak waris para Penggugat hanya bisa dicapai, melekat dan mendapatkan hak waris apabila terlebih dahulu ada pembatalan hibah dan pembatalan akta jual-beli yang telah dilakukan oleh alm. Hj. Kumala;

### Eksepsi selanjutnya:

- a. Adanya para Tergugat X sampai dengan Tergugat XXXII punya dasar kepemilikan hak autentik berupa Akta Jual Beli (AJB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM), hal ini menyakut sengketa hak, maka hal tersebut masuk dalam kompetensi Pengadilan Negeri sehingga Pengadilan Agama Sengkang tidak berwenang mengadili sengketa hak tersebut; sementara Penggugat dalam repliknya menyatakan **tidak benar** Tergugat X s/d XXXII punya dasar kepemilikan hak autentik didalilkan sebagai sengketa kepemilikan karena apa yang diuraikan dalam gugatan adalah asal seluruh obyek sengketa harta warisan dari alm. Hj. Kumala, sehingga secara hukum gugatan ditujukan kepada Pengadilan Agama Sengkang sebagai wewenang untuk mengadili dan memutus perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing menyatakan bahwa sebagian obyek sengketa telah berada dan dikuasai oleh Tergugat X s/d Tergugat XXXII dengan peralihan hak melalui jual beli dari alm. Hj. Kumala ketika masih hidup kepada para Tergugat X s/d XXXII, (**Penggugat** dalam posita gugatannya point 6 halaman 9, sedang **Tergugat** dalam jawaban/eksepsinya point I.a. hal 2) dan salah satu materi gugatan Penggugat adalah pembatalan akta jual-beli yang ada di tangan para Tergugat X s/d XXXII tersebut (sebagaimana dalam petitum gugatan point 8), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum selaku pembeli yang beritikad baik harus dilindungi haknya, sementara menyangkut pembatalan akta jual beli tidak masuk dalam wewenang Pengadilan Agama, sehingga majelis menilai eksepsi Tergugat sepanjang materi perkara pembatalan akta jual-beli beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam repliknya bahwa hak waris Penggugat hanya bisa dicapai apabila terlebih dahulu ada pembatalan akta hibah dan pembatalan akta jual-beli, sementara pembatalan akta jual-beli bukan wewenang Pengadilan Agama, maka Majelis menilai gugatan Penggugat tersebut tidak jelas/kabur karena bergantung pada adanya pembatalan akta jual beli yang harus diselesaikan terlebih dahulu di luar Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa **gugatan Penggugat tidak jelas/kabur**, cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang **gugatan Penggugat tidak jelas/kabur** cukup beralasan untuk dikabulkan, maka eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

**Dalam pokok perkara:**

Hal. 37 dari 35 hal. Put.No.166/Pdt.G/2015/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang **tidak jelasnya gugatan** dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan cacat hukum, yakni kabur (obscur libele) sehingga tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang kewarisan, maka sesuai dengan Pasal 192 R.Bg, biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat beralasan hukum;
- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

### Dalam pokok perkara:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.8.456.000,00 (delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1436 Hijeriyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Idris, M.HI., sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Jusman dan Dra. Hj. St. Hasmah masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Sengkang tanggal 2015 dengan dibantu oleh Hj. Fitriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Jusmah

Drs. Idris, M.HI

ttd

Dra.Hj. St. Hasmah

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Fitriani, S. Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pencatatan : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp.8.365.000,00
4. Biaya redaksi: Rp. 5.000,00
- 5.

Biaya materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah		<u>Rp.8.456.000,00</u>

(delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

HARTANTO, SH

Hal. 39 dari 35 hal. Put.No.166/Pdt.G/2015/PA Skg

## PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian Skripsi “Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah Yang Diperjualbelikan Oleh Penghibah Setelah Meninggal Dunia Di Pengadilan Agama Sengkang (Studi Kasus Putusan Nomor 166/Pdt.G/2015/PA Skg)

Narasumber : Drs.Idris,S.HI.,M.HI, dan Dra. Hj. Jusmah, S.HI

Tanggal : 13 Juli – 15 Juli 2016

Masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Tanah Hibah Sebagai Harta Warisan Setelah diperjual belikan ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus sengketa tanah hibah yang diperjualbelikan dalam putusan Nomor 166/ Pdt.G/ 2015/ PA Skg di Pengadilan Agama Sengkang ?

Daftar Pertanyaan :

1. Apakah bapak sering menangani perkara hibah yang diakumulasikan dengan perkara lain ?  
*Iyah, saya sering*
2. Mengenai putusan Nomor 166/ Pdt.G/ 2015/ PA Skg apa betul bapak yang memeriksanya ?  
*Iyah*
3. Bagaimna pendapat bapak mengenai perkara nomor 166/ Pdt.G/ 2015/ Pa.Skg ?  
*Sebenarnya perkara nomor 166/ Pdt.G/ 2015/ Pa.Skg ini merupakan perkara malwaris yang mana pada intinya penggugat menginginkan pembagian warisan terhadap seluruh harta dari pewaris hanya saja sebelum melaksanakan pembagiannya diselesaikan terlebih dahulu sengketa lain yang berkaitan.*
4. Bagaimana menurut bapak mengenai, perkara tersebut, apakah hal yang benar mengakumulasikan 3 perkara tersebut diajukan di PA Sengkang?

Tiga perkara tersebut (pembatalan hibah, pembatalan jual beli dan penetapan serta pembagian ahli waris) tidak dibenarkan karena tidak asesor. Juga tidak dibenarkan dalam akumulasi perkara, karena ada yang bersifat voluntair dan ada yang contentious, dikatakan mengandung perkara voluntair karena dalam petitum penggugat mengatakan **Menetapkan para Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Hj. Kumala binti H. Benawa**, ini merupakan salah satu ciri perkara bersifat voluntair yang mana putusannya bersifat declaratoir dan juga produk pengadilan berupa penetapan.

5. Bagaimana dengan kurangnya pihak yang dimasukkan dalam gugatan ?

Penggugat sebaiknya menjelaskan dalam posita mengenai semua ahli waris yang tidak terhalang agar dapat dilihat posisinya meskipun tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara.

6. Apa yang dimaksud dengan Budel Waris ?

Budel waris adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris setelah dikeluarkan untuk biaya pemakaman, wasiat dan hibah.

7. Apa saja yang menjadi wewenang Pengadilan Agama dalam masalah Hibah ?

- Pembatalan hibah, meliputi untuk menyatakan perbuatan hibah tersebut batal dan menyatakan akta tersebut tidak berkekuatan hukum tetap.
- Sengketa Hibah, yaitu hibah yang diberikan lebih dari 1/3 dan digugat oleh ahli waris
- Penetapan hibah yaitu hibah yang dilakukan syarat dan rukunnya sdh sesuai sehingga dimintakan penetapan.

8. Bagaimana cara mencegah pelaksanaan hibah agar tidak mendapat tuntutan di kemudian hari ?



*Untuk mencegah terjadinya tuntutan di kemudian hari, dalam praktik selalu disyaratkan adalah Surat Persetujuan dari anak kandung Pemberi Hibah. Dengan demikian, pemberian hibah harus memperhatikan persetujuan dari para ahli waris dan jangan melanggar hak mutlak mereka. Hak mutlak adalah bagian warisan yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk masing-masing ahli waris.*

9. Menurut bapak, dalam perkara ini, mana yang lebih dulu diselesaikan pembatalan hibah atau pembatalan jual beli ? terlepas dari permintaan penggugat..

*Sebaiknya diselesaikan dulu perkara jual belinya di luar Pengadilan Agama*

10. Bagaimana cara mengambil putusan dalam perkara ini ?

*Musyawarah majelis hakim merupakan perundingan yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap perkara yang diajukan. Dalam musyawarah ini setiap hakim memiliki hak yang sama dalam hal :*

- 1) Mengkontrahir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak dengan melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadi peristiwa hukum.*
- 2) Mengkualifisir peristiwa hukum artinya adalah menggolongkan peristiwa hukum,*
- 3) Mengkonstituir yaitu menetapkan keadilan kepada para pencari keadilan.*

11. Mengenai pasal 50 ayat 2 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, bagaimana pendapat bapak dalam penerapannya pada perkara ini ?

*Perkara ini harusnya diselesaikan terlebih dahulu masalah yang menyangkut bukan kewenangan Pengadilan Agama karena Jual beli tanah adalah wewenang dari badan Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri. Setelah itu baru dimasukkan di Pengadilan Agama.*





ALAUDDIN

KEMENTERIAN AGAMA R.I.  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I: Jln. Sultan Alauddin No. 63 Makassar, Tlp. (0411) 868720, Fax. 864923  
Kampus II: Jln. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa, Tlp. (0411) 841879, Fax. 8221400

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 374 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

- Menimbang : a. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, untuk itu dipandang perlu menetapkan dosen pembimbing;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai dosen pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah R.I. No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama R.I. No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
4. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Keputusan Rektor Nomor 129C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : a. Menunjuk Saudara : 1. Prof. Dr.H. Lomba Sultan, M.Ag  
2. Dr Supardin, M.Hi.  
sebagai pembimbing mahasiswa:
- Nama : Munira  
NIM : 10100113122  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Peradilan/HAPK  
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM TANAH HIBAH YANG DIPERJUAL BELIKAN OLEH PENGHIBAH YANG TELAH WAFAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 166/Pdt.G/2015/PA.Skg)
- b. Melaksanakan pembimbingan skripsi sampai mahasiswa tersebut selesai karya tulis ilmiah dengan baik;
- c. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2016;
- d. Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 21 April 2016

Dekan  
Fakultas Syariah dan Hukum



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.

NIP. 196210161990031003

Tembusan:

Rektor UIN Alauddin Makassar di Makassar (sebagai laporan).

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dna Hj Juswah  
Pekerjaan/ Jabatan : Hakim PA Sengkang  
Alamat : Jl. Akasia

Benar telah memberikan keterangan kepada

Nama : MUNIRA  
NIM : 10100113122  
Jurusan : PERADILAN AGAMA  
Alamat : SAMATA

Bahwa nama tersebut di atas benar telah melakukan wawancara berkaitan dengan judul skripsi “ Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah Yang Diperjualbelikan ( Studi Kasus Putusan : 166 / Pdt.G / 2015 / pa.Skg di pengadilan Agama Sengkang Kelas I.B )

Demikianlah surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang,

2016



---

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. Idris, M.H.I  
Pekerjaan/ Jabatan : Hakim PA. Sengkang  
Alamat : Jl. S. Hasanuddin

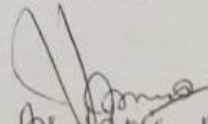
Benar telah memberikan keterangan kepada

Nama : MUNIRA  
NIM : 10100113122  
Jurusan : PERADILAN AGAMA  
Alamat : SAMATA

Bahwa nama tersebut di atas benar telah melakukan wawancara berkaitan dengan judul skripsi " Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah Yang Diperjualbelikan ( Studi Kasus Putusan : 166 / Pdt.G / 2015 / pa.Skg di pengadilan Agama Sengkang Kelas I.B )

Demikianlah surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 10 2016

  
Drs. Idris, M.H.I





**PENGADILAN AGAMA SENGKANG**  
Jl. Akasia Sengkang Telp. (0485) 21891 /Fax. (0485 ) 21848  
e-mail : [pasengkang@yahoo.co.id](mailto:pasengkang@yahoo.co.id)  
Kabupaten Wajo 90911

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : W.20-A3/ 1092 /TL.00/VII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini, Drs. H. A. Majid Jalaluddin, MH, Wakil Ketua Pengadilan Agama Sengkang menerangkan bahwa:

Nama : **MUNIRA**  
N P M : 10100113122  
Program Studi : Peradilan  
Pekerjaan : Mahasiswa ( S.1 )  
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Gowa

Benar yang bersangkutan telah mengadakan penelitian pada Kantor Pengadilan Agama Sengkang, dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: “ **PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HIBAH YANG DIPERJUALBELIKAN OLEH PENGHIBAH SETELAH MENINGGAL DUNIA DI PENGADILAN AGAMA SENGKANG (Studi Kasus Putusan Nomor 166/Pdt.G/2015/PA.SKG)**”.

Setelah penulisan skripsi tersebut selesai, diharapkan kepada yang bersangkutan untuk menyetor 1 exemplar ke Perpustakaan Pengadilan Agama Sengkang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 15 Juli 2016

  
Wakil Ketua  
**Drs. H. A. Majid Jalaluddin, MH**  
NIP. 19541231 199203 1 015



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Kampus I Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax. 864923  
Kampus II Jl. HM. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 424835 Fax 424836

Nomor : SI.1/PP.00.9/25/2016

Samata, 17 Juni 2016

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

*Kepada Yth*

**Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan**

**Cq. Kepala UPT P2T BKPM D Prov. Sul-Sel.**

**Di**

**Makassar**

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama	: Munira
Nim	: 10100113122
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah dan Hukum/ Peradilan
Semester	: VI (Enam)
Alamat	: Griya Patri Abdullah Permai, Samata

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

" Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah yang Diperjualbelikan oleh Penghibah Setelah Meninggal Dunia di Pengadilan Agama Sengkang (Studi Kasus Putusan Nomor 166/ Pdt.G/2015/PA Skg)"

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A.  
2. Dr. Supardin, M.Hi.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sengkang, terhitung mulai 21 Juni 2016 s/d 21 Agustus 2016.

Demikian harapan kami dan terima kasih.

Wassalam



(Prof. Dr. Darussalam, M.Ag  
NIP. 19621016199031003

Tembusan :

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar Di Samata Gowa.





1 2 0 1 6 1 9 1 4 2 8 8 3 3

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
( UPT - P2T )

Nomor : 8592/S.01.P/P2T/06/2016  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth,  
Ketua Pengadilan Agama Sengkang

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : SI.1/PP.00.9/1625/2016 tanggal 17 Juni 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **MUNIRA**  
Nomor Pokok : 10100113122  
Program Studi : Peradilan  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HIBAH YANG DIPERJUALBELIKAN OLEH PENGHIBAH SETELAH MENINGGAL DUNIA DI PENGADILAN AGAMA SENGKANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 166/PDT.G/2015/PA SKG) "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **22 Juni s/d 22 Agustus 2016**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 22 Juni 2016

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



**A. M. YAMIN, SE., MS.**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar;
2. Bertinggal

SIMAP BKPMMD 22-06-2016



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://p2tbkpmmd.sulselprov.go.id> Email : [p2t\\_provulsulsel@yahoo.com](mailto:p2t_provulsulsel@yahoo.com)  
Makassar 90222



## PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI

Nomor : 052 Tahun 2016

Nama : Munira  
Nim : 10100113122  
Jurusan : Peradilan Agama  
Judul Skripsi : PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HIBAH YANG  
DIPERJUALBELIKAN OLEH PENGHIBAH SETELAH  
MENINGGAL DUNIA DI PENGADILAN AGAMA SENGKANG  
(Studi Kasus Putusan Nomor 166/Pdt.G/2015/Pa Skg)

Samata, 30 Mei 2016

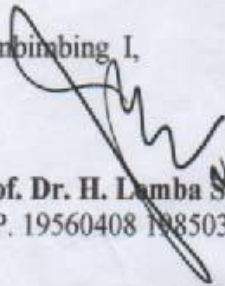
Penyusun,



Munira

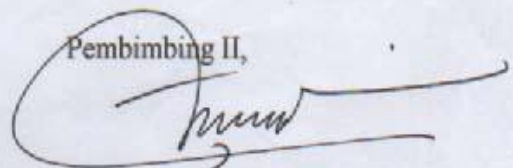
Nim 10100113122

Pembimbing I,



**Prof. Dr. H. Lamba Sultan, M.A.**  
NIP. 19560408 198503 1 004

Pembimbing II,



**Dr. Supardin, M.Hi.**  
NIP. 19650302 199403 1 003

Disahkan oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,



**Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.**  
NIP. 19621016 199003 1 003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Peradilan,



**Dr. Supardin, M.Hi.**  
NIP. 19650302 199403 1 003



**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : 140 Tahun 2017

**TENTANG**

**PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI**  
**TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan :  
Nama : Munira  
N I M : 10100113122  
Jurusan : Peradilan Agama  
Hari/Tanggal : Kamis, 16 Maret 2017  
Prihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi  
Judul : "Penyelesaian Sengketa Tanah hibah yang Diperjual Belikan di Pengadilan Agama Sengkang (Studi Kasus Putusan No. 166/Pdt.G/2015/PA.Skg)"
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;  
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;  
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk disertai tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;  
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Junto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :  
**Pertama** : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
Sekretaris : Dr. Hj. Patimah, M.Ag  
Penguji I : Andi Intan Cahyani, S.Ag, M.Ag  
Penguji II : Drs. H. M. Jamal Jamil, M.Ag  
Pelaksana : 1. Mujahidah, SE  
2. Nurhayati Wahid
- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil/Skripsi  
**Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;  
**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



: Samata  
: 10 Maret 2017

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata - Gowa;



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

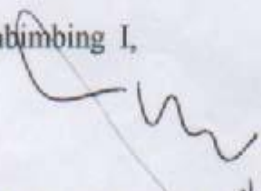
Pembimbing penulisan skripsi saudara Munira, NIM: 10100113122, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama proposal skripsi yang berjudul, "Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah Yang Diperjualbelikan di Pengadilan Agama Sengkang (Studi Kasus Putusan Nomor 166/Pdt.G/2015/PA Skg)", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan seminar hasil.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 21 Desember 2016

21 Rabiul Awal 1438 H

Pembimbing I,

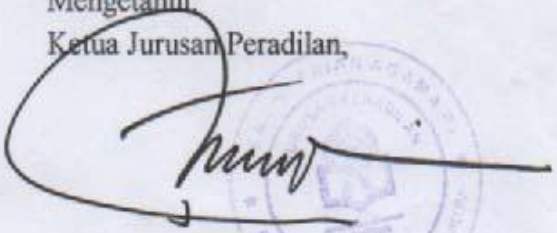
  
**Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A.**  
NIP: 19560408 198503 1 004

Pembimbing II,

  
**Dr. H. Supardin, M.HI.**  
NIP: 19650302 199403 1 003

Mengetahui:

Ketua Jurusan Peradilan,

  
**Dr. Supardin, M.HI.**  
NIP: 19650302 199403 1 003

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**  
Nomor 289 Tahun 2017  
**TENTANG**  
**PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI**  
**TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan :  
Nama : Munira  
N I M : 10100113122  
Jurusan : Hukum Acara Peradilan & Kekeluargaan  
Hari/Tanggal : Kamis, 30 Maret 2017  
Prihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi  
Judul : "Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah yang Diperjualbelikan (Studi Kasus Putusan No. 166/Pdt.G/2015/PA. Skg di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B)"
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;  
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;  
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;  
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

- Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
Sekretaris : Dr. Abd. Halim Talli, M.Ag  
Penguji I : Andi Intan Cahani, S.Ag, M.Ag  
Penguji II : Drs. H. Muh. Jamal Jamil, M.Ag  
Pelaksana : 1. Mujahidah, SE  
2. Nurhayati Wahid

Ujian Munaqasyah/Skripsi

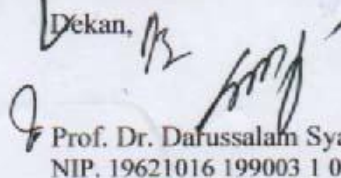
**Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;

**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata  
Pada tanggal : 27 Maret 2017

Dekan,

  
Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata - Gowa;



### PERSETUJUAN PENGUJI/PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Munira, NIM: 10100113122, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan, pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah Yang Diperjualbelikan (Studi Kasus Putusan Nomor 166/Pdt.G/2015/PA Skg di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B)", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk *dimunaqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk digunakan lebih lanjut.

Makassar, 21 Maret 2017 M  
22 Jumadil Akhir 1438 H

Munaqisy I : Andi Intan Cahyani, S.Ag., M.Ag.

(.....)

Munaqisy II : Drs. H. M. Jamal Jamil, M. Ag.

(.....)

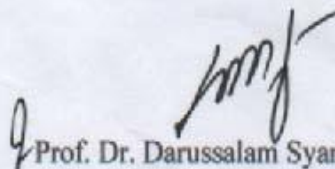
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M. Ag.

(.....)

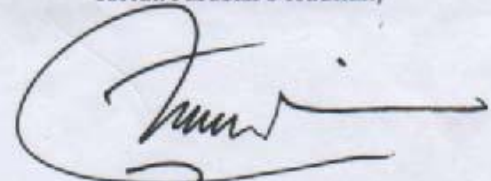
Pembimbing II : Dr. H. Supardin, M.H.I.

(.....)

Disahkan oleh :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar

  
Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.  
NIP. 19621016199031003

Disetujui oleh:  
Ketua Jurusan Peradilan,

  
Dr. H. Supardin, M.H.I.  
NIP.196503021994031003

DOKUMENTASI

Foto Struktur Organisasi PA Sengkang



Foto dari Depan PA Sengkang

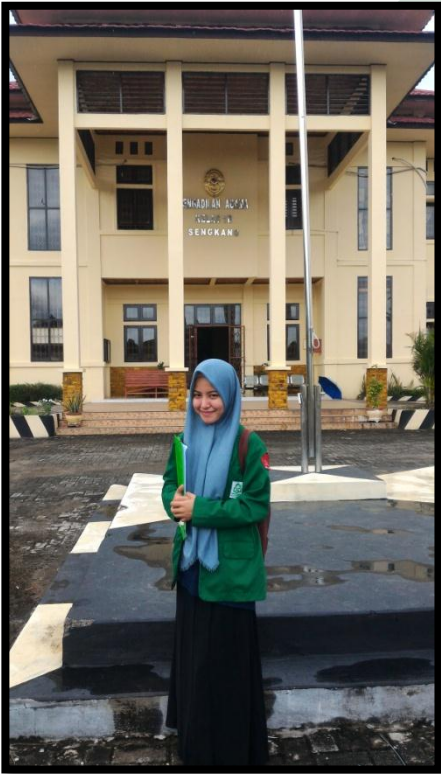


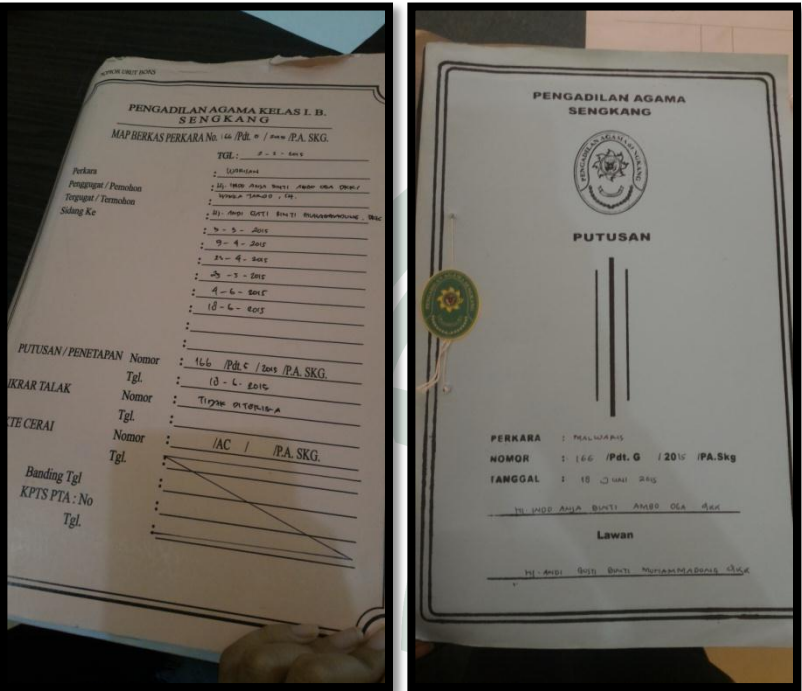
Foto Wawancara dengan Drs. H. Idris, M.Hi



Foto Wawancara dengan Dra.Jusmah, S.Hi



Foto sampul berkas Perkara Nomor 166/Pdt.G/2015/Pa.Skg



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



MUNIRA, dilahirkan di Kabupaten Barru tepatnya di kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu pada hari Jumat tanggal 9 Februari 1996. Anak ketiga dari lima bersaudara pasangan Alm. Drs.Hamzah dan Hj. Hasnawiah. Peneliti menyelesaikan

pendidikan di Sekolah Dasar di SDN 1 Takkalasi pada tahun 2007. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Balusu dan tamat pada tahun 2010 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Barru pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013. Pada tahun 2013 peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi, tepatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum pada Program Studi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Jurusan Peradilan Agama.

Selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, penulis sempat menjadi anggota dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Peradilan Agama pada periode 2015-2016 dan menjadi Wakil Bendahara pada organisasi Ikatan Penggiat Peradilan Semu (IPPS) UIN Alauddin Makassar periode 2015-2016. Melalui organisasi IPPS, penulis banyak meraih prestasi di bidang peradilan semu, diantaranya yaitu meraih penghargaan penuntut umum terbaik piala dekan tingkat fakultas tahun 2013, tergabung delegasi UIN Alauddin Makassar mengikuti Kompetisi Peradilan Semu di Universitas Udayana tahun 2014, meraih penghargaan Kuasa Hukum Pemohon Terbaik dalam Kompetisi Peradilan Semu Mahkamah Konstitusi Piala Laica Marzuki tahun 2015, tergabung dalam delegasi UIN Alauddin Makassar mengikuti piala Abdul Kahar Muzakkar di UII Yogyakarta dan berhasil menjadi Finalis, dan sebagai official delegasi UIN Alauddin Makassar dalam Kompetisi Peradilan Semu Mahkamah Konstitusi Piala Laica Marzuki tahun 2016 dan meraih juara 1. Hingga sekarang masih aktif di Organisasi Ikatan Penggiat Peradilan Semu UIN Alauddin Makassar.